

**Kepentingan Cina Memveto Resolusi PBB Terkait Konflik Suriah
Tahun 2011-2017**

SKRIPSI

(Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Peminatan *International Security and Peace*)



Disusun oleh:

Nidia Nurfebriyanti

125120407121012

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN
KEPENTINGAN CINA MEMVETO RESOLUSI PBB TERKAIT
KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2017

SKRIPSI

Oleh:

Nidia Nurfebriyanti
NIM. 125120407121012

Malang, 23 Januari 2018

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Achmad Fathoni K, S.IP, MA
NIK. 2009068201231001

M Riza Hanafi,S.IP., MIA
NIK. 2011028002071001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis,S.IP, M.DevSt
NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN
KEPENTINGAN CINA MEMVETO RESOLUSI PBB TERKAIT
KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2017
SKRIPSI

Oleh:
Nidia Nurfebriyanti
NIM. 125120407121012

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana
Pada Tanggal 23 Januari 2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Sidang

Sekretaris Majelis Sidang

Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIK. 2007077409112001

Irza Khurun'in, S.IP., MA
NIK. 2017109105132001

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Achmad Fathoni K, S.IP, MA
NIK. 2009068201231001

M Riza Hanafi, S.IP., MIA
NIK. 2011028002071001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si., Ak.
NIP. 196908141994021001

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama: Nidia Nurfebriyanti

NIM: 125120407121012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi “**KEPENTINGAN CINA MEMVETO RESOLUSI PBB TERKAIT KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2017**” adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan

Nidia Nurfebriyanti

NIM. 125120407121012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan perkenan-Nya penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: kepentingan Cina memveto resolusi PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017. Ketertarikan terhadap isu politik luar negeri telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan analisa yang berhubungan dengan kepentingan Cina di ranah PBB. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu membimbing dan memberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat yang luar biasa banyaknya kepada penulis.
2. Ibu Sundiyah dan Bapak Nuriyanto, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan sejak pengerjaan skripsi ini dimulai.
3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.
4. Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt, selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang dan seluruh dosen beserta staf Prodi Program Studi Hubungan Internasional yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Achmad Fathoni K., S.IP, M.A, selaku dosen pembimbing utama dan Bapak M Riza Hanafi., S.IP, M.IA, selaku dosen pembimbing pendamping sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan waktu, kesabaran

dan dukungannya yang luar biasa dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Melly Noviryani, S.Sos., M.A, selaku ketua majelis sidang dan Ibu Irza Khurun'in S.IP M.A selaku sekretaris majelis sidang yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan yang luar biasa dalam proses pembuatan skripsi ini.

7. Teman teman kelas I (D HI Ing 12) yang telah menemani penulis selama tiga tahun perkuliahan,dalam susah,senang,canda dan tawa, begitu banyak pelajaran dan kenangan yang penulis dapatkan, terima kasih banyak.

8. Keluarga keluarga lain penulis selama berkuliah, tempat penulis mencari pengalaman : paguyuban Guk Yuk Kab Sidoarjo, TEGAZS diklat X, Gendhis, Unitantri, AyoPeduliMalang, dan kepanitiaan lain yang pernah penulis ikuti.

9. Teman teman penulis Dayana,Bena,Nana,Brina sukses selalu ya. Partner naik bukit panderman Enda dan Dei, teman teman TIF I, geng cubung, geng xoxo, dan teman teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

10. Kakak kelas dan teman teman yang banyak membantu penulis dalam memberi masukan untuk skripsi ini : kak Alfian,kak Fendi,kak Siti,kak Fandi, Fidya, Sitha, Innarti, dan teman teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan.

11. Hiburan penulis selama mengerjakan skripsi : gambar gambar kelinci, hamster, kucing,anjing bulu bulu di instagram. Lagu lagu payung teduh, float, boyce avenue, dan sejenisnya

Malang, 23 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	viii
PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	24
1.4.1 Manfaat Akademis	24
1.4.2 Manfaat Praktis	24
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Studi Terdahulu.....	25
2.2 Kerangka Konseptual	30
2.2.1 Kebijakan Luar Negeri Menurut KJ Holsti	30
2.2.2 Kepentingan Nasional Menurut KJ Holsti	33
2.3 Operasionalisasi Konsep	39
2.4 Alur Pemikiran	44
2.5 Argumen Utama	45
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	47
3.3 Teknik Pengumpulan Data	47
3.4 Teknik Analisa Data.....	47
3.5 Sistematika Penulisan	48
BAB IV	50

GAMBARAN UMUM	50
4.1. Kronologi konflik Suriah	50
4.2 Keanggotaan Cina dalam Dewan Keamanan PBB	55
4.3 Veto Cina Pada Rancangan Resolusi PBB Terkait Konflik Suriah	65
4.4 Implikasi Veto Cina.....	104
4.2 Dinamika Hubungan Bilateral Cina dan Suriah.....	114
BAB V.....	118
KEPENTINGAN CINA MEMVETO RANCANGAN RESOLUSI PBB TERKAIT KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2017	118
5.1 Kepentingan Inti.....	118
5.2 Kepentingan Jangka Menengah.....	127
5.3 Kepentingan Jangka Panjang	150
BAB VI.....	156
PENUTUP.....	156
6.1 Kesimpulan	156
6.2 Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA	159

**KEPENTINGAN CINA MEMVETO RESOLUSI PBB TERKAIT
KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2017**

ABSTRAK

Konflik Suriah muncul akibat adanya efek domino dari *Arab Spring* yang hingga kini belum dapat terselesaikan dan menyita perhatian internasional. PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai mandat untuk menjaga perdamaian dunia mencoba menyelesaikan konflik tersebut sejak tahun 2011 dengan membuat resolusi. Cina sebagai negara anggota tetap dewan keamanan PBB memveto resolusi resolusi yang berkaitan dengan upaya pemberian sanksi dan penjatuhan rezim Assad di Suriah sehingga rezim Assad tetap berkuasa sampai saat ini, padahal sebelumnya Cina abstain disaat PBB membahas resolusi terkait sanksi di Libya, mengingat Suriah dan Libya sama sama negara yang terkena *Arab Spring*. Hubungan Suriah dan Cina sebelumnya juga tidak memiliki kedekatan secara politis sehingga sikap Cina tersebut menjadi suatu anomali. Penelitian ini akan mendeskripsikan kepentingan Cina dibalik tindakan veto tersebut. Akan digunakan konsep kepentingan nasional milik KJ Holsti sebagai alat analisis yang dijabarkan melalui indikator dan variabel yang terbagi dalam tiga periode waktu yaitu kepentingan inti, kepentingan menengah, dan kepentingan jangka panjang.

**KEPENTINGAN CINA MEMVETO RESOLUSI PBB TERKAIT
KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2017**

ABSTRACT

Syria conflict arise due to domino effect of Arab Spring which could not resolved yet and caught attention from the rest of the world. United Nation as an international organisation whose its mandate is keeping the world peace, try to solve this conflict by making resolutions since 2011. China as one of United Nation Security Council member, use its veto right to blocked some resolution related to sanction and every effort to bring assad regime down. Whereas China previously abstained when the UN discussed a resolution related to sanctions in Libya, while both Syria and Libya are affected by Arab Spring. China and Libya previously dont have any political relations closely, thus China behaviour became an anomaly. This minor thesis will describe China interest behind the veto using KJ Holsti concept of national interest based on three times period of interest : core interest, middle range interest, and long term interest.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu konflik sipil yang hingga saat ini menjadi sorotan dunia internasional adalah konflik sipil Suriah. Konflik di Suriah terjadi sejak tahun 2011 sebagai efek dari gelombang *arab spring*. Konflik di Suriah pada awalnya terjadi dikarenakan protes sekelompok masyarakat kepada pihak pemerintah dikarenakan pihak pemerintah dianggap berlaku sewenang wenang karena menahan sekelompok siswa yang menyuarakan aspirasinya. Hal ini kemudian memicu munculnya gelombang demonstran di kota kota lain di Suriah, kemudian gelombang demonstran ini dengan cepat berubah menjadi gelombang perlawanan yang menuntut rezim Assad untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan ini juga dipicu oleh ketidak puasan rakyat terhadap rezim Assad yang telah berkuasa selama beberapa dekade dan dianggap tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. serta dipicu kegagalan Assad yang dinilai tidak berhasil membawa kesejahteraan bagi rakyatnya¹.

Gelombang perlawanan ini kemudian di respon oleh pemerintah Suriah menggunakan kekuatan militer dikarenakan pihak pemerintah tidak ingin memenuhi tuntutan rakyat untuk turun dari jabatannya. Sehingga sejak itulah

¹ Anonymous, 2017, "syria's civil war explained the beginning", al jazeera diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html> pada 25 nov 2016

terjadi perang sipil antara rakyat Suriah atau pihak oposisi melawan pihak pemerintah yang kemudian menyebar ke berbagai kota. Keadaan di Suriah menjadi semakin ruimt dengan adanya kelompok pemberontak seperti ISIS yang juga menentang pemerintah Suriah dan ingin mendirikan negara baru, sehingga yang dihadapi oleh pihak pemerintah saat itu bukan hanya pihak oposisi namun juga kelompok pemberontak².

Konflik Suriah yang pada awalnya adalah konflik domestik, mulai mendapat perhatian internasonal dikarenakan konflik semakin membesar dan tidak menemukan titik penyelesaian. PBB sebagai organisasi internasional yang menaungi negara negara di dunia berusaha menyelesaikan konflik Suriah melalui dewan keamanan dengan cara mengajukan resolusi.

Dewan keamanan PBB adalah adalah badan yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Mempunyai lima belas anggota dengan lima anggota tetap yang mempunyai hak veto. Hak veto adalah hak yang dimiliki lima negara pemenang perang dunia kedua (Cina,Rusia,Amerika,Perancis,Inggris) untuk dapat tidak menyetujui rancangan resolusi yang nantinya akan diadopsi atau diimplementasikan.³.

Dewan keamanan PBB melihat konflik ini sebagai konflik yang tidak dapat menemui solusi secara internal lagi,oleh karena itu dewan keamanan melakukan upaya upaya penyelesaian konflik sebagai lembaga internasional yang

² Vaessen Eline, 2014 , "the syrian civil war" , master thesis vinal version , Erasmus University Rotterdam

³ Security council, 2012, "voting system and records" , united nations diakses dari <http://www.un.org/en/sc/meetings/voting.shtml> pada 1 september 2017

mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia dengan cara membuat resolusi. Dalam proses pembuatan resolusi, negara-negara pemegang hak veto kerap berseberangan sikap dalam pemutusan beberapa resolusi. Cina dan Rusia seringkali menjadi negara yang menggunakan hak vetonya dalam pembuatan resolusi konflik Suriah, sementara tiga anggota Dewan Keamanan lainnya yaitu Amerika, Inggris, dan Perancis tidak pernah menggunakan hak vetonya dalam setiap resolusi mengenai konflik Suriah. Cina memveto enam kali rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB sejak 2011 hingga 2017. Rancangan yang diveto Cina adalah rancangan resolusi yang berkaitan dengan sanksi non militer, penarikan pasukan, serta merujuk kasus ke pengadilan pidana internasional, atau dapat penulis simpulkan adalah resolusi resolusi yang berupaya melemahkan pihak pemerintah dan memperkuat oposisi. Melalui vetonya, Cina juga selalu menekankan untuk menghormati kedaulatan negara, dan menganggap solusi politik adalah solusi terbaik dari konflik Suriah.

Rancangan resolusi yang pertama yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 4 Oktober 2011. Rancangan resolusi tersebut membahas mengenai tindakan-tindakan yang harus dipertimbangkan terhadap pemerintah presiden Bashar Al Assad mengenai situasi yang sedang berkembang di Suriah termasuk tindakan di bawah PBB yang mengizinkan pemberian sanksi. Resolusi tersebut akan menuntut agar pemerintah Suriah segera berhenti menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dan membiarkan pelaksanaan kebebasan berekspresi, berkumpul dengan damai dan hak-hak fundamental lainnya. Juga memerintahkan pembebasan semua tahanan politik dan demonstran. Menegaskan

kembali untuk menyelesaikan krisis secara damai, dan memanggil warga Suriah untuk melakukan proses politik untuk mewedahi aspirasi dan Suara warga Suriah. Rancangan resolusi ini di veto dua anggota tetap dewan keamanan yaitu Cina dan Rusia dan disetujui tiga anggota tetap yaitu Amerika, Perancis dan Inggris⁴.

Dalam pernyataannya terkait resolusi ini, melalui perwakilannya Li Baodong Cina menyatakan sangat prihatin akan perkembangan yang terjadi di Suriah. Cina juga ingin memanggil semua pihak untuk menghindari pertumpahan darah. Cina berharap bahwa pemerintah menghormati proses dialog dan dewan keamanan harus menghargai kedaulatan pemerintahan dan wilayah Suriah. Cina juga menyatakan tindakan apa pun yang akan diambil harus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas, mematuhi prinsip PBB dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri. Cina menegaskan akan konsisten dan tegas pada prinsip ini. Cina juga menghormati prinsip prinsip tersebut dan mendorong dialog untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Karena sanksi dapat memperburuk situasi. Cina menganggap rancangan yang diberikan pada hari ini tidak memperbaiki keadaan. Cina akan terus mendukung penyelesaian damai konflik dan kegiatan mediasi dengan melibatkan negara negara yang relevan⁵.

⁴ Security council, 2011, "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria's Crackdown on Anti-Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China", united nations diakses dari <https://www.un.org/press/en/2011/sc10403.doc.htm> pada 18 november 2016

⁵ Security council, 2014, "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution" diakses dari <https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm> pada 19 november 2017

Rancangan resolusi yang kedua yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 4 Februari 2012. Rancangan resolusi tersebut membahas mengenai tuntutan agar Suriah segera menghentikan semua kekerasan dan melindungi penduduknya, melepaskan semua orang yang ditahan secara sewenang wenang, menarik seluruh angkatan bersenjata dan militer dari kota kota, dan menjamin kebebasan mengadakan demonstrasi damai. Resolusi ini akan menyerukan sebuah proses politik yang dipimpin oleh orang orang Suriah yang dilakukan di lingkungan yang bebas dari kekerasan, ketakutan, intimidasi, ekstremisme, dan ditujukan untuk secara efektif mewadahi aspirasi yang sah dari masyarakat Suriah. Rancangan ini kembali di veto oleh Cina dan Rusia dan disetujui Amerika, Inggris, dan Perancis⁶.

Dalam merespon resolusi ini Cina menyatakan melalui perwakilannya Li Baodong bahwa Cina juga ingin segera mengakhiri kekerasan di Suriah, meminta masyarakat Suriah menghormati sebuah proses reformasi. Cina juga mendukung untuk mengembalikan stabilitas di Suriah seperti sebelum perang. Oleh karena itu, Cina meminta masyarakat internasional untuk memberikan bantuan yg konstruktif, tetapi untuk mencapai hal itu kedaulatan dan kemerdekaan negara harus dihormati. Tujuan tujuan piagam PBB harus dihormati dan mendukung

⁶ Security council, 2012, "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League's Proposed Peace Plan", united nations diakses dari <https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm> pada 19 november 2017

dialog politik sebagai solusi konflik. bagi Cina rancangan ini adalah satu tekanan yang tidak menyelesaikan masalah⁷.

Rancangan resolusi yang ketiga yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 19 Juli 2012. Rancangan tersebut akan memperpanjang masa kerja UNSMIS (*United Nation Supervision Mission In Syria*) yang akan berakhir pada 20 Juli. Rancangan ini akan memperbarui mandat UNSMIS yang merekomendasikan UNSMIS untuk meningkatkan dukungan dialog politik. Dalam rancangan itu, dewan keamanan ingin melaksanakan enam poin mandat UNSMIS bersama mandat Kofi Annan untuk mengahiri kekerasan kemanusiaan, akses media, pelepasan tahanan dan dimulainya dialog politik. Melalui rancangan ini, dewan keamanan juga akan meminta kepatuhan Suriah untuk menarik pasukan militer dari pusat-pusat kota masyarakat dan penggunaan senjata berat dalam waktu 10 hari. Jika tidak, maka dewan keamanan berhak memberikan sanksi non militer seperti sesuai bab VII Piagam PBB. resolusi ini diveto oleh dua anggota tetap dewan keamanan yaitu Cina dan Suriah serta didukung oleh tiga lainnya Inggris, Perancis, dan Amerika⁸.

Li Baodong sebagai perwakilan Cina di dewan keamanan menyatakan terakut resolusi ini bahwa Cina prihatin dengan keadaan yang terjadi di Suriah, serta penting untuk mendorong gencatan senjata segera dan mendorong solusi

⁷ Security council, 2012, "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League's Proposed Peace Plan", United Nations diakses dari <https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm> pada 19 November 2017

⁸ Security council, 2012, "Security Council fails to adopt draft resolutions on Syria that would have threatened sanction, due to negative votes of China, Russian Federations", United Nations diakses dari <http://www.un.org/press/en/2012/sc10714.doc.htm> pada 19 November 2017

damai. Cina mendukung perluasan mandat UNSMIS. Tetapi Cina menganggap rancangan resolusi tersebut adalah hal yg kontraproduktif karena memiliki isi yang tidak seimbang dan hanya memberi tekanan ke satu pihak. Resolusi ini juga dianggap hanya akan menggagalkan gagasan solusi secara politik dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Cina menegaskan bahwa krisis di Suriah harus diselesaikan oleh masyarakat Suriah sendiri dan tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat Suriah dan juga norma norma dasar dalam hubungan internasional⁹.

Rancangan resolusi keempat yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 22 Mei 2014. Rancangan ini akan menetapkan untuk merujuk krisis Suriah ke ICC(*International Criminal Court*). Dewan keamanan menganggap selama lebih dari tiga tahun , dewan keamanan tak pernah mencapai kesepakatan untuk mengahiri kekeasan yang tidak hanya melukai Suriah tapi juga dunia. Orang orang Suriah memiliki hak fundamental atas keadilan, dan PBB mempunyai kewajiban untuk mempertahankannya. resolusi ini diveto oleh dua anggota tetap dewan keamanan yaitu Cina dan Rusia dan didukung oleh tiga lainnya Inggris,Perancis,dan Amerika¹⁰.

⁹ Security council, 2012 , "security council fails to adopt draft resolutions on syria that would have threatened sanction, due to negative votes of china,russian federations", United Nations diakses dari <http://www.un.org/press/en/2012/sc10714.doc.htm> pada 19 november 2017

¹⁰ Security council,2014, "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution" diakse dari <https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm> pada 19 november 2017

Cina melalui perwakilannya Wang Min dalam resolusi ini berpendapat bahwa Cina menentang semua tindakan kekerasan yg melanggar hukum humaniter dan HAM tetapi Cina menganggap setiap tindakan yang meminta rujukan ke ICC harus berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan negara. Yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik ini adalah memulai gencatan senjata dan memulai perundingan. Merujuk ke pengadilan internasional akan membuat situasi tidak kondusif untuk melanjutkan perundingan. Cina selama ini selalu objektif, tidak memihak, dan berkomitmen untuk mendesak semua pihak mencari jalan tengah¹¹.

Rancangan resolusi yang ke lima yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 5 Desember 2016. Rancangan ini akan membuat semua pihak di Suriah mengakhiri serangan terhadap kota Aleppo dalam waktu 24 jam. Usulan ini berlaku setidaknya dalam waktu satu minggu dan akan meminta akses yang aman ke semua area untuk bantuan kemanusiaan. Rancangan ini diveto oleh dua anggota tetap dewan keamanan yaitu Cina dan Rusia dan didukung oleh tiga lainnya Inggris, Perancis, dan Amerika¹².

Terkait resolusi ini, Cina melalui perwakilannya Liu Jieyi berpendapat untuk meminta upaya yang lebih intensif untuk memandu solusi politik yang

¹¹ Security council, 2014, "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution" diakses dari <https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm> pada 19 november 2017

¹² Security council, 2016, "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution to End Attacks on Aleppo as Two Permanent Members Cast Veto" diakses dari <https://www.un.org/press/en/2016/sc12609.doc.htm> pada 20 november 2017

dipimpin oleh masyarakat Suriah sendiri ke dalam situasi yang kompleks, sensitif, dan serius. Tindakan dewan keamanan harus melengkapi upaya diplomatik saat ini, dan juga meningkatkan upaya konsensus dalam badan dewan keamanan¹³.

Rancangan resolusi ke enam yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 28 februari 2017. Rancangan resolusi tersebut membahas mengenai pemberlakuan sanksi terhadap entitas individu yang dianggap terlibat dalam produksi atau penggunaan senjata kimia di Suriah. Entitas yang ditunjuk termasuk perusahaan dan organisasi yang akan mendapat sanksi berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, dan embargo pada peralatan dan bahan tertentu termasuk klorin dan senjata kimia lainnya. Rancangan ini akan mencatat laporan yang dilakukan oleh *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) atau organisasi pelarangan senjata kimia untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam beberapa kasus penggunaan senjata kimia di Suriah. Di antara sanksi khusus yang diajukan dalam draft tersebut, dewan keamanan akan memutuskan bahwa semua negara anggota akan membekukan semua dana, aset keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya di wilayah mereka, baik yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu yang terdaftar dalam lampiran, dan mengambil yang diperlukan untuk mencegah masuk atau transitnya pihak-pihak yang dikenai sanksi. Selanjutnya, dewan keamanan akan memutuskan bahwa negara-negara akan mengambil tindakan untuk mencegah pasokan, penjualan, dan

¹³ Security council, 2016, "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution to End Attacks on Aleppo as Two Permanent Members Cast Veto" diakses dari <https://www.un.org/press/en/2016/sc12609.doc.htm> pada 20 november 2017

pengiriman langsung atau tidak langsung kepada individu atau entitas yang dilampirkan dari semua senjata dan bahan terkait yang digunakan untuk mengirimkan senjata kimia. Rancangan ini diveto oleh dua anggota tetap dewan keamanan yaitu Cina dan Rusia dan didukung oleh tiga lainnya Inggris, Perancis, dan Amerika¹⁴.

Merespon resolusi ini, Cina melalui perwakilannya Liu Jieyi berpendapat bahwa konflik di Suriah saat ini tengah memasuki babak baru perundingan damai yang sedang berlangsung, yang menciptakan kesempatan langka untuk menyelesaikan konflik tersebut. Momentum ini harus di konsolidasikan dengan tindakan yg terkoordinasi untuk terus mendorong pihak pihak yang terlibat untuk terus berdialog. Cina juga menentang penggunaan senjata kimia oleh suatu negara, organisasi atau individu, dalam keadaan apapun. Cina pun mendesak hukuman bagi para pelaku. Cina kemudian menganjurkan adanya investigasi bersama yang berdasarkan kriteria objektif dan adil, sebagaimana diuraikan dalam resolusi 2319. Cina berpendapat rancangan ini didasarkan dimana pihak pihak yg terlibat masih memiliki perbedaan pendapat dan dipaksa melakukan voting ,membuat proses solusi damai secara politik di Jenewa terganggu¹⁵.

Dibalik veto yang dilakukan Cina tersebut, hubungan bilateral Cina dengan Suriah di bawah rezim Assad terbilang tidak terlalu dekat. Justru

¹⁴ Security council, 2017, "double veto prevents security council from adopting draft resolution intended to impose sanction for use of chemical weapons in syria", united nations diakses dari <https://www.un.org/press/en/2017/sc12737.doc.htm> pada 20 nov 2017

¹⁵ Security council, 2017, "double veto prevents security council from adopting draft resolution intended to impose sanction for use of chemical weapons in syria", united nations diakses dari <https://www.un.org/press/en/2017/sc12737.doc.htm> pada 20 nov 2017

hubungan kedua pihak semakin erat di saat perang sipil terjadi. Sehingga veto Cina atau sikap Cina secara politis pada dewan keamanan PBB menjadi anomali.

Dari segi ekonomi sebenarnya Suriah bukanlah mitra dagang strategis bagi Cina. Suriah tidak termasuk 15 negara partner dagang utama Cina¹⁶. Satu satunya negara timur tengah yang merupakan mitra dagang utama Cina adalah Arab Saudi yang tercatat di urutan 15 sebagai mitra strategis dengan nilai ekspor Cina sebesar \$ 37,1 miliar¹⁷. Sedangkan ekspor dari Cina ke Suriah tahun 2011 hanya senilai \$ 2,4 miliar , dan impor dari Suriah ke Cina sebesar \$ 26 juta. Nilai tersebut jumlahnya terus menurun hingga \$ 1,1 miliar sejak tahun 2012¹⁸. Investasi Cina di Suriah juga hanya \$ 20 juta. Suriah juga bukan negara utama pemasok energi minyak bagi Cina karena nilainya yang sangat kecil yaitu kurang dari 2% dari total impor minyak Cina¹⁹. Hal ini juga menjadikan Suriah sebagai salah satu negara timur tengah dengan nilai investasi Cina yang cukup kecil.

Hubungan bilateral Cina dan Suriah juga minim dari isu politik. Tercatat sejak tahun 1956 saat pertama kali kedua negara membuka kedutaan, kunjungan diplomatik baru terjadi di tahun 2001. Disusul kunjungan balasan di tahun 2004. Sejak saat itu kedua negara aktif melakukan kunjungan dalam rangka memper erat hubungan perdagangan, misalnya melakukan kerjasama pembentukan Cina Suriah

¹⁶ Workman daniel , 2016 , "china's top import partners" , world's top export diakses dari <http://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/723/> pada 2 oktober 2016

¹⁷ Ibid

¹⁸ Shannon Tiezi, 2014 "China at Geneva II: Beijing's Interest in Syria," ,The Diplomat Diakses dari <http://thediplomat.com/2014/01/china-at-geneva-ii-beijings-interest-insyria/> pada 3 oktober 2016

¹⁹ Statista , 2014 , "breakdown of china crude oil imports in 2014 by source country" , statista.com diakses dari <https://www.statista.com/statistics/221765/chinese-oil-imports-by-country/> pada 1 oktober 2016

bussiness council pada tahun 2009. Hubungan yang terjalin antar kedua negara kemudian diisi oleh pertukaran kebudayaan. Satu satunya sikap politik yang ditunjukkan Suriah adalah dukungannya mengenai *one china policy* terkait Taiwan²⁰.

Jika dibandingkan dengan Rusia sebagai negara yang sama sama melakukan veto, maka Rusia adalah negara yang memiliki hubungan bilateral lebih dekat dengan Suriah. Hubungan yang terjadi antara Rusia dengan Rezim Assad terbilang cukup dekat baik secara ekonomi maupun politik. Misalnya adanya penghapusan utang pada rezim Assad, investasi Rusia yang cukup besar yaitu mencapai 4 juta dollar dan Rusia telah mempunyai pangkalan militer angkatan laut di kota tartus Suriah sejak tahun 1980²¹.

Sikap Cina juga menjadi anomali karena sebelumnya Cina tidak pernah menyuarakan ketidaksetujuannya mengenai solusi non politik, sanksi, ataupun prinsip pbb untuk menghormati kedaulatan pada negara lain yang terkena dampak *arab spring* yaitu Libya. Di tahun 2011, Cina abstain pada resolusi 1973 mengenai larangan penerbangan di Libya, penjatuhan sanksi terhadap Khadaffi, dan gencatan senjata. Dalam resolusi tersebut, NATO melakukan intervensi bersama koalisi angkatan udara Inggris, Perancis, dan Kanada yang berujung pada

²⁰ Zambelis chris, 2008, "the geopolitics of sino syria relations", china brief volume 8 issue 20

²¹ Osborn andrew, 2016, "rusia to build permanent syria naval base", reuters.com diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-tartus/russia-to-build-permanent-syrian-naval-base-eyes-other-outposts-idUSKCN12A0W6> pada 11 oktober 2017

jatuhnya pemerintahan Khadafi²², tetapi sikap yang berbeda justru ditunjukkan pada Suriah.

Sikap Cina dalam vetonya menjadi anomali dan menarik untuk di teliti karena tidak adanya kedekatan politis yang terjalin antara kedua negara sebelumnya, serta perbedaan sikap Cina pada negara lain yang juga terkena *arab spring* yaitu Libya.

1.2 Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah:

Apa kepentingan Cina memveto rancangan resolusi PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

Untuk mendeskripsikan kepentingan Cina memveto rancangan resolusi PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017

²² Security council, 2011, "security council approves 'no fly zone' over libya authorizing 'all necessary measures' to protect civilians , by vote of 10 in favor with 5 abstentions, united nations, diakses dari <https://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm> pada 10 oktober 2017

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan sekaligus bagi penulis sendiri, baik dari segi akademis maupun dari segi praktis, diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjelaskan kepentingan Cina memveto rancangan resolusi dewan keamanan PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017
2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengoperasionalkan konsep kepentingan nasional dalam meneliti kasus yang diangkat oleh penulis

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menambah wawasan pembaca mengenai studi terkait kepentingan negara dalam konflik sipil di negara lain
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran terkait mengenai apa saja yang bisa dijadikan kepentingan dalam melakukan suatu kebijakan atau tindakan di dunia internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Penulis menggunakan dua studi terdahulu yang menunjang penelitian penulis. Studi terdahulu yang pertama memiliki kesamaan fenomena dengan penelitian penulis, sedangkan studi terdahulu yang kedua memiliki kesamaan konsep dengan penelitian penulis.

Studi terdahulu yang pertama berasal dari jurnal Jamestown Foundation China Brief Volume: 8 Issue: 20 yang berjudul *The Geopolitics of Sino Syrian Relations* karangan Chris Zambelis. Dalam tulisan ini, Chris Zambelis berupaya menggambarkan kehadiran Cina di Suriah melalui aktivitas perdagangan, kebudayaan, dan diplomatik sebagai upaya Cina untuk memberikan pengaruhnya di timur tengah menggeser posisi Amerika²³.

Kehadiran Cina di Timur Tengah dilatar belakangi dengan adanya kebutuhan minyak yang cukup besar sebagai sarana pembangunan Cina yang semakin maju, selain itu semakin berkembangnya perekonomian Cina yang

²³ Zambelis chris, 2008, "the geopolitics of sino syrian relations", publication china brief issue : 8 no 20, the jamestown foundation diakses dari <https://jamestown.org/program/the-geopolitics-of-sino-syrian-relations/> pada 22 oktober 2017

membutuhkan pasar baru bagi produk buatan Cina. Tetapi seiring kemajuan Cina, Cina kini keluar dari konteks kebutuhan ekonomi dan sumber daya alam. Terlebih sejak pasca perang dingin, Cina ingin lebih memprioritaskan geopolitiknya di timur tengah untuk memperluas pengaruhnya. Kerjasama Cina dan Suriah pertama kali terjadi di tahun 1980 hingga 1990 saat Cina melakukan perdagangan senjata dengan Suriah dikarenakan Suriah membutuhkan peningkatan alat alat militer sementara Mesir sebagai pemasok utama menolak menjual senjata pada Suriah. Tetapi kerjasama ini harus berhenti karena tindakan Cina mendapat sanksi internasional dari Amerika karena melanggar rezim pengendalian teknologi rudal tahun 1987. Di tahun 1990 ditengah ekspansi perekonomian Cina, Cina tetap melakukan perdagangan senjata bukan hanya dengan Suriah saja, tetapi negara timur tengah lain untuk memberikan pengaruhnya di dunia internasional. Diluar konteks militer, Cina terus berusaha menjalin kedekatan dengan negara timur tengah termasuk Suriah, walaupun Suriah bukanlah negara yang strategis bagi Cina. Hal ini juga seakan menimbulkan sentimen sebagai upaya Cina untuk menggeser posisi Amerika sebagai aktor global di timur tengah.

Kunjungan bilateral yang terjadi pada kedua negara pertamakali pada tahun 2001 dimana presiden Cina mengunjungi Suriah kemudian di tahun 2004 Suriah melakukan kunjungan balasan. Sejak itu, kedekatan yang terjalin antar kedua negara terjadi dalam sektor bisnis. Cina mulai banyak berinvestasi walaupun nilainya tidak cukup besar di sektor migas dan sektor sektor lainnya. Seiring meningkatnya hubungan perdagangan, maka Cina sejak tahun 2007 menjadi mitra dagang utama Suriah. Meskipun ekspansi perdagangan yang pesat

ini, keseluruhan volume perdagangan Cina Suriah tetap relatif kecil dibandingkan dengan hubungan perdagangan Cina di negara lain di kawasan ini. Kerjasama antara Cina Suriah diperluas dengan kerjasama kebudayaan dan pariwisata yang ditandai dengan dibukanya pusat kebudayaan dan bahasa Cina serta promosi pariwisata Suriah kepada masyarakat Cina.

Tetapi Cina menganggap Amerika sebagai rivalnya di timur tengah akan memandang berbeda hubungan Cina Suriah, karena Suriah mempunyai masalah tersendiri dengan Amerika. Bagi Cina, Amerika mungkin menganggap kehadiran Cina di Suriah sebagai mata mata untuk melihat seberapa jauh pengaruh Amerika di timur tengah. Jalinan hubungan baik ini juga ditandai dengan pengakuan Suriah pada *one china policy* terkait unifikasi Taiwan. Kehadiran Cina di Timur Tengah juga tak lepas dari upaya untuk melemahkan kekuatan Taiwan karena 90% impor minyak Taiwan berasal dari timur tengah dengan cara memberi tawaran investasi dari kekuatan ekonomi global.

Tulisan tersebut memiliki persamaan topik dengan penulis yaitu perilaku Cina pada Suriah dari tahun 1990 hingga awal 2000 atau sebelum *arab spring* terjadi, tetapi perbedaannya tulisan tersebut meneliti perilaku Cina dari aspek geopolitik Cina di timur tengah sedangkan penulis akan meneliti aspek kepentingan Cina berdasarkan perilakunya dalam konflik sipil Suriah. Tulisan ini juga memberikan pemahaman untuk penulis dalam melihat sikap Cina kepada Suriah. selain itu juga membantu mempertegas urgensi dan penunjang anomali.

Studi terdahulu yang kedua yaitu dari jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional Vol. 7 No. 1 Juni 2012 (42-45) FISIP Universitas Budi Luhur dengan judul propaganda Amerika Serikat terhadap Iran melalui pemberitaan media masa (sebuah tinjauan : dampak program pengembangan nuklir Iran terhadap Amerika Serikat) karangan Ica Wulansari dan Dody Wihardi.

Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa Iran adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki letak strategis. Negara Iran semakin menjadi sorotan internasional ketika mengembangkan uji coba nuklir, hal ini memicu beragam persepsi di kalangan internasional termasuk Amerika. Amerika memandang hal ini berseberangan dengan garis politik luar negeri Amerika Serikat karena Iran secara tidak langsung mengancam kepentingan Amerika di wilayah Timur Tengah. Amerika di era Obama telah menyiapkan langkah langkah strategis untuk meredam agresifitas Iran yaitu melalui propaganda media masa²⁴. Propaganda yang dilakukan media AS terhadap Iran dengan pemberitaan yang bersifat tendensius. Pemberitaan yang memberi stigma negatif terhadap Iran. Headline mengenai pemberitaan Iran terkesan provokatif. Salah satu contohnya berita media cetak bertajuk *Iran, perceiving threat from West, willing to attack on U.S. soil, U.S. intelligence report finds* pada harian The Washington Post tanggal 31 Januari 2012. . Iran turut serta membantu teroris dan kelompok militan di Irak

²⁴ Wulansari Ica,dody, 2012 , propaganda Amerika Serikat terhadap Iran melalui pemberitaan media masa (sebuah tinjauan : dampak program pengembangan nuklir Iran terhadap Amerika Serikat)", jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional Vol. 7 No. 1 Juni 2012 (42-45), FISIP Universitas Budi Luhur . diakses dari <http://ic-mes.org/politics/jurnal-propaganda-as-terhadap-iran-melalui-media-massa/> pada 11 oktober 2016

dan Afganistan, Hizbullah di Libanon, Hamas, dan membantu kelompok teroris Palestina.

Pada jurnal tersebut digunakan beberapa konsep yang salah satunya adalah konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional KJ Holsti. Konsep kepentingan nasional dalam jurnal ini digambarkan bahwa kepentingan nasional dalam tujuan pencapaiannya dibagi menjadi tiga tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Kepentingan dalam tujuan jangka pendek dapat digambarkan sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan pihak bersedia melakukan pengorbanan sebesar-besarnya. Dalam tujuan jangka menengah, tujuan utama suatu pemerintahan tidak dapat dicapai dengan kekuatan sendiri, negara harus berinteraksi dengan negara lain. Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya²⁵.

Amerika di Iran mempunyai kepentingan inti yaitu mengehentikan serangan gerakan terorisme yang kemungkinan memasuki negaranya, karena menurut konstruksi media Amerika, Iran melakukan pengembangan nuklir dengan tujuan jihad mendukung teroris dan kelompok militan di Irak dan Afganistan, Hizbullah di Libanon, Hamas, dan membantu kelompok teroris Palestina . Yang kedua adalah kepentingan jangka menengah yaitu melalui pemberitaan media masa secara internasional, ia melakukan perpanjangan diri untuk mempengaruhi dunia Internasional agar menganggap isu nuklir Iran sebagai suatu tindak kejahatan

²⁵ ibid

sehingga nantinya akan mampu menjadikan isu yang penting dan menjadikan tuntutan bagi dunia internasional untuk menghentikan nuklir Iran²⁶.

Persamaan studi terdahulu tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan konsep yang sama yaitu kepentingan nasional dari KJ Holsti tetapi dalam jurnal tersebut hanya dipaparkan dua kepentingan yaitu kepentingan inti dan jangka menengah. Sedangkan perbedaannya adalah kasus dalam jurnal tersebut berbeda dengan studi kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini berkontribusi untuk membantu penulis memahami konsep kepentingan nasional KJ Holsti.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri Menurut KJ Holsti

Dalam bukunya, KJ Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan dari suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan kondisi dimana tindakan tersebut dirumuskan²⁷.

Sementara itu output kebijakan luar negeri adalah sekumpulan ide yang digagas oleh pembuat kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun membuat beberapa perubahan dalam suatu lingkungan yang dapat

²⁶ Holsti KJ, 1987, "International politics : a framework for analysis", prentice – hall international inc : new jersey hal 21

²⁷ Ibid Hal 21

dilakukan dengan cara membuat kebijakan, menunjukkan sikap ataupun tindakan tertentu²⁸.

KJ Holsti membagi gagasan mengenai kebijakan luar negeri menjadi empat bagian diurutkan mulai dari yang paling umum hingga yang paling spesifik yaitu : 1) orientasi kebijakan luar negeri , 2) peran nasional , 3) tujuan kebijakan luar negeri, dan 4) tindakan tindakan yang dihasilkan suatu negara²⁹

Orientasi kebijakan luar negeri digambarkan sebagai level keterlibatan negara dalam berbagai permasalahan internasional dalam suatu area setidaknya satu ekspresi dari orientasinya yang paling umum terhadap negara negara di dunia. Dengan adanya orientasi artinya suatu negara mempunyai tindakan umum dan komitmen terhadap lingkungan internasional, strategi dasarnya untuk mencapai tujuan dan aspirasi domestik dan eksternal dan untuk mengatasi ancaman yang terus berlanjut. Ada tiga orientasi politik negara yaitu isolasi, non blok/ketidakberpihakan, dan pembuatan koalisi dan aliansi³⁰.

Peran nasional digambarkan sebagai definisi pembuat kebijakan tentang jenis keputusan, komitmen, peraturan, dan tindakan umum yang sesuai dengan keadaan mereka, dan fungsi yang harus dilakukan negara mereka dalam berbagai kondisi yang menyangkut geografis. Contoh peran nasional adalah *regional*

²⁸ Holsti KJ, 1987 , "International politics : a framework for analysis" , prentice – hal international inc : new jersey hal 107

²⁹ Ibid hal 92

³⁰ Opcit hal 109

defender yaitu peran untuk melindungi negara lain dalam wilayah tertentu, atau *mediator* yaitu peran untuk membantu dalam resolusi konflik internasional³¹.

Tindakan kebijakan luar negeri digambarkan sebagai hal hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain yang bertujuan memberikan dampak mencapai orientasi,memenuhi peran negara atau dapat dan mempertahankan tujuan negara³².

Ada tiga hal yang mempegaruhi tujuan,pilihan,dan tindakan negara. dimana tujuan,pilihan dan tindakan dianggap instrumen yang lebih spesifik daripada kedua instrumen kebijakan yang lebih umum yaitu orientasi dan peran. Yang pertama adalah situasi krisis. Ketika ada suatu peristiwa yang berkembang dengan pesat atau tiba tiba dan mengancam di lingkungan internasional,maka negara akan mengambil tindakan tertentu walaupun mungkin tidak relevan dengan perannya di dunia internasional. Yang kedua , sebagian besar kebijakan luar negeri adalah mengenai masalah sehari hari yg dihadapi negara yang terkadang tidak relevan dengan orientasi dan peranan negara. Contohnya suatu keputusan untuk memvoting atau memveto pada resolusi konflik atau konferensi hukum laut adalah hal yang tidak relevan dengan orientasi dan peran negara³³. Yang ketiga,dapat digambarkan bahwa dua negara dengan peran negara yang terlihat mirip, tidak akan membuat keputusan yang sama atau tindakan yang sama ketika berhadapan dengan satu stimulan yang sama. Misalnya orientasi Finlandia

³¹ ibid

³² Opcit hal 365

³³ ibid

sebagai negara yg mempunyai orientasi non blok diikuti dengan partisipasi aktif dalam bidang kebudayaan dan ekonomi dengan negara negara Eropa.

2.2.2 Kepentingan Nasional Menurut KJ Holsti

Tujuan kebijakan luar negeri dari komponen KJ Holsti dapat didefinisikan sebagai adanya negara yang terdiri dari unit politik selalu mempunyai kebutuhan dan tujuan yang dicapai baik dengan upaya upaya tertentu maupun dengan mempegaruhi negara lain. Sehingga kebijakan luar negeri dibuat untuk mencapai tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan tersebut dapat bersifat spesifik maupun umum. Istilah kepentingan nasional sendiri digunakan sebagai suatu alat untuk menganalisis tujuan tujuan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Paul Seabury yang mengatakan bahwa kepentingan nasional merujuk pada sekumpulan tujuan negara yang harus dicari untuk mewujudkan tatanan hubungan luar negerinya³⁴.

Penggunaan istilah kepentingan nasional untuk mendeskripsikan berbagai macam kepentingan bersama dalam kebijakan luar negeri bukanlah berarti bahwa pihak pemerintah ataupun kementrian luar negeri membuat serangkaian tujuan untuk dicapai di tingkat internasional. Sebaliknya, pemerintah dan para pembuat kebijakan sebelumnya telah menetapkan tujuan tujuan tersendiri yang harus dicapai di negaranya, sehingga tindakan beberapa pemerintah tidaklah selalu untuk mmenuhi tujuan spesifik tertentu. Beberapa tindakan pemerintah di tingkat internasional tidak selalu berhubungan dengan tujuan kolektif. Berbagai tindakan

³⁴ opcit hal 138

pemerintah di tingkat internasional juga seingkali dikarenakan adanya suatu tekanan, krisis, ataupun respon terhadap masalah di tingkat internasional, negara tidak selalu mempunyai kebijakan yang benar benar dibuatnya sendiri. Hal inilah yang menjadikan negara tidak selalu mengejar tujuan tujuan tertentu, seperti tujuan jangka panjang misalnya³⁵.

Hal ke dua yang harus diingat dari konsep kepentingan adalah, negara terkadang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah dibuat. Di situasi tertentu pembuat kebijakan dihadapkan pada serangkaian pilihan dan memilih mana pilihan yang paling baik dengan resiko se minimal mungkin. Contoh dari hal ini adalah implementasi dari *disarmament*. Adanya disarmament bagi beberapa negara mungkin menjadi suatu cara untuk menjaga keamanan nasional dengan menghindari serangan militer negara lain, tetapi implementasi disarmament bagi beberapa negara akan menyebabkan resiko jangka pendek yang lebih serius sehingga beberapa negara tak menerapkan kebijakan ini³⁶.

Negara negara modern saat ini berusaha mengejar kepentingan bersama berupa keamanan nasional, kesejahteraan rakyat, akses untuk mendapat pasar, dan mungkin wilayah teritori negara tetangga. Hal hal ini kemudian di klasifikasikan menurut tiga kriteria. Yang pertama nilai yang ditempatkan dalam tujuan tersebut atau sejauh mana pembuat kebijakan berkomitmen melalui sumber dayanya untuk mendapatkan tujuan tertentu. Yang kedua elemen waktu yang ditempatkan

³⁵ Ibid hal 140

³⁶ Ibid hal 141

pada pencapaiannya, dan yang ketiga bentuk tuntutan untuk memaksa negara lain dalam suatu sistem. KJ Holsti kemudian mengklasifikasi tiga jenis kepentingan nasional berdasarkan periode waktu pencapaiannya yaitu yang pertama kepentingan inti dimana pemerintah dan negara berkomitmen mengenai eksistensinya yang harus dijaga ataupun diperluas, yang kedua tujuan jangka menengah yang biasanya menekankan tuntutan pada beberapa negara lain, dan yang ketiga tujuan jangka panjang yang biasanya tak mempunyai batas waktu tertentu³⁷.

Kepentingan Inti(*Core Interest*)

Kepentingan inti digambarkan sebagai kepentingan mengenai suatu tujuan dimana kebanyakan orang atau dalam konteks ini pemerintah mau melakukan pengorbanan tertinggi untuk mendapatkannya. Kepentingan ini biasanya terletak di bagian paling dasar dari kebijakan luar negeri. Kepentingan inti juga biasanya paling berhubungan dengan pertahanan diri dari unit unit politik. Kepentingan ini tergolong kepentingan jangka pendek karena tujuan negara yang lain tidak akan tercapai jika unit politik didalamnya tidak mampu mempertahankan keutuhan atau keberadaan kesatuan negaranya sendiri. Kepentingan inti yang pada umumnya ideal adalah untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan negara asal dan menjamin dasar sistem kelangsungan politik,ekonomi,sosial dalam negara tersebut³⁸. Beberapa pemerintah mengaitkan pertahanan diri dengan pegamanan

³⁷ Ibid hal 144

³⁸ Ibid hal 145

wilayah perbatasan negara karena di wilayah perbatasan tersebut terdapat suatu ancaman.

Bentuk lain dari kepentingan inti adalah kesatuan kelompok etnis, bahasa, maupun agama dalam suatu negara. Pembentukan wilayah suatu negara adalah sejarah yang panjang yang dibentuk dari berbagai unsur suku, bahasa, maupun kesatuan agama. Hal hal ini yang kemudian menyebabkan mungkin terjadi konflik dalam negara ada beberapa kelompok tertentu yang ingin melakukan pembebasan diri dari dalam negara³⁹.

Tujuan Jangka Menengah (Middle-Range Objectives)

Tujuan jangka menengah adalah tujuan yang dicapai dalam kurun waktu lebih lama daripada kepentingan inti dan jangka panjang. Tujuan jangka menengah terdiri dari tiga hal yaitu :

- Tuntutan Perbaikan Perekonomian (*Economic Betterment Demands*)

Yang pertama, yang tergolong kepentingan jangka menengah adalah tuntutan perbaikan ekonomi dari dalam negeri.

Tuntutan ini dapat dicapai melalui tindakan di level internasional. Pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan suatu negara sendirian karena suatu negara mempunyai sumber daya, daya administratif, dan kemampuan yang terbatas. Saling ketergantungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri dengan cara melakukan interaksi

³⁹ Ibid hal 147

dengan negara lain. Perdagangan, bantuan luar negeri, dan juga pembukaan pasar di luar negeri adalah hal hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial negara. Tuntutan atau kebutuhan yang diinginkan rakyat agar kesejahteraan terpenuhi biasanya seputar tersedianya lapangan pekerjaan, adanya pemasukan, fasilitas kesehatan, keamanan, sarana rekreasi, dan lain lain. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan suatu aksi dalam level internasional yang mempunyai dampak tertinggi untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan dari warga negaranya tersebut sehingga pemerintah akan berusaha memenuhi kepentingan rakyatnya di luar negeri,⁴⁰.

- Meningkatkan Nama Baik Negara (*Increase State Prestige*)

Yang kedua, yang tergolong kepentingan jangka menengah adalah meningkatkan nama baik negara di tingkat internasional. Upaya upaya ini dapat berupa tindakan diplomatik, meningkatkan kapabilitas militer, kemajuan teknologi. Di era saat ini seringkali nama baik diukur dari tingkat kemajuan industri dan teknologi karena saat ini pembangunan menjadi hal yang ingin dicapai oleh banyak negara industri. Pada umumnya kepentingan jangka menengah ini tidak mempunyai batasan waktu pencapaiannya. Mayoritas negara negara yang memiliki power dapat meningkatkan nama baiknya di dunia internasional dengan melakukan berbagai hal seperti membuat berbagai kebijakan dan melakukan tindakan tindakan diplomatik, peningkatan kapasitas

⁴⁰ Ibid hal 148

militer, pemberian bantuan luar negeri, kunjungan kenegaraan secara timbal balik, bahkan pengembangan senjata nuklir⁴¹.

- Perpanjangan Diri (*Self extension*)

Ketiga, yang tergolong kepentingan jangka menengah adalah perpanjangan diri (*self extension*) atau bentuk lain dari imperialisme. Dalam melakukan perpanjangan diri beberapa negara membuat tuntutan pada wilayah sekitarnya walaupun wilayah tersebut tidak terkait dengan keamanan wilayah ataupun kesatuan etnis. Negara melakukan ekspansi teritorial walaupun ekspansi tersebut tidak memenuhi kebutuhan strategis, ekonomi, ataupun sosial. Sedangkan negara yang lain tidak melakukan ekspansi wilayah, tetapi mencari keuntungan termasuk mencari akses pada bahan mentah, pasar, dan jalur perdagangan yang tidak dapat dicapai melalui kerjasama biasa. Perpanjangan diri yang lain yaitu adanya akses dan kontrol eksklusif dapat dicapai melalui pemberian pengaruh⁴².

Tujuan Jangka Panjang (*Long Range Goals*)

Kepentingan jangka panjang berkaitan dengan rencana, impian, dan visi suatu negara atau yang berhubungan dengan organisasi politik, ideologi pada sistem internasional, atau peran negara tertentu di dalam suatu sistem. Perbedaan kepentingan jangka menengah dan jangka panjang tidak hanya terletak pada jangka waktu tetapi juga lingkup yang lebih signifikan. Dalam kepentingan jangka menengah, negara membuat tuntutan tertentu pada negara tertentu, sedangkan pada

⁴¹ Ibid hal 149

⁴² Ibid hal 150

kepentingan jangka panjang negara biasanya membuat tuntutan secara universal untuk mencapai tujuannya melakukan konstruksi ulang terhadap sistem internasional. Hal ini dapat dicapai dengan terciptanya *international order*. Adanya *international order* mungkin tidak selalu berjalan seiring dengan kepentingan inti dan jangka menengah. Biasanya new order dari suatu negara tercermin secara eksplisit, berasal dari hal yang berkaitan dengan filosofis politik ataupun agama.⁴³

2.3 Operasionalisasi Konsep

Pada bagian ini penulis ingin melihat adanya kepentingan nasional Cina yang memenuhi kriteria kepentingan dalam veto Cina pada rancangan resolusi dewan keamanan PBB terkait Suriah tahun 2011-2017. Kepentingan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu kepentingan inti,kepentingan jangka menengah,dan kepentingan jangka panjang.

Menurut Holsti, kepentingan inti adalah kepentingan terkait pertahanan diri negara atau *self preservation*. Pertahanan diri tidak hanya pertahanan terkait kedaulatan wilayah atau perluasan wilayah suatu negara, tetapi juga persatuan kelompok etnis,agama,dan bahasa di dalam negara tersebut. Dimana kepentingan ini menjadi sangat penting karena tujuan utama kepentingan inti adalah untuk menjaga keberlangsungan negara. Cina telah lama memiliki suatu masalah terkait etnis yang dianggap mengancam kedaulatan dalam negerinya yaitu masalah separatisme etnis Uighur.. Terkait masalah keamanan dalam negeri, maka penulis

⁴³ Ibid hal 151

akan melihat apakah veto yang dilakukan Cina akan ber implikasi pada keamanan dalam negeri Cina terutama terkait kelompok separatisme Uighur sebagai kelompok separatisme yang selama ini ber upaya melakukan pembebasan diri dari wilayah kesatuan Cina.

Kepentingan atau tujuan jangka menengah Cina dalam kasus ini meliputi tiga variabel yaitu tuntutan perbaikan ekonomi(*economic betterment demand*), meningkatkan nama baik (*increase state prestige*), dan perpanjangan diri(*self preservation*). Pada variabel *economic betterment demand* ,Holsti menjelaskan bahwa negara akan melakukan upaya tuntutan perbaikan ekonomi didalam negeri. Dengan suatu aksi dalam level internasional yang mempunyai dampak untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan dari warga negaranya. Terkait variabel ini, penulis akan melihat ada atau tidaknya kontribusi veto Cina pada peningkatan kesejahteraan Cina terutama terkait investasinya di Suriah.

Pada variabel *increase state prestige*, Holsti menjelaskan bahwa negara ingin meningkatkan nama baiknya di sistem internasional. Holsti menjelaskan bahwa negara dapat meningkatkan nama baik dengan banyak cara misalnya peningkatan kapabilitas militer, teknologi, membuat kebijakan ataupun melakukan tindakan tindakan tertentu. Terkait variabel ini, maka penulis akan melihat tindakan tindakan yang dilakukan Cina untuk mendukung berlangsungnya solusi politik yang terjadi dalam konflik Suriah terutama tindakan tindakan untuk melakukan mediasi. Karena melalui vetonya, Cina selalu mendukung adanya solusi konflik secara politik dan sangat tidak menyetujui adanya sanksi dan penurunan rezim paksa karena dianggap menghambat proses solusi politik.

Penulis juga ingin melihat apakah Cina juga meningkatkan nama baiknya melalui pemberian kapabilitas militer di Suriah, serta apakah pemberian bantuan luar negeri merupakan upaya Cina untuk meningkatkan nama baiknya.

Yang ketiga pada kepentingan jangka menengah meliputi perpanjangan diri (*self extension*). Holsti menjelaskan bahwa perpanjangan diri berkaitan dengan ekspansi bagaimana suatu negara memenuhi kebutuhan strategis, ekonomi, politik, maupun sosialnya walaupun kebutuhan itu berada di luar wilayah negaranya melalui pengaruh ataupun kontrol. Dalam kasus ini, penulis ingin melihat adanya kontribusi veto Cina terkait pencarian jalur perdagangan yang baru yang melibatkan Suriah. Selain itu penulis juga ingin melihat bagaimana Cina mempengaruhi penyelesaian konflik Suriah melalui veto yang dilakukannya sebagai upaya perpanjangan diri di Timur Tengah mengacu pada studi terdahulu penulis dimana Cina ingin menghadirkan pengaruhnya di Timur Tengah.

Kepentingan jangka panjang menurut Holsti adalah kepentingan yang mempunyai nilai secara universal dimana didalamnya, suatu negara mempunyai peran tertentu yang berkaitan dengan visi, misi, atau impian suatu negara dalam sistem internasional. Holsti juga menjelaskan bahwa suatu negara yang memiliki power akan lebih mampu menciptakan suatu aturan baru dalam dunia internasional. Dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana Cina berusaha menciptakan *new world order* terkait sikap dan prinsip tertentu Cina yang ditunjukkan seiring dengan veto di dewan keamanan PBB dimana sikap ini memiliki perbedaan besar dengan prinsip yang selama ini didominasi nilai

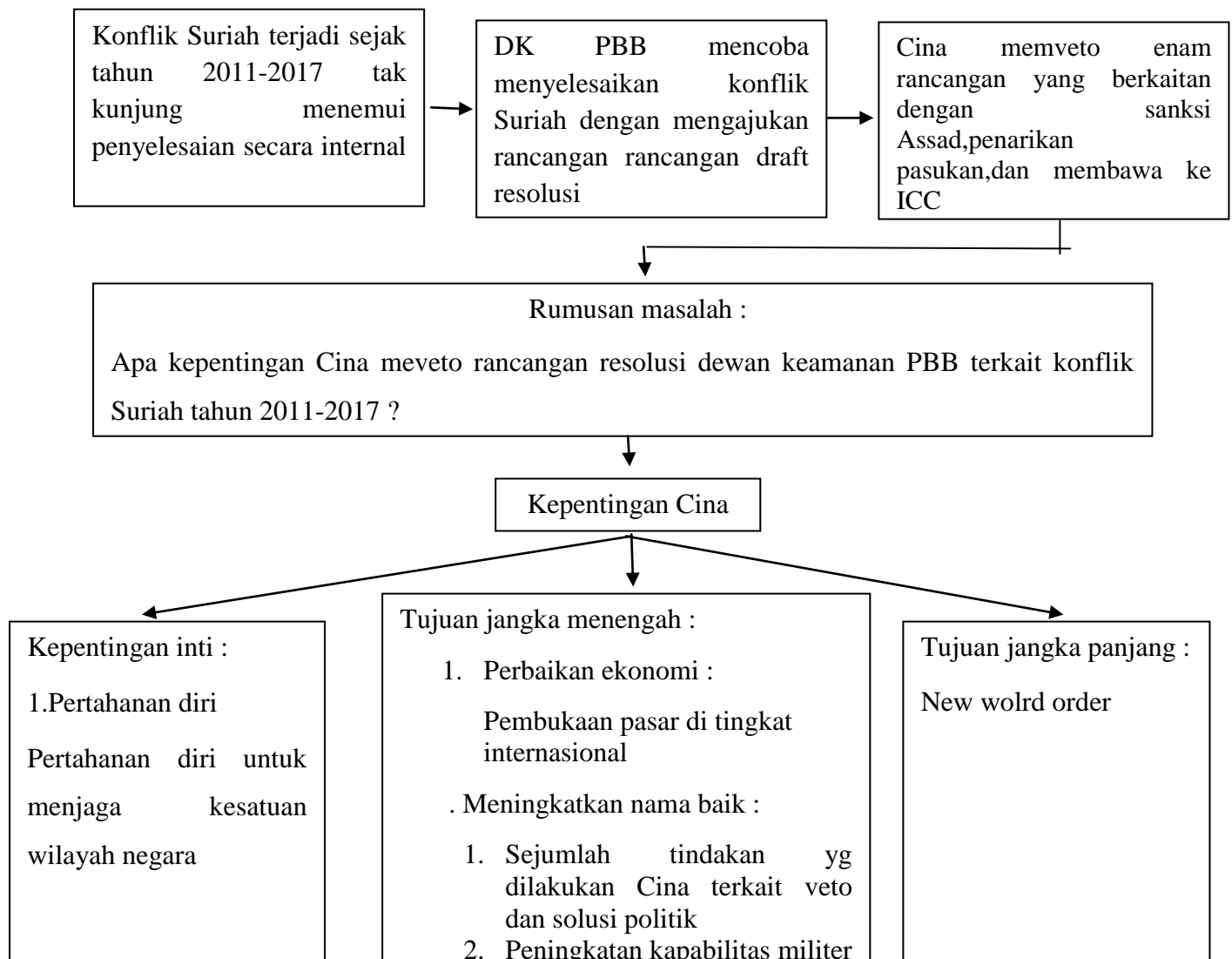
dari negara barat mengenai norma hak azasi manusia terutama intervensi kemanusiaan.

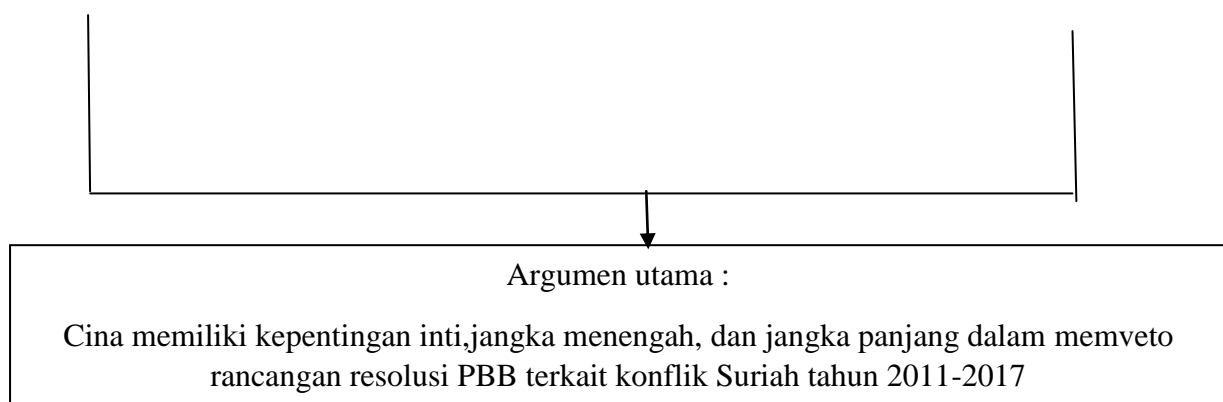
Periode Waktu	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Kepentingan inti(<i>core interest</i>)	Pertahanan diri(<i>self preservation</i>)	Pertahanan diri untuk menjaga kesatuan wilayah negara	Upaya Cina mencegah pemisahan wilayah negara yang dilakukan kelompok separatis
		Pertahanan diri untuk menjaga kesatuan etnis,agama,dan bahasa	Upaya Cina menjaga kesatuan etnis terkait gerakan separatisme dalam negeri
	Tuntutan perbaikan		

Tujuan jangka menengah	ekonomi(<i>economic betterment demand</i>)	Pembukaan pasar di tingkat internasional	Rencana investasi Cina di Suriah sebagai bagian rekonstruksi pasca konflik
	Meningkatkan nama baik (<i>increase state prestise</i>)	Tindakan diplomatik di tingkat internasional	Keterlibatan Cina dalam berbagai forum internasional terkait penyelesaian konflik Suriah
		Peningkatan kapabilitas militer	Adanya keterlibatan militer Cina selama berlangsungnya konflik Suriah
		Pemberian bantuan luar negeri	Adanya bantuan luar negeri yang diberikan Cina selama terjadinya konflik Suriah
	Perpanjangan diri(<i>self extention</i>)	Ekspansi non teritorial berupa jalur perdagangan	Adanya jalur perdagangan baru yang dibentuk Cina terkait konflik Suriah

		Kontrol eksklusif berupa pengaruh	Upaya Cina mempengaruhi jalannya penyelesaian konflik Suriah melalui vetonya
Tujuan jangka panjang	Visi, misi, dan impian sutau negara	New world order	Upaya Cina dalam membentuk peran baru di tingkat internasional terkait norma non intervensi

2.4 Alur Pemikiran





Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka penulis memiliki argumen utama dalam kasus Cina meveto rancangan resolusi dewan keamanan PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017 memiliki kepentingan jangka pendek(*core interest*),kepentingan jangka menengah(*middle range objective*), dan kepentingan jangka panjang(*long range goals*) sesuai dengan katagori kepentingan dari konsep kepentingan nasional oleh KJ Holsti. Adapun kepentingan itu adalah sebagai berikut , kepentingan jangka pendek yaitu untuk melakukan pertahanan diri dalam menjaga wilayah kesatuan negara, kepentingan jangka menengah yaitu untuk mmenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri melalui kerjasama perdagangan dan investasi,meningkatkan nama baik terkait upaya Cina dalam melakukan solusi politik,dan upaya Cina melakukan

perpanjangan diri dengan mencari jalur perdagangan baru, dan upaya melakukan kontrol dalam penyelesaian konflik Suriah. Kepentingan jangka panjang yaitu untuk menciptakan satu norma atau pandangan baru di tingkat internasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian⁴⁴. Penelitian deskriptif dimana suatu eksplanasi dipahami untuk menjawab tipe pertanyaan “apa”⁴⁵. penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan memahami Apa kepentingan Cina mevetto rancangan resolusi PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, 2010 , Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik. Edisi revisi. Jakarta : rineka cipta , hal 3

⁴⁵ Mohtar masoed , 1990 , “ilmu hubungan internasional disiplin dan penelitian” , yogyakarta : LP3ES hal 68

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul kepentingan Cina me veto rancangan resolusi PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017, peneliti memfokuskan tahun penelitian selama tiga tahun sejak tahun 2011 hingga 2017 karena selama tahun tersebutlah Cina melakukan veto rancangan resolusi dewan keamanan PBB. Penulis juga menjabarkan apa saja yang menjadi kepentingan Cina berdasarkan indikator yang terdapat pada konsep yang digunakan penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau telaah pustakan yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian, dan melakukan analisa terhadapnya. Literatur tersebut dapat berupa dokumen, jurnal, buku, website, surat kabar, termasuk laporan laporan yang terkait pada masalah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan data hasil olahan yang ditemukan dari berbagai macam sumber.⁴⁶

3.4 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ilmiah ini menggunakan data kualitatif, dimana data data yang diperoleh dihasilkan dalam data deskriptif mengenai kata

⁴⁶ John W. Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Sage publications, 2013, hal 240.

kata tertulis⁴⁷, yang mana data tersebut didapat melalui literatur kepustakaan dengan mengkaji fenomena yang dijadikan masalah dalam objek penelitian ilmiah ini. Setelah itu penulis akan melakukan kegiatan eksplorasi, yaitu mencoba mengkorelasikan antara konsep dengan kondisi fenomena yang dianalisis. Melalui hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan apakah konsep yang dipakai mampu menawarkan dan menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ilmiah ini.

3.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah atau permasalahan yang akan diteliti, serta tujuan dan manfaat dari penelitian

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dipaparkan dua studi terdahulu yang digunakan, kerangka konseptual yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, operasionalisasi konsep dari konsep yang digunakan, alur pemikiran mengenai penelitian dari awal hingga argumen utama, dan argumen utama mengenai argumen sementara peneliti terhadap hasil penelitian.

⁴⁷ Suyanto Bagong, 2006, "*Metode penelitian sosial : berbagai alternatif pendekatan*", Jakarta, kencana, hal 166

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripsif, teknik pengumpulan data secara literatur, teknik analisis data kualitatif, dan juga sistematika penulisan

BAB IV : Gambaran Umum

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran mengenai kronologi konflik Suriah sejarah bergabungnya Cina di dewan keamanan PBB, dinamika hubungan bilateral Cina dan Suriah, draft rancangan resolusi dewan keamanan PBB yang di veto oleh Cina beserta implikasinya, dan juga.

BAB V : Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan Apa kepentingan Cina me veto rancangan resolusi PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017 berdasarkan dari kerangka konsep yang digunakan.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, penulis akan memberikan lima gambaran umum yang memiliki relevansi dengan kasus yang penulis angkat. Yang pertama adalah gambaran mengenai kronologi konflik Suriah sejak tahun 2011 hingga 2017, lalu gambaran mengenai sikap sejarah dan sikap Cina pada dewan keamanan PBB sejak tahun 1971 hingga 2009, kemudian dinamika hubungan Cina dan Suriah, rancangan resolusi yang di veto Cina juga implikasi vetonya

4.1. Kronologi konflik Suriah

Konflik sipil Suriah dipicu oleh sebuah peristiwa yang melanda negara negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal dengan gelombang *Arab*

Spring. Pada bulan Desember tahun 2010, seorang pemuda di Tunisia membakar dirinya sendiri sebagai ungkapan rasa frustrasi. pemuda ini adalah seorang pedagang buah yang ingin meningkatkan usahanya tetapi karena tidak mampu membayar uang sewa maka kendaraannya disita oleh pihak pemerintah. Beberapa minggu kemudian, pemuda ini meninggal dikarenakan luka bakar yang sangat parah. Berita kematian pemuda ini kemudian menyulut kemarahan rakyat untuk melakukan unjuk rasa atas tuntutan keadilan, dan keadaan ekonomi yang dirasakan semakin berat oleh rakyat. Tak perlu waktu lama, gelombang demonstrasi di Tunisia berkembang semakin besar dan menuntut presiden saat itu, Ben Ali untuk turun. Satu bulan kemudian presiden Ben Ali yang telah berkuasa 23 tahun resmi mengundurkan diri dan rakyat Tunisia menyelenggarakan pemilu. Uniknya, gelombang ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahnya ini menyebar di negara negara Timur Tengah dan Afrika Utara lainnya, yang kemudian dikenal sebagai gelombang *Arab Spring*. Negara negara yang terkena dampak gelombang arab spring adalah Mesir, Yaman, Libya, dan Suriah⁴⁸.

Arab spring di Suriah berawal dari lima belas siswa sekolah di kota Deera yang membuat coretan di dinding sekolahnya mengenai slogan revolusi yang selama ini ramai diberitakan di televisi telah terjadi di Tunisia, Mesir, Yaman, dan Libya. Coretan itu berbunyi “rakyat ingin menumbangkan rezim”. Tindakan para siswa tersebut membuat Bashar Al Assad marah dan menangkap mereka. Kemudian terdengar kabar bahwa pihak keamanan dan pemerintah melakukan penyiksaan kepada mereka. Rakyat yang mendengar berita ini merasa marah dan

⁴⁸ Rodgers Lucy, 2016, “syria : the story of the conflict”, bbc news diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868> pada 24 nov 2016

kemudian melakukan aksi demonstrasi menuntut pembebasan para siswa tersebut. Dari sinilah kemudian memicu munculnya gelombang demonstrasi di kota kota lain seperti Aleppo dan Damaskus untuk menuntut turunnya rezim Assad⁴⁹.

Pada bulan maret tahun 2011, gelombang protes hanya terjadi di kota Deera, tetapi dalam tiga bulan kemudian di bulan Juli 2011, gelombang demonstrasi nasional mulai terbentuk memprotes tindakan Assad dan menuntutnya untuk turun. Disaat ini, presiden Assad mulai menggunakan kekuatan militernya untuk menyerang para demonstan. Pihak demonstan kemudian berubah menjadi pihak oposisi yang melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata untuk mengusir pasukan Assad dari wilayah mereka. Sejak saat itu, tindakan kekerasan mulai meningkat dan berubah menjadi perang atau konflik sipil dikarenakan kelompok pemberontak atau oposisi membentuk suatu militan tersendiri untuk melwan pemerintah yang menguasai kota kota, sampai ahirnya peperangan mencapai ibukota Suriah Aleppo dan kota terbesar di Suriah Damaskus pada tahun 2012. Di bulan juni 2013, PBB mengumumkan lebih dari 90.000 orang telah terbunuh dalam konflik tersebut, dan pada tahun 2015 meningkat pesat menjadi 250.000 korban jiwa. Konflik yang awalnya hanya melibatkan pemerintahan Assad dan pihak oposisi, kini semakin meluas dengan adanya peperangan yang melibatkan kelompok Islam Sunni dan Islam Syiah, dan juga di per kompleks dengan hadirnya kelompok kelompok jihad atau teroris yang juga ingin menguasai negara Suriah seperti ISIS⁵⁰.

⁴⁹ ibid

⁵⁰ Rodgers lucy,2016,"syria : the story of the conflict", bbc news diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868> pada 24 nov 2016

Jika ditarik lebih jauh, kejadian ditangkapnya 15 siswa sekolah oleh rezim Assad hanyalah pemicu konflik, tetapi penyebab konflik bersenjata di Suriah sesungguhnya disebabkan oleh hal yang lebih kompleks yang telah terpendam selama bertahun-tahun yaitu kurangnya kebebasan dan menurunnya kesejahteraan ekonomi. Rezim Assad yang memerintah lebih dari dua puluh tahun dinilai otoriter, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran. Banyak gerakan islamis yang lain juga menentang peraturan Assad. Konflik yang terjadi sebenarnya bukan konflik sektarian, tetapi sejak demonstrasi berubah menjadi konflik bersenjata, beberapa sekte dalam negara Suriah terpecah suaranya. Kelompok agama minoritas di Suriah justru cenderung mendukung pemerintahan Assad. Sedangkan kelompok oposisi justru berasal dari kelompok agama mayoritas yaitu Islam Sunni. Pasukan keamanan rezim Assad sendiri berasal dari sekte Alawi⁵¹. Sejak tahun 2007, Suriah dilanda kekeringan yang cukup parah, hal ini menyebabkan gagal panen dan kesejahteraan rakyat menurun, sementara Assad dianggap tidak mampu memperbaiki hal ini. Reformasi ekonomi Assad yang bernaftaskan neoliberal dianggap tidak mampu memberikan kemajuan pembangunan dan pendapatan. Assad mampu menarik investor ke negaranya dari 17% ke 23% dari gdp di tahun 2007, tetapi investasi di bidang pertanian menurun sebanyak 7% sejak tahun 2000 hingga 2007, begitu juga pada beberapa sektor industri. Tingkat kemiskinan secara keseluruhan adalah 34% tetapi di daerah pedesaan terdapat ketimpangan yaitu sebesar 62%. Upah buruh rata-rata juga tidak sebanding dengan jumlah rata-rata pengeluaran dimana rata-rata upah sebesar 274

⁵¹ Anonymous, 2017, "syria's civil war explained the beginning", al jazeera diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html> pada 25 nov 2017

USD sedangkan pengeluaran mencapai 295 USD. Faktor ini didukung datangnya musim kemarau panjang yang meningkatkan kemiskinan bagi kalangan petani. Masalah ekonomi di negara ini dilengkapi dengan isu lainnya seperti korupsi, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan isu mengenai perlakuan rezim Assad yang megistimewakan kalangan minoritaas Alawi⁵².

Adanya kelompok terorisme seperti ISIS juga telah dinyatakan PBB turut melakukan teror, melakukan pembunuhan massal baik kepada pihak oposisi maupun pemerintah, juga melakukan eksekusi kepada pasukan keamanan dan masyarakat dari agama minoritas,serta warga negara asing⁵³.

Konflik sipil ini juga berdampak pada munculnya gelombang pengungsi. Sejak tahun 2011 hingga 2016, sebanyak 4,5 juta orang telah meninggalkan Suriah untuk mencari keamanan ke negara sekitarnya seperti Turki dan Lebanon maupun ke negara negara Eropa. Pihak pihak yang berkonflik telah menambah masalah dengan menolak akses agen kemanusiaan kepada warga sipil yang membutuhkan⁵⁴.

Konflik ini diperparah dengan adanya gerakan pemberontakan jihadis yang jumlahnya semakin bertambah hingga melebihi pihak moderat sekuler. ISIS memanfaatkan situasi ini untuk mendirikan negara Islam bernuansa khilafah di Irak dan Suriah. Hal ini mendorong keterlibatan pihak internasional. Seperti di tahun 2014, Amerika melancarkan serangan udara sebagai upaya untuk memberantas ISIS, begitu juga Rusia. Dari sisi politik, kelompok oposisi di Suriah

⁵² Berzin janis,2013,"civil war in syria:origins,dynamics,and possible solutions", strategic review no 07 : national defence academy of latvia center for security and strategic reseacrh hal 2-3

⁵³ Ibid hal 4

⁵⁴ Ibid hal 6

juga sebenarnya terbagi untuk mendapatkan aliansi dan supremasi, tetapi kelompok yang dominan adalah *National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces*. Hal hal inilah yang membuat konflik di Suriah menjadi semakin kompleks⁵⁵.

Kuatnya kedua belah pihak yaitu pemerintah dan oposisi, dalam melakukan perlawanan satu sama lain membuat banyak pihak menganggap hanya solusi politik yang akan mampu mengakhiri konflik Suriah. Dewan keamanan PBB telah mengupayakan pelaksanaan Jeneva Communique sejak tahun 2012 sebagai upaya pelaksanaan transisi solusi politik akan kekuatan eksekutif yang akan dibentuk atas dasar kesepakatan bersama.

4.2 Keanggotaan Cina dalam Dewan Keamanan PBB

Pada tanggal 29 oktober tahun 1971, majelis umum PBB mengeluarkan resolusi 2758 yang menjelaskan mengenai peralihan pemegang kursi dewan keamanan PBB dari Taiwan ke Cina. Saat itu menandai Cina resmi menjadi anggota tetap dewan keamanan PBB⁵⁶.

Sikap sikap Cina dibagi dalam beberapa gambaran tahun, yang menunjukkan periode perubahan perubahan sikap Cina dalam DK PBB. Periode yang pertama yaitu tahun 1971-1979. Pada periode ini sikap Cina digambarkan mempunyai tiga karakter. Yang pertama adalah praktek untuk tidak memberikan voting pada resolusi mengenai kesangsian ideologis, terutama mengenai pembentukan atau perluasan PKO(*Peace Keeping Operation*). Contohnya misi

⁵⁵ Ibid hal 6

⁵⁶ Joel Wuthnow. *Chinese Diplomacy and the UN Security Council: Beyond Veto*. Politics in Asia Series. Routledge. 2013. Hal: 13-14.

untuk memantau gencatan senjata Israel dan Mesir maupun Suriah dan Lebanon. Tindakan abstain atau tidak berpartisipasi adalah satu bentuk tindakan Cina akan ketidak setujuannya terhadap PKO karena dianggap sebagai instrumen yang melewati kuasa atau kedaulatan negara terutama negara negara dunia ketiga. Yang kedua adalah dukungan Cina kepada *Non Aligned Movement*(NAM) yaitu sebuah gerakan untuk merubah perpolitikan di dua negara Rhodesia Selatan atau Zimbabwe dan Afrika Selatan, rancangan resolusi ini sebenarnya adalah suatu kritikan terhadap negara negara barat atas dukungannya terhadap rezim yang rasis dan illegal. Yang ketiga adalah sikap Cina sebagai negara yang paling sedikit menggunakan hak veto selama periode 1971-1979 yaitu hanya sebanyak dua kali⁵⁷.

Tabel 1 Voting negara P5 tahun 1971-1979

<i>Votes N=195</i>	<i>USA</i>	<i>Soviet Union</i>	<i>China</i>	<i>France</i>	<i>UK</i>
Affirmative Rate	149 76.4%	166 85.1%	130 66.7%	172 88.2%	163 83.6%
Abstention or non-participation Rate	28 14.4%	22 11.3%	63 32.3%	16 8.2%	20 10%
Veto Rate	18 9.2%	7 3.6%	2 1%	7 3.6%	12 6.1%

Sumber : *Official Document System (ODS) of the UN and the UN Bibliographic Information System UNBISnet*⁵⁸

Berdasarkan tabel tersebut, Cina pada periode tahun 1971-1979 mendukung sebanyak 130 dari 195 resolusi, abstain pada 63 resolusi, dan

⁵⁷ Ibid hal 15

⁵⁸ Ibid hal 16

menggunakan veto pada 2 resolusi. Jika dibandingkan negara P5 yang lain, maka Cina menjadi negara yang paling sedikit memberikan suara mendukung resolusi dan sebaliknya mempunyai tingkat abstain tertinggi. Tabel ini mengindikasikan sikap Cina yang belum terlalu aktif di periode 1971-1979.

Pada periode yang ke dua yaitu tahun 1980- 1989, Cina bersikap lebih lunak dan mengurangi sikap oposisi terhadap negara negara barat yang juga dicirikan dalam tiga hal. Yang pertama dukungan Cina terhadap perpanjangan mandat UNFICYP pada bulan desember 1981, Cina tidak lagi abstain dalam memberikan suaranya untuk operasi PKO, dan justru mendukung draft yang terkait akan hal pemeliharaan perdamaian. Di era ini juga partisipasi voting Cina naik 17% dibanding periode sebelumnya, begitu juga tingkat abstain Cina menurun dari 32% menjadi 6,2% di era ini. Yang kedua, Cina mengurangi penggunaan posisinya di dewan keamanan untuk ber oposisi terhadap negara negara hegemon yang menjadi kekuatan dunia. Contohnya, di bulan Januari 1980, Cina tidak memberikan suaranya untuk mendukung resolusi yang diajukan Amerika untuk memberikan sanksi kepada Iran. Dalam sebuah kesempatan untuk berkomentar, Cina tidak melakukan konfrontasi ataupun memberikan kata kata negatif kepada Amerika. Juga sejak tahun 1981-1988 telah dikeluarkan sebanyak 14 resolusi mengenai pemerintahan di Afrika sama seperti periode sebelumnya dan Cina tetap memberikan dukungan, tetapi di periode ini sikap Cina kembali melunak dengan hanya memberikan satu kali pernyataan damai tanpa mengkritik negara negara barat. Yang ketiga pada periode ini, Cina sama sekali tidak

menggunakan hak vetonya. Pada periode ini, Cina menjadi satu satunya negara yang tidak menggunakan hak veto sama sekali hingga tahun 1997⁵⁹

Tabel 2 Voting negara P5 tahun 1980-1989

<i>Votes N=209</i>	<i>USA</i>	<i>Soviet Union</i>	<i>China</i>	<i>France</i>	<i>UK</i>
Affirmative Rate	162 77.5%	192 91.9%	196 93.8%	200 95.7%	189 90.4%
Abstention or non-participation Rate	27 12.9%	15 7.2%	13 6.2%	5 2%	14 6.7%
Veto Rate	20 9.6%	2 .5%	0 0%	4 1.9%	6 2.9%

Sumber : *Official Document System (ODS) of the UN and the UN Bibliographic Information System UNBISnet*⁶⁰

Berdasarkan tabel tersebut, Cina pada periode tahun 1980-1989 mendukung sebanyak 196 dari 209 resolusi, abstain pada 13 resolusi, dan tidak menggunakan hak veto sama sekali. Tabel ini menunjukkan meningkatnya persentase partisipasi dukungan Cina dari 66,7% di periode sebelumnya menjadi 93,8% pada periode ini. Juga berkurangnya tingkat abstain Cina yang sebelumnya mencapai 30% menjadi 6,2%. Tabel ini mengindikasikan mulai aktifnya Cina berpartisipasi di dewan keamanan PBB.

Pada periode ke tiga yaitu tahun 1990- 1999, komitmen Cina mengenai prinsipnya dalam menghormati kedaulatan negara menghadapi babak baru di tingkat dewan keamanan PBB. Pasca perang dingin, Cina lebih banyak melakukan

⁵⁹ Ibid hal 19

⁶⁰ Ibid hal 19

abstain sebagai suatu sikap yang ingin ditunjukkan ketika memiliki perbedaan yang tidak sesuai dengan prinsip politik dan ideologinya. pada periode ini Cina melakukan abstain sebanyak 42 kali, ini menjadi jumlah terbanyak dibanding negara negara P5 lainnya. Pada periode ini, Cina dihadapkan dengan tiga isu utama yaitu *peacekeeping*, penggunaan tekanan, dan sanksi⁶¹.

Pada isu *peacekeeping*, Cina menghadapi perubahan mengenai konteks operasi *peacekeeping* di era pasca perang dingin. Walaupun Cina mulai mendukung *peacekeeping* sejak tahun 1980, tetapi di periode ini operasi *peacekeeping* mengalami perluasan. PKO tidak lagi ber operasi di wilayah perbatasan negara, tetapi juga ingin mengatasi penyebab konflik yang terdalam seperti mencampuri keputusan ekonomi, sosial, politik, dan juga hal hal tersebut akan diikuti dengan turunnya pasukan bersenjata. Di masa ini, Cina sebenarnya ber keberatan dengan operasi perluasan PKO karena dikhawatirkan akan melanggar batas teritorial negara, tetapi Cina tidak terang terang menunjukkan penolakan dengan melakukan veto karena tidak ingin berkonfrontasi dengan negara negara barat terutama Amerika⁶². Walaupun demikian, pada periode ini Cina tetap menggunakan hak vetonya di saat PKO akan menjalankan mandat terkait teritori negaranya yaitu Taiwan. Di tahun 1997 Cina melakukan veto pada rancangan resolusi untuk mengerahkan pengamat militer yang memantau gencatan senjata di Guatemala karena Guatemala melakukan pengakuan kedaulatan terhadap Taiwan⁶³.

⁶¹ Ibid hal 21

⁶² Ibid hal 21

⁶³ Ibid hal 22

Pada isu penggunaan tekanan(*the use of force*), Cina mengemukakan kekhawatirannya mengenai otoritas PBB dalam melakukan penggunaan tekanan. Menurut Cina intervensi militer akan dapat membahayakan norma kedaulatan negara. Pemerintah Cina sebenarnya khawatir jika melemahnya norma kedaulatan ini akan menciptakan dalih pengaruh eksternal yang tidak diinginkan ke dalam bagian wilayahnya seperti Xijiang dan Taiwan. Di periode ini Cina berpendapat bahwa kemungkinan negara negara yang lebih kuat seperti Amerika bisa saja menggunakan intervensi untuk melemahkan Cina. Tetapi Cina tetap tidak menggunakan hak vetonya sebagai ungkapan penolakan terhadap intervensi dikarenakan ingin membangun hubungan yang lebih positif dengan Amerika⁶⁴. Pada beberapa kasus, Cina justru mendukung resolusi mengenai penggunaan tekanan. Misalnya saja di tahun 1992 disaat Cina menyetujui resolusi 974 mengenai *US-led Unified Task Force* yang akan beroperasi di Somalia⁶⁵.

Pada isu penggunaan sanksi, Cina menentang adanya ancaman atau penggunaan sanksi dengan alasan bahwa sanksi dianggap sebagai hal yang kontraproduktif. Selama periode tahun 1990, dewan keamanan membuat rancangan sanksi sanksi yang lebih berat pada beberapa negara. Seperti pada isu PKO, Cina menentang penggunaan sanksi tetapi sangat jarang menyatakan ketidaksetujuannya dengan cara memberikan veto pada rancangan resolusi⁶⁶.

Tabel 3 Voting negara P5 tahun 1990-1999

⁶⁴ Ibid hal 23

⁶⁵ Ibid hal 24

⁶⁶ Ibid hal 25

<i>Votes N=642</i>	<i>USA</i>	<i>USSR/Russia</i>	<i>China</i>	<i>France</i>	<i>UK</i>
Affirmative Rate	635 98.9%	619 96.4%	598 93.1%	640 99.7%	642 100%
Abstention Rate	2 0.3%	20 3.1%	42 6.5%	2 0.3%	0 0%
Veto Rate	5 0.8%	3 0.5%	2 0.3%	0 0%	0 0%

Berdasarkan tabel tersebut, Cina pada periode tahun 1990-1999 Cina mendukung sebanyak 598 resolusi, abstain pada 42 resolusi, dan menggunakan hak veto sebanyak dua kali. Tabel ini menunjukkan masih tingginya partisipasi Cina dalam mendukung rancangan resolusi. Tetapi sikap abstain Cina ternyata dinamis karena di periode ini Cina kembali menjadi negara P5 dengan abstain tertinggi. Jika dilihat keseluruhan, Cina masih menjadi negara yang paling sedikit memberikan suara dibanding negara P5 yang lain pada periode ini.

Yang terakhir adalah periode abad 21 atau sejak tahun 2000 hingga 2009. Pada periode ini, sikap Cina kembali mengalami perubahan. Tingkat abstain Cina mulai berkurang, dan juga Cina melakukan peningkatan kontribusi pada kegiatan PKO. Cina juga lebih aktif dalam negosiasi mengenai beberapa rezim. Alasannya karena kepentingannya mulai berkembang dan sudah tidak seperti periode sebelumnya dimana Cina dapat menagguhkan kekuatan ke negara barat terutama Amerika⁶⁷. Pada periode ini karakter Cina dibagi menjadi tiga isu yaitu sikap voting Cina, kontribusi Cina terhadap PKO, dan yang ketiga perselisihan Cina dengan negara negara lain.

⁶⁷ Ibid hal 28

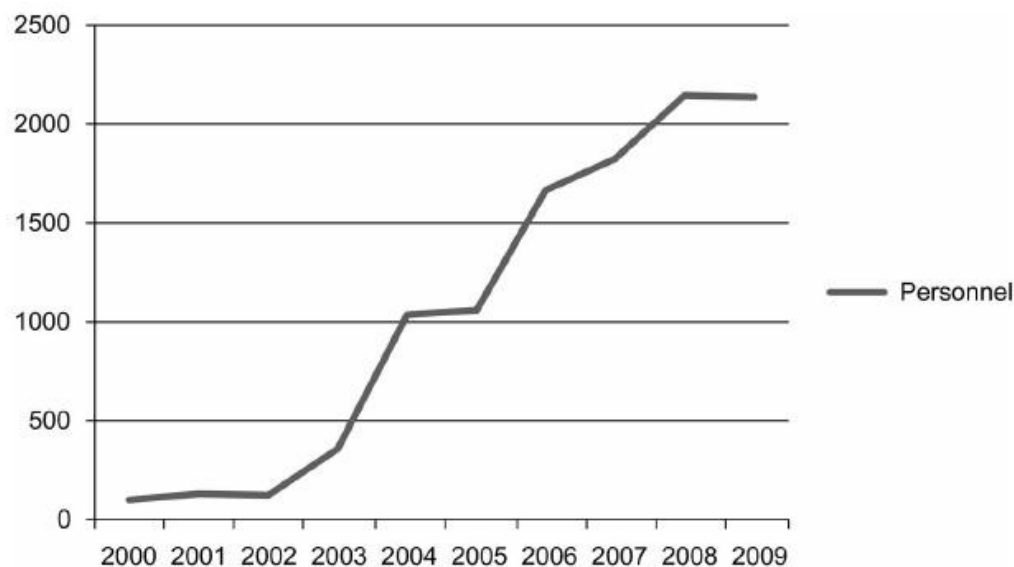
Terkait sikap voting Cina di dewan keamanan PBB, sejak tahun 2000 Cina menyetujui 97,8% resolusi abstain pada 12 resolusi dan dua kali menggunakan hak veto, persentase ini meningkat dibanding periode sebelumnya di tahun 1990an. Jika di tahun sebelumnya terdapat perbedaan yang tinggi antara voting Cina dan Amerika, maka pada periode ini kedua negara terlihat sama sama aktif. Cina juga mulai mengurangi pidato retorisnya. Di tahun 1990an Cina banyak menyatakan keberatannya pada resolusi resolusi terkait sanksi dan PKO dimana Cina mempunyai posisi kontra, tetapi pada periode ini, Cina tidak lagi melakukan hal tersebut⁶⁸.

Mengenai kontribusi Cina terhadap PKO, Cina mulai meningkatkan pengiriman pasukan perdamaian untuk PKO. Cina mulai aktif berkontribusi di tahun 1990an dengan mengirimkan kurang dari 100 pasukan. Tetapi jumlahnya meningkat pesat di tahun 2011 hingga sejumlah 1924 personel. Di tahun yang sama, Cina berkontribusi pada 11 dari 18 misi PKO, membentang mulai dari Haiti, Lebanon, hingga Sudan Selatan. Cina sekaligus menjadi kontributor tertinggi pengirim pasukan PKO diantara negara P5⁶⁹.

Tabel 4 Jumlah PKO yang dikirimkan Cina sejak awal tahun 2000

⁶⁸ Ibid hal 29

⁶⁹ Ibid hal 31



Sumber : *UN Department of Peacekeeping, www.un.org/en/peacekeeping/contributors/*⁷⁰

Tabel tersebut menggambarkan jumlah personel PKO yang dikirimkan Cina kepada PBB mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2000 hingga 2009. Hal ini mengindikasikan semakin aktifnya Cina dalam operasi PKO dengan tindakan nyata pengiriman pasukan.

Tabel 5 Voting negara P5 tahun 2000-2009

<i>Votes N=636</i>	<i>USA</i>	<i>Russia</i>	<i>China</i>	<i>France</i>	<i>UK</i>
Affirmative Rate	619 97.3%	622 97.8%	622 97.8%	632 99.4%	628 98.7%
Abstention Rate	8 1.3%	10 1.57%	12 1.9%	4 0.63%	8 1.26%
Veto Rate	9 1.4%	4 0.63%	2 0.3%	0 0%	0 0%

Sumber : *Official Document System (ODS) of the UN and the UN Bibliographic Information System UNBISnet*⁷¹

⁷⁰ Ibid hal 32

Berdasarkan tabel tersebut, Cina pada periode tahun 2000-2009 Cina mendukung sebanyak 622 resolusi dengan persentase lebih dari 97%, persentase ini sekaligus menjadi yang tertinggi bagi Cina dibanding periode sebelumnya. Tingkat abstains Cina juga kembali menurun dibanding periode sebelumnya dari 42 kali abstain menjadi 12 kali abstain. Menunjukkan semakin tingginya partisipasi Cina, juga dengan 2 kali veto. Periode ini mengindikasikan partisipasi Cina mulai kembali aktifnya Cina di era tahun 2000.

Dari periodisasi sikap Cina dalam dewan keamanan PBB tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sikap Cina dalam dewan keamanan adalah dinamis. Di awal bergabungnya, Cina melakukan banyak abstain sebagai sikap tidak setuju dengan adanya PKO. Tetapi pada periode selanjutnya, Cina mulai menyetujui adanya PKO. Di periode ketiga, Cina kembali menyuarakan ketidak setujuannya dengan perluasan PKO di masa pasca perang dingin. Sementara di periode terakhir, Cina malah menjadi penyumbang personel yang cukup besar dalam operasi PKO. Penulis juga melihat sikap Cina dalam dewan keamanan berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, Cina seringkali mempertimbangkan hubungannya dengan negara negara barat terutama Amerika, sehingga sikap abstain Cina terkadang ditunjukkan karena Cina ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika. Yang kedua, walaupun demikian, Cina akan tetap melakukan voting yang bertentangan dengan sikap negara negara barat apabila rancangan resolusi yang dibahas berkaitan dengan kepentingan nasionalnya terutama dalam hal menjaga kedaulatan wilayah yang berkenaan dengan Taiwan maupun pemberontakan di

⁷¹ Ibid hal 29

Xinjiang. Yang ketiga, Cina sebenarnya sejak awal tidak setuju dengan adanya penggunaan tekanan baik sanksi maupun militer dikarenakan hal itu dianggap sebagai hal yang dapat melemahkan kedaulatan negara.

4.3 Veto Cina Pada Rancangan Resolusi PBB Terkait Konflik Suriah

- Draft resolusi pada pertemuan tanggal 11 Oktober 2011

Draft resolusi pertama yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 11 oktober 2011. Rancangan resolusi ini diajukan oleh Perancis, Jerman, Portugal dan Inggris.

Darft ini membahas mengenai pernyataan keprihatinan situasi yang terjadi di Suriah., meminta pemerintah Suriah untuk segera menghentikan serangan kekerasan, meminta penyelidikan independen atas semua pelanggaran hak asasi manusia selama demonstrasi yang baru saja terjadi, dan menekankan perlunya diadakan upaya mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Membahas adanya pengiriman komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran undang undang hak asasi manusia internasional sejak maret 2011. Mengingatkan tanggung jawab utama pemerintah Suriah untuk melindungi rakyatnya dan mengizinkan akses berkelanjutan untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Menekankan bahwa satu satunya solusi terhadap krisis saat ini di Suriah adalah melalui proses politik yang inklusif. Menegaskan kembali komitmen pemerintah Suriah yang kuat terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial dan kesatuan nasional Suriah dan Menyambut konsolidasi sekertaris jenderal dan liga negara Arab, dan semua

upaya diplomatik lainnya untuk menangani situasi tersebut⁷². Dalam draft ini terdapat 12 poin yaitu :

1. Menyalahkan adanya pertumpahan darah dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil oleh pihak berwenang Suriah, dan mengungkapkan penyesalan mendalam atas kematian ribuan orang termasuk perempuan dan anak-anak;
2. Menuntut segera mengakhiri semua kekerasan dan mendesak semua pihak untuk menolak kekerasan dan ekstremisme.
3. Mengingat bahwa mereka yang bertanggung jawab atas semua kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia harus dimintai pertanggungjawaban;
4. Meminta agar pihak berwenang Suriah segera:
 - a) menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional yang berlaku, dan bekerja sama sepenuhnya dengan komisioner hak asasi manusia;
 - (b) memungkinkan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sepenuhnya oleh seluruh penduduknya, termasuk hak kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai, membebaskan semua tahanan politik dan menahan demonstran yang melakukan aksi damai, dan mencabut pembatasan terhadap semua bentuk media;
 - (c) menghentikan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil;
 - (d) meringankan situasi kemanusiaan di daerah krisis, termasuk dengan memungkinkan akses cepat, tanpa hambatan dan berkelanjutan untuk pemantau

⁷² Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2011/612 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/612 pada 16 1 november 2017

hak asasi manusia yang diakui secara internasional, lembaga kemanusiaan dan pekerja, dan memulihkan layanan dasar termasuk akses ke rumah sakit;

(e) menjamin pemulangan yang aman mandiri pada masyarakat yang telah melarikan diri dari kekerasan menuju rumah mereka;

5. Panggilan untuk proses politik yang dipimpin oleh orang-orang Suriah yang dilaksanakan di lingkungan yang bebas dari kekerasan, ketakutan, intimidasi, dan ekstremisme, dan ditujukan untuk secara efektif menangani aspirasi dan perhatian yang sah dari populasi Suriah, dan mendorong oposisi Suriah dan semua bagian masyarakat Suriah untuk berkontribusi pada proses itu.

6. Meminta Sekretaris Jenderal untuk terus mendesak Pemerintah Suriah untuk menerapkan paragraf 2 dan 4 di atas, termasuk dengan menunjuk pada saat yang tepat utusan khusus yang berkonsultasi dengan dewan keamanan, dan mendorong semua negara dan organisasi regional untuk berkontribusi dalam hal ini.

7. Mendorong dalam liga negara-negara Arab untuk melanjutkan usaha yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan proses politik yang dipimpin oleh orang-orang Suriah yang inklusif.

8. Menyalahkan serangan terhadap personil diplomatik dan mengingatkan kembali prinsip tidak bisa diganggu gugatnya agen diplomatik dan kewajiban negara tuan rumah, termasuk konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi tempat kedutaan dan mencegah serangan terhadap agen diplomatik.

9 Memanggil semua negara untuk melakukan kewaspadaan dan menahan diri atas pasokan, penjualan atau pengiriman senjata langsung dari dan ke Suriah dan materi terkait semua jenis, serta pelatihan teknis, sumber daya keuangan atau layanan, saran, atau layanan atau bantuan lainnya yang terkait untuk senjata dan materi terkait.

10. Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan pelaksanaan resolusi ini dalam waktu 30 hari setelah diadopsi dan setiap 30 hari setelahnya.

11. Menyatakan maksud untuk meninjau ulang implementasi resolusi resolusi Suriah dalam 30 hari dan mempertimbangkan pilihannya, termasuk tindakan berdasarkan Pasal 41 piagam PBB.

12. Mempertimbangkan untuk tetap terlibat secara aktif dalam masalah ini.

Dalam pernyataannya terkait resolusi ini, Cina sangat prihatin akan perkembangan yang terjadi di Suriah. Cina juga ingin memanggil semua pihak untuk menghindari pertumpahan darah. Cina berharap bahwa pemerintah menghormati proses dialog dan dewan keamanan harus menghargai kedaulatan pemerintahan dan wilayah Suriah. Cina juga menyatakan Tindakan apa pun yang akan diambil harus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas, mematuhi prinsip PBB dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri. Cina menegaskan akan konsisten dan tegas pada prinsip ini. Cina juga menghormati prinsip prinsip tersebut dan mendorong dialog untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Karena sanksi dapat memperburuk situasi. Cina menganggap rancangan yang diberikan pada hari ini tidak memperbaiki keadaan. Cina akan terus mendukung

penyelesaian damai konflik dan kegiatan mediasi dengan melibatkan negara negara yang relevan⁷³.

Dari pernyataan tersebut Cina tidak menyetujui poin resolusi yang membahas hal hal yang dianggap tidak menghormati kedaulatan pemerintah Suriah, atau adanya intervensi dewan kemanan dan menegaskan akan konsisten dengan prinsip ini, dan juga adanya sanksi. Ketidaksetujuan Cina terdapat pada poin 4 yang membahas agar pemerintah Suriah megakhiri serangannya dan juga pada poin 11 mengenai sanksi non militer.

➤ Draft resolusi pada pertemuan tanggal 4 Februari 2012

Draft resolusi kedua yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 4 Februari 2012. Rancangan resolusi ini diajukan oleh Maroko, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Portugal, Kolombia, Togo, Libya, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Tunisia, Oman dan Turki. Darft ini membahas mengenai pernyataan keprihatinan akan kemunduran situasi yang terjadi di Suriah. Juga membahas mengenai implementasi misi negara negara Liga Arab pada tanggal 2 November 2011 yang mengajukan resolusi untuk menuntut Suriah agar segera menghentikan kekerasan dan melindungi penduduknya, membebaskan tahanan, dan menarik semua pasukan militer dari kota maupun desa, memberikan akses kepada Liga Arab untuk melakukan observasi untuk menentukan kebenaran situasi di lapangan. Dalam draft ini juga menegaskan kembali komitmen pemerintah

⁷³ Security council, 2014, "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution" diakses dari <https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm> pada 19 november 2017

Suriah terhadap kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan integritas teritorial Suriah⁷⁴. Terkait resolusi ini ada 16 poin yaitu :

1. Mengutuk terus berlanjutnya pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh pemerintah Suriah, seperti penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, eksekusi sewenang-wenang, pembunuhan dan penganiayaan terhadap pemrotes dan anggota media, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, gangguan akses terhadap perawatan medis, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan, termasuk terhadap anak-anak.
2. Menuntut agar pemerintah Suriah segera mengakhiri semua pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap orang-orang yang menjalankan hak mereka atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berasosiasi dengan damai, melindungi penduduknya, sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan sepenuhnya melaksanakan resolusi dewan HAM S-16/1, S-17/1, S-18/1 dan resolusi Majelis Umum A / RES / 66/176;
3. Mengutuk semua kekerasan, terlepas dari mana asalnya, dan dalam hal ini menuntut agar semua pihak di Suriah, termasuk kelompok bersenjata, segera menghentikan semua kekerasan atau pembalasan, termasuk serangan terhadap institusi negara, sesuai dengan prakarsa negara Liga Arab.
4. Mengingat bahwa semua pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindak kekerasan, harus dimintai pertanggungjawaban.

⁷⁴ Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2012/77 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/77 pada 16 1 november 2017

5. Permintaan bahwa pemerintah Suriah, sesuai dengan Rencana Aksi Liga Negara Arab 2 November 2011 dan keputusannya pada 22 Januari 2012, tanpa penundaan:

- (a) menghentikan semua kekerasan dan melindungi penduduknya;
- (b) membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang wenang karena insiden baru baru ini
- (c) menarik semua angkatan bersenjata dan militer Suriah dari kota kota dan kota kota, dan mengembalikan mereka ke barak rumah asal mereka;
- (d) menjamin kebebasan demonstrasi damai.
- (e) memungkinkan akses dan pergerakan penuh dan tanpa hambatan untuk semua lembaga Liga Arab yang relevan dan media Arab dan internasional di seluruh wilayah Suriah untuk mengetahui kebenaran tentang situasi di lapangan dan memantau insiden yang terjadi, dan
- (f) memungkinkan akses penuh dan tanpa hambatan pada misi pengamat Liga Arab.

6. Panggilan untuk proses politik yang dipimpin oleh orang-orang Suriah yang dilakukan di lingkungan yang bebas dari kekerasan, ketakutan, intimidasi dan ekstremisme, dan ditujukan untuk secara efektif menangani aspirasi dan keprihatinan yang sah dari masyarakat Suriah.

7. Sepenuhnya mendukung dalam hal ini keputusan negara Liga Arab pada 22 Januari 2012 untuk memfasilitasi transisi politik yang dipimpin oleh Suriah ke sistem politik yang plural dan demokratis, di mana warga negara setara tanpa memandang afiliasi atau etnis atau kepercayaan mereka, termasuk melalui

permulaan sebuah dialog politik yang serius antara pemerintah Suriah dan keseluruhan spektrum oposisi Suriah di bawah naungan negara Liga Arab, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh negara Liga Arab.

8. Mendorong negara Liga Arab untuk melanjutkan upayanya bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan Suriah.

9. Memanggil pihak berwenang Suriah, mengenai dimulainya kembali misi pengamat, untuk bekerja sama sepenuhnya dengan misi pengamat negara Liga Arab, sesuai dengan Protokol Liga Arab pada 19 Desember 2011, termasuk melalui pemberian akses penuh dan tanpa hambatan dan kebebasan bergerak ke pengamat, memfasilitasi masuknya peralatan teknis yang diperlukan untuk misi tersebut, menjamin hak misi untuk mewawancarai, bebas atau secara pribadi, setiap individu dan menjamin juga untuk tidak menghukum, melecehkan, atau membalas, siapa saja yang telah bekerja sama dengan misinya.

10. Menekankan kebutuhan semua pihak untuk memberikan semua bantuan yang diperlukan untuk misi sesuai dengan Protokol Liga Arab pada tanggal 19 Desember 2011 dan keputusannya pada tanggal 22 Januari 2012.

11. Menuntut agar pihak berwenang Suriah bekerja sama sepenuhnya dengan pihak Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia dan dengan Komisi Penyelidik yang dikirim oleh Dewan Hak Asasi Manusia, termasuk dengan memberikan akses penuh dan tanpa hambatan ke negara tersebut.

12. Meminta otoritas Suriah untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tidak terhalang untuk menjamin penyampaian bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan.

13. Menyambut upaya Sekretaris Jenderal untuk memberikan dukungan kepada Liga Negara-negara Arab, termasuk misi pengamatnya, dalam mempromosikan solusi damai untuk krisis Suriah;
14. Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan pelaksanaan resolusi ini, dengan berkonsultasi dengan negara Liga Arab, dalam waktu 21 hari setelah diadopsi dan dilaporkan setiap 30 hari setelahnya.
15. Memutuskan untuk meninjau pelaksanaan resolusi ini dalam waktu 21 hari dan, jika terjadi ketidakpatuhan, untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.
16. Memutuskan untuk tetap terlibat secara aktif dalam masalah ini.

Dalam merespon resolusi ini Cina menyatakan melalui perwakilannya Li Baodong bahwa Cina juga ingin segera mengakhiri kekerasan di Suriah, meminta masyarakat Suriah menghormati sebuah proses reformasi. Cina juga mendukung untuk mengembalikan stabilitas di Suriah seperti sebelum perang. Oleh karena itu, Cina meminta masyarakat internasional untuk memberikan bantuan yg konstruktif, tetapi untuk mencapai hal itu kedaulatan dan kemerdekaan negara harus dihormati. Tujuan tujuan piagam PBB harus dihormati dan mendukung dialog politik sebagai solusi konflik. bagi Cina rancangan ini adalah satu tekanan yang tidak menyelesaikan masalah⁷⁵.

⁷⁵ Security council, 2012, "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League's Proposed Peace Plan", united nations diakses dari <https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm> pada 19 november 2017

Dari pernyataan tersebut Cina tidak menyetujui poin resolusi yang membahas hal hal yang dianggap tidak menghormati kedaulatan pemerintah Suriah, atau adanya intervensi dewan. Ketidaksetujuan Cina terdapat pada poin 2 dan 5 yang membahas agar pemerintah Suriah menghentikan serangan militernya.

➤ Draft resolusi pada pertemuan tanggal 19 Juli 2012

Draft resolusi ke tiga yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 19 Juli 2012. Rancangan resolusi ini diajukan oleh Perancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Resolusi ini membahas mengenai komitmen Suriah terhadap kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan integritas teritorial Suriah, dan terhadap tujuan dan prinsip prinsip piagam PBB. Juga membahas penegasan kembali untuk melaksanakan *six point plan* oleh Kofi Annan dan negara negara Liga Arab. Mengecam penggunaan senjata berat yang dilakukan oleh pihak berwenang Suriah, termasuk, di pusat pemukiman dan kegagalan untuk menarik tentaranya, mengutuk kekerasan bersenjata oleh semua pihak, menyatakan keprihatinan pelanggaran HAM oleh semua pihak termasuk terorisme, mematikan akses penuh terhadap masuknya bantuan internasional ke Suriah. Selain itu, draft ini juga membahas perluasan mandat UNMIS dan menekankan bahwa solusi politik adalah solusi terbaik⁷⁶. Dalam draft ini, terdapat 17 poin sebagai berikut :

⁷⁶ Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2012/5282 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/5382 pada 1 november 2017

1. Mengungkapkan keprihatinan serius pada eskalasi kekerasan, dan kegagalan para pihak, khususnya pihak berwenang Suriah, untuk menerapkan *six point plan* yang dicakup dalam resolusi 2042 (2012), sehingga tidak memungkinkan terciptanya ruang politik. yang memungkinkan dialog politik yang bermakna, dan meminta semua pihak untuk segera melakukan rekonsiliasi dan tanpa menunggu tindakan pihak lain secara terus menerus dalam segala bentuk dan pelaksanaan *six point plan* tersebut.
2. Mendukung sepenuhnya *30 June Action Group Final Communiqué* dan pedoman dan prinsip dasarnya.
3. Menuntut pelaksanaan yang mendesak, komprehensif, dan segera, semua elemen *six point plan* yang dicakup dalam resolusi 2042 (2012) yang bertujuan untuk segera mengakhiri semua kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, mengamankan akses kemanusiaan dan memfasilitasi transisi politik yang dipimpin oleh Suriah yang mengarah ke sistem politik plural yang demokratis, di mana warga negara setara tanpa memandang afiliasi, etnis atau kepercayaan mereka, termasuk melalui dialog politik komprehensif antara pemerintah Suriah dan keseluruhan spektrum oposisi Suriah.
4. Memutuskan bahwa pihak berwenang Suriah harus menerapkan komitmen mereka secara jelas dan terukur secara keseluruhan, sebagaimana yang mereka sepakati dalam pemahaman pendahuluan dan sebagaimana ditetapkan dalam resolusi 2042 (2012) dan 2043 (2012), untuk (a) menghentikan pergerakan pasukan menuju pusat penduduk, (b) menghentikan semua penggunaan senjata berat di pusat-pusat tersebut, (c) penarikan lengkap konsentrasi militer di dalam

dan di sekitar pusat pemukiman penduduk, dan untuk menarik tentaranya dan senjata berat dari pusat pemukiman penduduk ke barak mereka atau tempat penyebaran sementara untuk memfasilitasi penghentian kekerasan yang berkelanjutan.

5. Menuntut semua pihak di Suriah, termasuk pihak oposisi, segera menghentikan semua kekerasan bersenjata dalam segala bentuknya, sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi penghentian kekerasan yang berkelanjutan dan transisi politik yang dipimpin oleh orang Suriah.

6. Mengungkapkan keprihatinan serius pada meningkatnya jumlah pengungsi dan pengungsi internal akibat kekerasan yang terus berlanjut, dan mengulangi apresiasi atas upaya signifikan yang telah dilakukan oleh negara negara yang berbatasan dengan Suriah untuk membantu mereka yang telah melarikan diri melintasi perbatasan Suriah sebagai konsekuensi dari kekerasan tersebut, dan meminta UNHCR untuk memberikan bantuan sesuai permintaan negara negara anggota yang menerima orang orang yang kehilangan tempat tinggal tersebut.

Transisi

7. Menuntut agar semua pihak di Suriah bekerja dengan *Office of the Joint Special Envoy* untuk melaksanakan rencana transisi dengan cepat yang ditetapkan dalam *Kom Final Communiqué* dengan cara menjamin keselamatan semua pihak dalam suasana stabil dan tenang.

Akuntabilitas

8. Mengingatkan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lain, termasuk tindak kekerasan, harus dimintai pertanggungjawaban.

9. Memutuskan bahwa Pemerintah Suriah harus menyediakan *UN Independent International Commission of Inquiry* Suriah dan orang-orang yang bekerja untuk segera masuk dan mendapatkan akses ke semua wilayah di Suriah, memutuskan bahwa pihak berwenang Suriah harus bekerja sama sepenuhnya dengan *UN Independent International Commission of Inquiry* dalam pelaksanaan mandatnya.

UNSMIS

10. Memutuskan untuk memperbarui mandat Misi Pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Suriah (UNSMIS) untuk jangka waktu 45 hari, berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal untuk mengonfigurasi ulang UNSMIS untuk meningkatkan dukungan untuk dialog dengan dan antara kedua belah pihak, dan meningkatkan perhatian pada isu-isu politik dan hak-hak di seluruh *six point plan*.

11. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mempertahankan kapasitas pengamat militer minimum dan komponen sipil yang diperlukan untuk mendukung langkah maju dalam *six point plan* melalui fasilitasi dialog politik dan untuk melakukan tugas verifikasi dan pencarian fakta.

12. Mengecam semua serangan terhadap UNSMIS, menegaskan kembali bahwa pelaku serangan terhadap personel PBB harus diadili, menuntut agar para pihak menjamin keselamatan personel UNSMIS tanpa mengurangi kebebasan bergerak dan akses, dan menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam hal ini berkaitan dengan pihak berwenang Suriah.

13. Tuntutan bahwa pihak berwenang Suriah memastikan operasi UNSMIS yang efektif dengan: memfasilitasi pengiriman personil dan kapabilitas yang segera dan tidak terhalang sesuai kebutuhan untuk memenuhi mandatnya; memastikan kebebasan bergerak dan akses penuh tanpa hambatan penuh dan segera yang diperlukan untuk memenuhi mandatnya, yang digarisbawahi dalam hal ini kebutuhan pemerintah Suriah dan PBB untuk segera mencapai kesepakatan mengenai aset transportasi udara yang sesuai untuk UNSMIS; memungkinkan komunikasi yang tidak terhalang; dan mengizinkannya untuk secara bebas dan pribadi berkomunikasi dengan individu individu di seluruh Suriah tanpa balas dendam perseorangan sebagai hasil interaksi dengan UNSMIS.

Pemenuhan

14. Memutuskan bahwa, jika pemerintah Suriah belum sepenuhnya mematuhi paragraf 4 di atas dalam waktu sepuluh hari, maka akan segera menerapkan tindakan berdasarkan pasal 41 piagam PBB.

Pelaporan dan Tindak Lanjut

15. Meminta Sekretaris Jenderal untuk melapor kepada dewan keamanan mengenai pelaksanaan semua pihak di Suriah mengenai resolusi ini dalam waktu 10 hari setelah diadopsi dan setiap 15 hari sesudahnya.

16. Menyatakan tujuannya untuk menilai pelaksanaan resolusi ini dan mempertimbangkan langkah lebih lanjut yang sesuai.

17. Memutuskan untuk tetap berada dalam masalah ini.

Li Baodong sebagai perwakilan Cina di dewan keamanan menyatakan terakut resolusi ini bahwa Cina prihatin dengan keadaan yang terjadi di Suriah, serta penting untuk mendorong gencatan senjata segera dan mendorong solusi damai. Cina mendukung perluasan mandat UNSMIS. Tetapi Cina menganggap rancangan resolusi tersebut adalah hal yg kontraproduktif karena memiliki konten yang tidak seimbang dan hanya memberi tekanan ke satu belah pihak. Resolusi ini juga dianggap hanya akan menggagalkan gagasan solusi secara politik dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Cina menegaskan bahwa krisis di Suriah harus diselesaikan oleh masyarakat Suriah sendiri dan tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat Suriah dan juga norma norma dasar dalam hubungan internasional⁷⁷.

Dari pernyataan tersebut Cina tidak menyetujui poin resolusi yang membahas hal hal yang dianggap kontraproduktif dan hanya memberi tekanan ke satu pihak dan dianggap tidak sesuai norma dalam hubungan internasional yaitu pada poin 4 dan 14 dimana adanya perintah penarikan pasukan militer pemerintah dari pusat kota dan akan adanya kemungkinan sanksi non militer hanya pada pihak pemerintah Suriah saja.

➤ Draft resolusi pada pertemuan tanggal 22 Mei 2014

Draft resolusi ke empat yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 22 Mei 2014. Rancangan resolusi ini diajukan oleh 65 negara anggota PBB. Darft ini

⁷⁷ Security council, 2012 , "security council fails to adopt draft resolutions on syria that would have threatened sanction, due to negative votes of china,russian federations", United Nations diakses dari <http://www.un.org/press/en/2012/sc10714.doc.htm> pada 19 november 2017

membahas mengenai dukungan dari *Communique Jenewa* yang menekankan pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan selama konflik. Juga membahas mengenai mandat dewan HAM untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran HAM dan memastikan pertanggung jawabannya. Memperhatikan pernyataan sekjen komisi HAM yang menyatakan bahwa kejahatan perang dan kemanusiaan kemungkinan besar telah terjadi di Suriah, dan kemudian merujuk situasi ini ke *International Criminal Court*⁷⁸. Dalam draft ini, terdapat 10 poin sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali kecaman kerasnya atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang meluas oleh pihak berwenang Suriah dan milisi pro-pemerintah, serta pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh kelompok bersenjata non negara, semua terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung di Republik Arab Suriah sejak Maret 2011.
2. Memutuskan untuk merujuk situasi di Republik Arab Suriah yang dijelaskan pada ayat 1 di atas sejak Maret 2011 kepada Jaksa *International Criminal Court*.
3. Memutuskan juga bahwa pemerintah Republik Arab Suriah harus bekerja sama sepenuhnya dengan dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada pengadilan dan jaksa penuntut, termasuk dengan menerapkan sepenuhnya perjanjian tentang keistimewaan dan kekebalan pengadilan pidana internasional, sesuai dengan resolusi ini dan , sambil mengakui bahwa negara negara yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma tidak mempunyai kewajiban berdasarkan statuta

⁷⁸ Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2014/348 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/348 pada 21 november 2017

tersebut, sangat mendesak semua negara dan melibatkan organisasi regional dan organisasi internasional lainnya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pengadilan dan jaksa.

4. Menuntut agar kelompok bersenjata non negara di Republik Arab Suriah juga bekerja sama sepenuhnya dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada pengadilan dan jaksa penuntut sehubungan dengan penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan sesuai dengan resolusi ini.

5. Mengungkapkan komitmennya terhadap tindak lanjut yang efektif atas resolusi saat ini.

6. Menyatakan panduan yang dikeluarkan oleh sekretaris jenderal mengenai kontak dengan orang-orang yang menjadi subyek surat perintah penangkapan atau surat panggilan yang dikeluarkan oleh *International Criminal Court*.

7. Memutuskan bahwa warga negara, pejabat saat ini atau mantan pejabat atau personil dari suatu negara di luar Republik Arab Suriah yang bukan merupakan pihak Statuta Roma tentang *International Criminal Court* harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara tersebut atas semua tindakan atau kelalaian yang dituduhkan yang timbul dari atau terkait dengan operasi di Republik Arab Suriah yang dibuat atau diberi wewenang oleh dewan, kecuali yurisdiksi eksklusif tersebut telah dibebaskan secara tegas oleh negara.

8. Mengakui bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan rujukan, termasuk biaya yang berkaitan dengan penyelidikan atau penuntutan sehubungan dengan rujukan tersebut, harus ditanggung oleh PBB dan bahwa biaya tersebut harus ditanggung oleh para pihak dalam statuta Roma dan negara

negara yang ingin berkontribusi secara sukarela dan mendorong negara-negara untuk memberikan kontribusi tersebut, mencatat kebutuhan untuk pendanaan biaya yang berkaitan dengan penyelidikan atau penuntutan *International Criminal Court*, termasuk dalam kaitannya dengan situasi yang termasuk dalam pengadilan oleh dewan keamanan, sebagaimana dinyatakan dalam resolusi Majelis Umum 67/295.

9. Mengundang Jaksa Penuntut untuk memanggil dewan PBB dalam waktu dua bulan sejak tanggal adopsi resolusi ini dan setiap enam bulan setelah tindakan yang diambil sesuai dengan resolusi ini dan meminta sekretaris jenderal untuk mengedarkan laporan jaksa penuntut umum sebagai dokumentasi dewan PBB, sebelum briefing tersebut.

10. Memutuskan untuk tetap terlibat dalam masalah ini.

Cina melalui perwakilannya Wang Min dalam resolusi ini berpendapat bahwa Cina menentang semua tindakan kekerasan yg melanggar hukum humaniter dan HAM tetapi Cina menganggap setiap tindakan yang meminta rujukan ke ICC harus berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan negara. Yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik ini adalah memulai gencatan senjata dan memulai perundingan. Merujuk ke pengadilan internasional akan membuat situasi tidak kondusif untuk melanjutkan perundingan. Cina selama ini selalu objektif, tidak memihak, dan berkomitmen untuk mendesak semua pihak mencari jalan tengah⁷⁹.

⁷⁹ Security Council, 2014, "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution" diakses dari <https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm> pada 19 November 2017

Dari pernyataan tersebut Cina tidak menyetujui poin resolusi yang dianggap kontraproduktif dengan solusi politik yang sedang berlangsung seperti membawa kasus tersebut ke ICC yaitu pada poin 2, membawa kasus tersebut ke ICC juga dianggap Cina sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip dasar PBB mengenai menghormati kedaulatan negara.

➤ Draft resolusi pada pertemuan tanggal 5 Desember 2016

Draft resolusi ke lima yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 5 Desember 2016. Rancangan resolusi ini diajukan oleh Mesir, Selandia Baru, dan Spanyol. Draft ini membahas mengenai memburuknya situasi di Suriah dengan lebih dari 13,5 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan 6,1 juta orang mengungsi. Juga menekankan bahwa situasi keamanan Suriah yang terus memburuk dan menjadi ancaman di wilayah tersebut dan akan terus berlanjut jika tidak ada penghentian permusuhan dan solusi politik terutama di wilayah Aleppo⁸⁰. Dalam rancangan ini terdapat 14 poin sebagai berikut :

1. Memutuskan bahwa semua pihak dalam konflik Suriah akan berhenti, 24 jam setelah diadopsinya resolusi ini, setiap dan semua serangan di kota Aleppo, termasuk dengan senjata apapun, termasuk roket, mortir, dan rudal anti-tank, dan termasuk penembakan dan serangan udara, untuk memungkinkan masuknya kebutuhan kemanusiaan mendesak ditangani selama 7 hari dan menyatakan keinginannya untuk mempertimbangkan perpanjangan lebih lanjut untuk periode

⁸⁰ Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2016/1026 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1026 pada 22 november 2017

7 hari secara berulang, dan menuntut agar semua pihak mengizinkan dan memfasilitasi dengan segera, aman, berkelanjutan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke semua Aleppo oleh PBB dan mitra pelaksananya.

2. Permintaan, di samping ayat 1, bahwa semua pihak, segera menerapkan dan memastikan pelaksanaan penghentian permusuhan sepenuhnya, termasuk seruan agar agen kemanusiaan diberi akses yang cepat, aman, dan tidak terhalang di seluruh Suriah, seperti yang dijelaskan dalam resolusi 2268 (2016), termasuk lampiran yang disebutkan di dalamnya dan menekankan bahwa penghentian permusuhan tidak berlaku untuk tindakan ofensif atau defensif lagi ISIS , Front Al-Nusra (ANF), dan kelompok teroris lainnya, seperti yang dimaksud oleh dewan keamanan.

3. Menuntut agar semua pihak dalam konflik Suriah, khususnya pemerintah Suriah, segera mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional sebagaimana berlaku, termasuk berkenaan dengan semua wilayah yang terkepung dan sulit dijangkau, dan sepenuhnya dan segera melaksanakan semua ketentuan resolusi 2139 (2014), 2165 (2014) 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) dan 2268 (2016), dan mengingat bahwa pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan di Suriah tidak boleh dihukum tanpa hukuman.

4. Sangat mengutuk tindakan kekerasan, serangan dan ancaman terhadap orang-orang yang terluka dan sakit, petugas medis dan personil kemanusiaan yang secara eksklusif melakukan tugas medis, alat transportasi dan peralatan mereka, serta rumah sakit dan fasilitas medis lainnya.

5. Menyerukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendukung perencanaan dan rencana mitra pelaksana PBB dan untuk memfasilitasi secepatnya, termasuk melalui kesepakatan lokal, evakuasi orang-orang yang terluka dan sakit, orang tua, anak-anak dan persalinan dari kepungan dan kesulitan menjangkau daerah ke tempat yang mereka pilih hanya berdasarkan urgensi dan kebutuhan, dan juga semua yang ingin meninggalkan Aleppo secara sukarela, dan menekankan perlunya warga sipil untuk dihormati dan diizinkan untuk bergerak bebas ke tempat-tempat yang mereka kehendaki.

6. Memanggil semua negara untuk membendung arus pejuang teroris asing, dan mengingat kembali keputusan dalam paragraf 2 resolusi 2253 sehubungan dengan memastikan bahwa tidak ada dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi yang tersedia bagi ISIL (juga dikenal sebagai Da'esh), Al-Qaida, dan individu, kelompok, usaha dan entitas terkait dan klarifikasinya pada paragraf 19 bahwa kewajiban dalam ayat 1 (d) resolusi 1373 (2001) berlaku untuk memberikan dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi atau keuangan atau lainnya. layanan terkait yang tersedia, secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan organisasi teroris atau teroris individu untuk tujuan apa pun.

7. Menuntut semua pihak dalam konflik menghentikan semua kerja sama dengan ISIL, Front Al Nusra (ANF), dan kelompok teroris lainnya, seperti yang ditunjuk oleh dewan keamanan; dan tuntutan lebih lanjut bahwa semua kombatan yang tidak ditunjuk oleh Dewan Keamanan mengambil langkah untuk memisahkan secara cepat dari teroris yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan, dan juga menuntut

anggota *International Syria Support Group* untuk mencegah pihak manapun dari pertempuran berkerjasama dengan teroris yang dimaksud oleh Dewan Keamanan.

8. Menuntut semua pihak untuk berhenti, dalam waktu 10 hari sejak diadopsinya resolusi ini, menunjukkan secara publik, atau kepada Co-Chairs dari *International Syria Support Group*, komitmen mereka untuk tetap menjadi pihak penghentian permusuhan dan menekankan dalam hal ini perlunya untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan resolusi ini

9. Menyambut diskusi antara kelompok pendukung *International Syria Support Group* bersama dengan negara negara anggota lainnya dan PBB, di Lausanne pada tanggal 15 Oktober dan selanjutnya di Jenewa, dan mendesak mereka yang terlibat untuk menerjemahkan diskusi tersebut menjadi tindakan yang memperbaiki situasi kemanusiaan orang-orang Suriah dan berkontribusi pada implementasi penuh dari resolusi ini; dan menyambut baik penyediaan darurat rumah sakit dan petugas medis yang saat ini dikirim ke Aleppo.

10. Memanggil semua negara anggota yang relevan, khususnya anggota *International Syria Support Group*, untuk mengkoordinasikan upaya agar:

(i) Memastikan pemantauan yang memadai terhadap gencatan senjata di kota Aleppo serta penghentian permusuhan di seluruh Suriah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Co-Chairs dari *International Syria Support Group*;

(ii) Memungkinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan dengan segera, tanpa hambatan dan berkelanjutan ke semua wilayah, termasuk untuk mengepung untuk mencapai daerah yang sulit di seluruh Suriah, berdasarkan kebutuhan yang dinilai oleh PBB dan mitra pelaksana; (iii) Mencegah dan menekan tindakan teroris yang

dilakukan secara khusus oleh ISIL, Front Al Nusra (ANF), dan semua individu, kelompok, usaha, dan entitas lain yang terkait dengan Al-Qa'ida atau ISIL, dan kelompok teroris lainnya, sebagaimana dimaksud oleh dewan keamanan, dan untuk memberantas tempat berlindung yang mereka miliki di bagian bagian penting Suriah.

11. Menegaskan kembali bahwa negara-negara anggota harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme mematuhi semua kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, pengungsi dan hukum humaniter.

12. Menuntut implementasi penuh dan segera dari proses politik yang digariskan dalam resolusi 2254, dan untuk itu menegaskan kembali bahwa satu satunya solusi berkelanjutan untuk krisis saat ini di Suriah adalah melalui proses politik yang inklusif dan dipimpin oleh Suriah yang memenuhi aspirasi yang sah dari orang orang Suriah sesuai dengan Komunike Jenewa dan resolusi 2254, dan dalam hal ini sangat mendukung niat sekretaris jenderal dan *Special Envoy for Syria*, untuk mengadakan perundingan formal sesegera mungkin.

13. Permintaan bahwa Sekretaris Jenderal melapor kepada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan resolusi ini dan memberikan pilihan untuk melagsungkan penghentian permusuhan, termasuk penyediaan bantuan dan perlindungan warga sipil di kota Aleppo, dalam waktu 10 hari sejak diadopsinya resolusi ini dan kemudian dalam kerangka pelaporannya mengenai resolusi 2268 (2016), dengan mempertimbangkan diskusi yang diadakan di Lausanne dan Jenewa.

14. Memutuskan untuk tetap terlibat secara aktif dalam masalah ini.

Terkait resolusi ini, Cina melalui perwakilannya Liu Jieyi berpendapat untuk meminta upaya yang lebih intensif untuk memandu solusi politik yang dipimpin oleh masyarakat Suriah sendiri ke dalam situasi yang kompleks, sensitif, dan serius. Tindakan dewan keamanan harus melengkapi upaya diplomatik saat ini, dan juga meningkatkan upaya konsensus dalam badan dewan keamanan⁸¹.

Dari pernyataan tersebut Cina menganggap resolusi ini tidak mendukung upaya diplomatik yang sedang berlangsung yaitu negosiasi secara politik. Dimana menurut penulis, hal yang dimaksud adalah adanya upaya intervensi penghentian perang kepada kedua belah pihak (pemerintah dan oposisi) di kota Aleppo seperti pada poin 1.

➤ Draft resolusi pada pertemuan tanggal 28 Februari 2017

Draft resolusi ke enam yang di veto Cina adalah pada pertemuan tanggal 28 Februari 2017. Rancangan resolusi ini diajukan oleh 44 negara anggota PBB. Draft ini membahas mengenai menegaskan bahwa penggunaan senjata kimia adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, kemudian mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia di Suriah melalui berbagai organisasi berwenang seperti OPCW dan JIM untuk dimintai pertanggungjawaban. Mengingatkan kepatuhan akan hal itu dan kemungkinan

⁸¹ Security Council, 2016, "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution to End Attacks on Aleppo as Two Permanent Members Cast Veto" diakses dari <https://www.un.org/press/en/2016/sc12609.doc.htm> pada 20 November 2016

adanya sanksi sesuai pasal VII piagam PBB⁸². Draft resolusi ini terdiri dari 37 poin sebagai berikut :

1. Memperhatikan laporan ketiga dan keempat JIM (S / 2016/738 dan S / 2016/888), dan khususnya temuan laporan ketiga bahwa ada cukup informasi untuk mencapai kesimpulan mengenai aktor yang terlibat dalam kasus tersebut. dari Talmenes (21 April 2014), Sarmin (16 Maret 2015) dan Marea (21 Agustus 2015), dan temuan keempat bahwa ada cukup informasi untuk mencapai kesimpulan mengenai aktor yang terlibat dalam kasus Qmenas (16 Maret 2015) , dan mengingat temuan ini menyimpulkan bahwa resolusi 2118 (2013) telah dilanggar;

2. Mengungkapkan keprihatinan serius tentang temuan JIM dalam laporan ketiga dan keempat, dan mengutuk dengan menggunakan istilah senjata kimia paling kuat di Republik Arab Suriah oleh Angkatan Bersenjata Arab Suriah dan Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL, juga dikenal sebagai "Daesh"), yang telah diidentifikasi oleh OPCW-UN JIM sebagai pelaku, penyelenggara, sponsor, atau lainnya yang terlibat dalam penggunaan senjata kimia di Republik Arab Suriah.

3. Menegaskan kecaman kerasnya atas penggunaan senjata kimia oleh pihak berwenang Suriah, dan ISIL atau pihak lain, yang melanggar hukum internasional, dalam perjalanan konflik yang sedang berlangsung di Republik Arab Suriah sejak Maret 2011;

⁸² Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2017/172 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/172 pada 23 november 2017

4. Mengungkapkan keyakinan kuat bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia di Republik Arab Suriah harus diselidiki secara menyeluruh, dan diadili, jika sesuai, di depan pengadilan yang kompeten yang independen dan tidak memihak dan menyerukan agar semua pihak di Suriah untuk menghentikan penggunaan bahan kimia beracun sebagai senjata.

5. Mengungkapkan keprihatinan serius bahwa Sekretariat Teknis OPCW, seperti yang dilaporkan oleh Direktur Jenderal (EC-82 / DG.18 tanggal 6 Juli 2016), tidak dapat menyelesaikan semua kesenjangan, inkonsistensi dan ketidaksesuaian yang teridentifikasi dalam deklarasi Suriah, oleh karena itu tidak dapat sepenuhnya memverifikasi bahwa Suriah telah mengajukan sebuah deklarasi yang dapat dianggap akurat dan lengkap sesuai dengan keputusan Dewan Eksekutif CWC atau OPCW EC-M-33 / DEC.1 tertanggal 27 September 2013 atau resolusi 2118 (2013), dan meminta Republik Arab Suriah untuk sepenuhnya mematuhi semua kewajiban dan konsekuensinya, termasuk, penyelesaian dengan segera semua isu yang mengenai deklarasi awal dan pengungkapannya.

6. Mengenang bahwa dalam resolusi 2118 (2013), Dewan memutuskan bahwa Republik Arab Suriah harus mematuhi semua aspek keputusan Dewan Eksekutif OPCW pada tanggal 27 September 2013 (Lampiran I untuk resolusi 2118), selanjutnya mengingatkan ayat 1 dari Lampiran untuk resolusi 2118 (2013), memutuskan bahwa Republik Arab Suriah dalam waktu 30 hari akan diumumkan dan berada di bawah pengawasan OPCW dan mengendalikan semua senjata kimia sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 1 Pasal II CWC yang dimiliki atau

dimiliki oleh Republik Arab Suriah di bawah yurisdiksi atau kontrolnya, dan sejauh ini belum diumumkan kepada OPCW, termasuk:

(a) Nama kimia dan perancang militer dari setiap bahan kimia yang tidak secara khusus dimiliki untuk tujuan yang tidak dilarang sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 CWC, yang berada pada saat adopsi resolusi ini, pada fasilitas dari Angkatan Bersenjata Arab Suriah.

(b) Jenis spesifik dari setiap amunisi dan perangkat yang dimilikinya yang mampu mengerahkan senjata kimia, termasuk yang telah disesuaikan atau dimaksudkan untuk disesuaikan untuk pengiriman klorin, dan termasuk jumlah tertentu atau setiap jenis yang terisi dan tidak terisi. , dan

(c) Lokasi dari setiap senjata kimia yang tersisa, fasilitas penyimpanan senjata kimia, fasilitas produksi senjata kimia dan fasilitas penelitian dan pengembangan senjata kimia, termasuk tempat di mana peralatan amunisi dan kaporit lainnya disimpan. dan meminta agar OPCW mengambil tindakan yang tepat, sesuai dengan mandatnya, untuk menerapkan keputusan yang ditetapkan dalam paragraf ini.

7. Tetap prihatin dengan ancaman terorisme dan risiko yang dapat diakuisisi oleh aktor non-negara, dikembangkan, dijalankan atau gunakan senjata nuklir, kimia, dan biologi serta cara pengirimannya, terutama di kawasan Timur Tengah.

8. Mengungkapkan keprihatinan serius bahwa ISIL, sebuah kelompok teroris yang bertanggung jawab atas serangkaian pelanggaran berat hukum internasional, telah menggunakan senjata kimia, yang melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan

dalam Resolusi 1540 (2004) mengenai penggunaan dan akses terhadap senjata pemusnah massal oleh aktor non-negara;

9. Menegaskan tindakan yang diberlakukan terhadap ISIL dalam resolusi 2253 (2015), khususnya kewajiban di semua Negara untuk memastikan bahwa tidak ada dana, aset keuangan, sumber daya ekonomi atau senjata, termasuk yang tercantum dalam daftar kontrol dokumen S / 2017/170 dan yang tercantum dalam Lampiran 2, tersedia secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingannya, oleh warga negaranya atau oleh orang-orang di wilayah mereka, dan, sehubungan dengan temuan OPCW-UN JIM, mendesak semua negara untuk melipatgandakan usaha mereka untuk melaksanakan sepenuhnya tindakan yang relevan untuk mencegah ISIL menggunakan senjata kimia di masa depan.

10. Mendorong semua negara termasuk negara negara regional yang relevan untuk memberikan, jika sesuai, kepada OPCW-UN JIM dan informasi OPCW mengenai akses aktor non-negara terhadap senjata kimia dan komponen atau upaya yang dilakukan oleh aktor non-negara untuk mengembangkan, memperoleh , memproduksi, memiliki, mengangkut, mentransfer atau menggunakan senjata kimia dan cara pengirimannya yang terjadi di bawah yurisdiksinya, termasuk informasi yang relevan dari penyelidikan nasional, dan menggarisbawahi pentingnya kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal VII dari CWC, dan pelaksanaan sepenuhnya dari paragraf 8 resolusi 2235, termasuk berkenaan dengan informasi yang berkaitan dengan aktor non-negara.

11. memperhatikan bahwa, sejak UN-OPCW mengajukan laporan keempatnya, FFM OPCW terus menyelidiki dan melaporkan dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah, dan meminta direktur jenderal OPCW untuk meminta Dewan tersebut memberitahukan kemajuan investigasi ini.

12. Memperhatikan bahwa dalam kasus di mana FFM OPCW menentukan bahwa insiden spesifik di Republik Arab Suriah terlibat atau mungkin melibatkan penggunaan bahan kimia sebagai senjata, insiden semacam itu akan diselidiki lebih lanjut oleh JIM sesuai dengan mandatnya, dan mengingat kembali kewajiban pemerintah Suriah untuk bekerja sama dengan investigasi tersebut dan menekankan pentingnya atau kerja sama penuh dengan semua permintaan informasi dan bantuan lain yang dikeluarkan oleh OPCW dan JIM.

13. Memutuskan untuk menetapkan, sesuai dengan peraturan 28 dari peraturan prosedur sementara, Komite Dewan Keamanan yang terdiri dari semua anggota dewan (disini "komite"), untuk melakukan tugas-tugas berikut:

- (a) memantau pelaksanaan tindakan yang diberlakukan dalam resolusi ini;
- (b) menunjuk individu untuk tunduk pada tindakan yang diberlakukan oleh paragraf 18 dari resolusi ini dan untuk mempertimbangkan permintaan pembebasan sesuai dengan paragraf 19 dari resolusi ini;
- (c) menunjuk individu, kelompok dan entitas untuk tunduk pada tindakan yang ditetapkan oleh paragraf 17 dari resolusi ini dan untuk mempertimbangkan permintaan pembebasan sesuai dengan paragraf 18 dari resolusi ini.

(d) menetapkan pedoman yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tindakan yang diberlakukan dalam resolusi ini.

(e) melaporkan dalam waktu 30 hari kepada Dewan Keamanan mengenai pekerjaannya dan setiap 90 hari setelahnya, serta mengenai pelaksanaan resolusi ini dengan pengamatan dan rekomendasinya, terutama untuk memperkuat keefektifan tindakan tersebut.

(f) untuk mendorong dialog antara komite dan negara negara yang tertarik, khususnya di wilayah tersebut, termasuk dengan mengundang perwakilan dari negara negara tersebut untuk bertemu dengan komite untuk membahas pelaksanaan tindakan tersebut.

(g) untuk mencari dari semua Negara, informasi apa pun yang mungkin dianggap bermanfaat mengenai tindakan yang diambil oleh mereka untuk menerapkan secara efektif tindakan yang diberlakukan dalam resolusi ini;

(h) untuk memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat atas informasi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap tindakan yang terdapat dalam resolusi ini, dengan maksud untuk memastikan konsekuensi atas semua pelanggaran terhadap tindakan yang relevan;

14. Meminta semua Negara untuk melapor kepada Komite dalam waktu 90 hari setelah penerapan resolusi ini atas langkah-langkah yang telah diambil untuk menerapkan tindakan yang ditetapkan dalam resolusi ini.

15. Memutuskan bahwa tindakan dalam paragraf 17 resolusi ini berlaku untuk individu dan entitas dalam Lampiran 1 dari resolusi ini, dan individu dan entitas

yang ditunjuk untuk tindakan tersebut oleh komite, dan bahwa tindakan dalam paragraf 21 dari resolusi ini harus berlaku untuk individu yang ditunjuk dalam Lampiran 1 dari resolusi ini dan individu yang ditunjuk untuk tindakan tersebut oleh komite, seperti:

(a) bertanggung jawab atas, terlibat atau terlibat dalam penggunaan, pemindahan, akuisisi, proliferasi, pengembangan, pembuatan atau produksi senjata kimia di Republik Arab Suriah.

(b) terlibat dalam atau terlibat dalam memesan, mengendalikan, memberi wewenang, atau mengarahkan penghindaran tindakan yang diberlakukan dalam resolusi atau resolusi 2118 (2013) ini; atau

(c) bertindak atas nama atau atas dasar, dimiliki atau dikendalikan oleh, memberikan dukungan finansial, logistik, atau dukungan lain terhadap, atau hubungan dengan, individu atau entitas yang diidentifikasi dalam paragraf ini.

16. Mendorong negara negara anggota untuk menyerahkan kepada komite nama individu dan entitas yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam paragraf 15 dari resolusi ini.

17. Memutuskan bahwa semua negara anggota harus membekukan tanpa menunda semua dana, aset keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya di wilayah mereka pada tanggal diadopsinya resolusi ini atau kapanpun setelahnya, yang dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh individu dan entitas yang tercantum dalam lampiran resolusi ini atau ditunjuk oleh komite, atau oleh perorangan atau entitas yang bertindak atas nama mereka atau

sesuai arahnya, atau oleh entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh mereka, termasuk melalui tindakan ilegal, dan memutuskan lebih lanjut bahwa semua negara anggota harus memastikan bahwa setiap dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi dicegah dibuat oleh warga negaranya atau oleh individu atau entitas apa pun di dalam wilayah mereka, untuk atau demi kepentingan individu atau entitas yang tercantum dalam lampiran 1 pada resolusi atau individu atau entitas ini. yang ditunjuk oleh komite, atau perorangan atau entitas yang dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang atau entitas yang terdaftar atau ditunjuk atau bertindak atas nama mereka atau atas arahnya.

18. Memutuskan bahwa tindakan yang diberlakukan oleh paragraf 17 resolusi ini tidak berlaku untuk dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi lainnya yang telah ditentukan oleh negara anggota yang bersangkutan:

(a) yang diperlukan untuk biaya dasar, termasuk pembayaran untuk bahan makanan, uang sewa atau hipotek, obat-obatan dan perawatan medis, pajak, premi asuransi, dan biaya utilitas umum atau secara eksklusif untuk pembayaran biaya profesional yang wajar dan penggantian biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyediaan layanan hukum, sesuai dengan undang-undang nasional, atau biaya atau biaya layanan, untuk pemeliharaan rutin atau pemeliharaan dana beku, aset keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya, setelah pemberitahuan oleh negara anggota yang bersangkutan kepada komite mengenai niat untuk memberi wewenang, jika sesuai, akses terhadap dana tersebut, aset keuangan atau sumber daya ekonomi lainnya dan dengan tidak adanya keputusan negatif oleh Komite dalam waktu lima hari kerja sejak pemberitahuan tersebut;

(b) diperlukan untuk biaya luar biasa, dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut telah diberitahu oleh negara anggota yang bersangkutan kepada komite dan telah disetujui oleh komite; atau

(c) tunduk pada putusan pengadilan, atau arbitrase peradilan, administratif atau arbitrase, dalam hal mana dana, aset keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya dapat digunakan untuk memenuhi hak gadai atau penghakiman tersebut asalkan hak gadai atau putusan dibuat sebelum tanggal resolusi sekarang, bukan untuk kepentingan individu atau entitas yang ditunjuk sesuai dengan [kriteria penunjukan], dan telah diberitahu oleh negara anggota atau negara anggota yang bersangkutan ke komite.

19. Memutuskan bahwa negara negara anggota dapat mengizinkan penambahan akun yang dibekukan sesuai dengan ketentuan pada paragraf 17 dari resolusi ini atas kepentingan atau penghasilan lain yang disebabkan oleh akun atau pembayaran tersebut berdasarkan kontrak, kesepakatan atau kewajiban yang timbul sebelum tanggal di mana mereka akun menjadi tunduk pada ketentuan resolusi ini, asalkan kepentingan tersebut, pendapatan dan pembayaran lainnya terus tunduk pada ketentuan ini dan dibekukan.

20. Memutuskan bahwa tindakan dalam paragraf 17 dari resolusi ini tidak mencegah individu yang ditunjuk, atau badan dari melakukan pembayaran karena kontrak yang ditandatangani sebelum pencatatan individu atau entitas tersebut, dengan ketentuan bahwa negara negara yang bersangkutan memiliki menentukan bahwa kontrak tersebut tidak terkait dengan barang-barang yang pengalihannya

dilarang oleh resolusi ini dan pembayaran tersebut tidak diterima secara langsung atau tidak langsung oleh orang atau badan yang ditunjuk sesuai dengan paragraf 17 dari keputusan ini, dan setelah pemberitahuan oleh negara negara yang bersangkutan kepada komite dari niat untuk membuat atau menerima pembayaran tersebut atau memberi otorisasi, jika sesuai, tidak bebasnya dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi lainnya untuk tujuan ini, 10 hari kerja sebelum otorisasi tersebut.

21. Memutuskan bahwa semua Negara Anggota harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah masuk atau transit melalui wilayah mereka dari individu yang tercantum dalam lampiran 1 sampai resolusi ini atau yang ditunjuk oleh komite, asalkan tidak ada satu pun ayat ini yang mewajibkan sebuah negara untuk menolak warga negaranya sendiri masuk ke wilayahnya.

22. Memutuskan bahwa tindakan yang diberlakukan oleh paragraf 21 dari resolusi ini tidak berlaku:

(a) di mana komite menentukan berdasarkan kasus per kasus bahwa perjalanan tersebut dibenarkan atas dasar kebutuhan kemanusiaan, termasuk kewajiban agama; atau

(b) di mana masuk atau transit diperlukan untuk pemenuhan proses peradilan; atau

(c) di mana komite menentukan berdasarkan kasus per kasus bahwa pembebasan akan melanjutkan tujuan perdamaian dan rekonsiliasi nasional di Suriah dan stabilitas di wilayah tersebut;

23. Memutuskan bahwa semua negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pasokan, penjualan atau transfer secara langsung atau tidak langsung, atau untuk kepentingan, individu atau entitas yang tercantum dalam lampiran 1 dari resolusi ini atau individu atau badan yang ditunjuk oleh komite, atau individu atau entitas yang bertindak atas nama mereka atau atas perintah mereka, atau oleh entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh mereka, dari atau melalui wilayah mereka atau oleh warga negara atau perorangan mereka yang tunduk pada yurisdiksi mereka, atau menggunakan kapal atau pesawat terbang mereka, terlepas dari tidaknya atau tidak di wilayah mereka, klorin atau item yang tercantum dalam Jadwal ke CWC dan dalam daftar di dokumen S / 2017/170, dan semua senjata dan materi terkait yang digunakan untuk mengirimkan bahan kimia sebagai senjata, dan memutuskan juga bahwa ketentuan ini harus berlaku berkenaan dengan transaksi keuangan, pelatihan teknis, saran, layanan atau bantuan terkait dengan penyediaan, pembuatan, perawatan atau penggunaan barang dan senjata tersebut dan materi terkait.

24. Memutuskan bahwa tindakan yang diberlakukan dalam paragraf 23 dari resolusi ini tidak berlaku untuk penyediaan, penjualan atau pengalihan barang yang disetujui oleh komite terlebih dahulu berdasarkan kasus per kasus.

25. Memutuskan bahwa semua negara anggota harus mencegah pasokan, penjualan atau pengalihan langsung atau tidak langsung kepada angkatan bersenjata, kementerian, instansi, entitas dan orang lain di bawah kendali atau wewenang pemerintah Republik Arab Suriah, melalui wilayah mereka atau oleh badan badan dan individu individu ini, atau menggunakan kapal atau pesawat

bendera mereka, dan terlepas dari apakah di wilayah yang mereka kendalikan, dari helikopter mana pun, atau materi terkait termasuk suku cadang, seperti yang ditentukan dalam Lampiran 2 dari resolusi ini, atau item lainnya yang terkait dengan penggunaan helikopter sebagaimana ditentukan oleh dewan keamanan atau komite yang dibentuk oleh paragraf 13.

26. Memutuskan bahwa tindakan di OP25 tidak berlaku untuk helikopter atau bahan terkait termasuk suku cadang yang ditentukan oleh panitia, berdasarkan kasus per kasus, diperlukan untuk operasi helikopter sipil yang aman atau sebaliknya akan mencapai tujuan resolusi ini.

27. Meminta Sekretaris Jenderal untuk membuat untuk periode awal sampai 1 Maret 2018, dengan berkonsultasi dengan Komite, sebuah kelompok yang terdiri dari enam ahli ("Panel Pakar"), dan untuk membuat pengaturan keuangan dan keamanan yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan Panel, di bawah arahan komite untuk melaksanakan tugas tugas berikut:

(a) membantu komite dalam menjalankan amanatnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 13 di atas,

(b) mengumpulkan, memeriksa dan menganalisis informasi mengenai pelaksanaan langkah langkah dalam paragraf 17, 21, 23, dan 25 dari resolusi ini, khususnya insiden ketidakpatuhan,

(c) membuat rekomendasi mengenai tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh dewan, komite atau negara untuk memperbaiki penerapan tindakan yang relevan,

(d) memberikan kepada dewan laporan interim tentang pekerjaannya paling lambat enam bulan setelah penunjukan panel, dan sebuah laporan terakhir kepada dewan tersebut paling lambat 1 November 2017 dengan temuan dan rekomendasinya.

28. Mengungkapkan maksudnya untuk meninjau kembali amanat Komite dan Panel Pakar dan mengambil tindakan yang tepat mengenai perpanjangan lebih lanjut paling lambat tanggal 1 Februari 2018.

29. Mendesak semua Negara, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Komite dan Panel Pakar, khususnya dengan memberikan informasi apa pun yang ada mengenai pelaksanaan tindakan yang diberlakukan dalam resolusi ini, khususnya insiden ketidakpatuhan.

30. Mengarahkan Komite dan Panel Pakar untuk bekerja sama secara erat dengan *Security Council Sanctions Committees* lainnya dan panel pemantauan pakar PBB masing-masing, khususnya *Analytical Support and Sanctions Monitoring Team* yang dibentuk berdasarkan resolusi 1526 (2004) dan 2253 (2015), Sekretariat Teknis OPCW, dan anggota JIM, untuk bekerja sama dan saling berbagi informasi mengenai kepatuhan terhadap sanksi PBB yang terkait dengan penggunaan bahan kimia beracun sebagai senjata.

31. Menekankan pentingnya semua negara, termasuk Suriah, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada klaim yang didasarkan pada kewenangan Suriah, setiap individu atau entitas di Suriah, setiap individu atau

entitas yang ditunjuk untuk tindakan yang diatur dalam undang-undang ini. resolusi, atau individu atau entitas yang mengklaim melalui atau untuk kepentingan individu atau entitas tersebut, sehubungan dengan kontrak atau transaksi lainnya dimana kinerjanya dipengaruhi oleh alasan tindakan yang diambil oleh resolusi dan resolusi terkait.

32. Mengarahkan Komite Sanksi ISIL (Da'esh) dan Al-Qaida 12,1989/2253 untuk terus meninjau usulan penunjukan individu dan entitas di Suriah yang memenuhi kriteria penunjukan yang relevan terkait dengan ISIL, Front al-Nusrah, al-Qaeda, atau individu, kelompok, usaha, dan entitas terkait.

33. Menekankan pentingnya semua negara yang relevan dan organisasi internasional yang mempertahankan dan menyediakan informasi mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah sehingga dapat digunakan dalam penyelidikan dan proses peradilan di masa depan.

34. Menyatakan maksudnya untuk meninjau opsi tambahan untuk memastikan akuntabilitas bagi pelaku, penyelenggara, sponsor, atau orang atau entitas yang terlibat dalam penggunaan senjata kimia di Republik Arab Suriah.

35. Menegaskan kembali niatnya untuk menjaga situasi di Republik Arab Suriah dalam tinjauan terus menerus dan menggarisbawahi kesiapannya untuk meninjau setiap saat tindakan yang diberlakukan oleh resolusi ini, termasuk dengan memperkuat, menangguhkan atau mengangkat tindakan tersebut, jika sesuai.

36. Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan pelaksanaan resolusi ini dalam waktu 30 hari setelah diadopsi dan setiap 60 hari sesudahnya.

37. Memutuskan untuk tetap terlibat secara aktif dalam masalah ini.

Merespon resolusi ini, Cina melalui perwakilannya Liu Jieyi berpendapat bahwa konflik di Suriah saat ini tengah memasuki babak baru perundingan damai yang sedang berlangsung, yang menciptakan kesempatan langka untuk menyelesaikan konflik tersebut. Momentum ini harus di konsolidasikan dengan tindakan yg terkoordinasi untuk terus mendorong pihak pihak yang terlibat untuk terus berdialog. Cina juga menentang penggunaan senjata kimia oleh suatu negara, organisasi atau individu, dalam keadaan apapun. Cina pun mendesak hukuman bagi para pelaku. Cina kemudian menganjurkan adanya investigasi bersama yang berdasarkan kriteria objektif dan adil, sebagaimana diuraikan dalam resolusi 2319. Cina berpendapat rancangan ini didasarkan dimana pihak pihak yg terlibat masih memiliki perbedaan pendapat dan dipaksa melakukan voting ,membuat proses solusi damai secara politik di Jenewa terganggu⁸³.

Dari pernyataan tersebut Cina menganggap resolusi ini akan mengganggu berlangsungnya proses solusi politik yang ada, meskipun Cina juga menentang penggunaan senjata kimia dan setuju akan adanya hukuman. Cina menganjurkan adanya penyelidikan lebih lanjut yang objektif dan adil karena dalam lampiran resolusi ini akan memberikan sanksi seperti pada poin 17 kepada pihak pemerintah Suriah saja.

⁸³ Security council,2017,"double veto prevents security council from adopting draft resolution intended to impose sanction fo use of chemical weapons in syria", united natios diakses dari <https://www.un.org/press/en/2017/sc12737.doc.htm> pada 20 nov 2017

4.4 Implikasi Veto Cina

Selama konflik Suriah berlangsung, telah penulis sampaikan bahwa Cina memveto resolusi resolusi yang membahas mengenai sanksi non militer, dan juga penarikan pasukan, serta merujuk kasus ke pengadilan pidana internasional. Selama konflik terjadi pula, hubungan bilateral Cina dan Suriah semakin dekat.

Untuk menjaga perdamaian dunia, dewan keamanan memiliki hak untuk memberikan rekomendasi untuk mengambil langkah dalam memulihkan perdamaian dunia termasuk keputusan yang merujuk pada pasal 41 dan 42 mengenai sanksi militer dan non militer. Di dalam resolusi 2254 mengenai konflik Suriah telah disepakati bahwa tidak ada solusi militer atau sanksi militer yang merujuk pada pasal 42 piagam PBB dalam konflik ini. Tetapi beberapa resolusi masih membahas adanya kemungkinan sanksi non militer merujuk pasal 41 piagam PBB. Dalam pasal 41 piagam PBB dijelaskan bahwa sanksi non militer dapat berupa pemutusan hubungan diplomatik, pembatasan hubungan ekonomi dan finansial, dan pembatasan pergerakan perseorangan maupun kelompok. Pasal 41 berbunyi :

“The Security Council may decide what measures involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include or partial interruption of economic relations and of rail, sea, postal telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations”⁸⁴

⁸⁴ Charter of United Nations Chapter VII. Article 39. Diakses dari <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html> pada tanggal 30 novmber 2017

Pada resolusi pertama pada pertemuan tanggal 4 Oktober 2011, Cina menyatakan ketidak setujuannya akan adanya hal yang dianggap tidak menghormati kedaulatan pemerintah Suriah yaitu adanya poin yang membahas mengenai perintah agar pemerintah Suriah segera mengakhiri kekerasan pada rakyatnya merujuk pada poin 4 yang berisi :

4. Meminta agar pihak berwenang Suriah segera:

- a) menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional yang berlaku, dan bekerja sama sepenuhnya dengan komisar hak asasi manusia;
- (b) memungkinkan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sepenuhnya oleh seluruh penduduknya, termasuk hak kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai, membebaskan semua tahanan politik dan menahan demonstran yang melakukan aksi damai, dan mencabut pembatasan terhadap semua bentuk media;
- (c) menghentikan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil;
- (d) meringankan situasi kemanusiaan di daerah krisis, termasuk dengan memungkinkan akses cepat, tanpa hambatan dan berkelanjutan untuk pemantau hak asasi manusia yang diakui secara internasional, lembaga kemanusiaan dan pekerja, dan memulihkan layanan dasar termasuk akses ke rumah sakit;
- (e) menjamin pemulangan yang aman mandiri pada masyarakat yang telah melarikan diri dari kekerasan menuju rumah mereka;

Cina juga menyatakan ketidak setujuannya yang menganggap sanksi non militer dapat memperburuk situasi seperti pada poin 11⁸⁵ yaitu :

11. Menyatakan maksud untuk meninjau ulang implementasi resolusi resolusi Suriah dalam 30 hari dan mempertimbangkan pilihannya, termasuk tindakan berdasarkan Pasal 41 piagam PBB.

Akibat dari veto yang dilakukan oleh Cina, pihak pemerintah Suriah atau rezim Assad dapat tetap bertahan untuk memerangi pihak oposisi karena perintah penghentian serangan kepada warga sipil dalam resolusi tersebut telah terbatalkan. Pihak pemerintah juga tidak dikenai sanksi non militer yang akan berakibat melemahnya kekuatan pemerintah Suriah karena pemutusan hubungan diplomatik, ekonomi, dan juga pembatasan pergerakan dengan negara lain. Sehingga dengan di vetonya resolusi ini, mengakibatkan pihak pemerintah tetap dapat bertahan memerangi pihak oposisi.

Pada resolusi ke dua pada pertemuan tanggal 28 Februari 2012, Cina menyatakan ketidak setujuannya akan adanya resolusi yang dianggap tidak menghormati kedaulatan pemerintah Suriah. Ketidaksetujuan Cina terdapat pada poin 2 dan 5, kedua poin ini memerintahkan agar pihak pemerintah mengakhiri kekerasan pada rakyatnya⁸⁶. Kedua poin ini berisi :

2. Menuntut agar pemerintah Suriah segera mengakhiri semua pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap orang-orang yang menjalankan

⁸⁵ Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2011/612 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/612 pada 21 november 2017

⁸⁶ Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2012/77 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/77 pada 21 november 2017

hak mereka atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berasosiasi dengan damai, melindungi penduduknya, sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan sepenuhnya melaksanakan resolusi dewan HAM S-16/1, S-17/1, S-18/1 dan resolusi Majelis Umum A / RES / 66/176;

5. Permintaan bahwa pemerintah Suriah, sesuai dengan rencana aksi Liga Negara Arab 2 November 2011 dan keputusannya pada 22 Januari 2012, tanpa penundaan:

- (a) menghentikan semua kekerasan dan melindungi penduduknya;
- (b) membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang wenang karena insiden baru baru ini
- (c) menarik semua angkatan bersenjata dan militer Suriah dari kota kota, dan mengembalikan mereka ke barak rumah asal mereka;
- (d) menjamin kebebasan demonstrasi damai.
- (e) memungkinkan akses dan pergerakan penuh dan tanpa hambatan untuk semua lembaga Liga Arab yang relevan dan media Arab dan internasional di seluruh wilayah Suriah untuk mengetahui kebenaran tentang situasi di lapangan dan memantau insiden yang terjadi, dan
- (f) memungkinkan akses penuh dan tanpa hambatan pada misi pengamat Liga Arab.

Resolusi ini sebenarnya masih memiliki persamaan dengan resolusi pertama tanggal 11 oktober 2011. Sehingga, akibat dari veto yang dilakukan oleh Cina, pihak pemerintah Suriah dapat tetap memerangi pihak oposisi karena

perintah penghentian kekerasan kepada warga sipil dalam resolusi tersebut telah terbatalan.

Pada resolusi ke tiga pada pertemuan tanggal 19 Juli 2012, Cina menyatakan ketidak setujuannya akan hal hal yang dianggap kontraproduktif dan hanya memberi tekanan ke satu pihak dan dianggap tidak sesuai norma dalam hubungan internasional dalam menghormati kedaulatan negara,yaitu pada poin 4 mengenai perintah penarikan pasukan militer pemerintah dari pusat kota dan poin 14 mengenai adanya kemungkinan sanksi non militer hanya pada pihak pemerintah Suriah saja⁸⁷. Kedua poin ini berisi :

4. Memutuskan bahwa pihak berwenang Suriah harus menerapkan komitmen mereka secara jelas dan terukur secara keseluruhan, sebagaimana yang mereka sepakati dalam pemahaman pendahuluan dan sebagaimana ditetapkan dalam resolusi 2042 (2012) dan 2043 (2012), untuk (a) menghentikan pergerakan pasukan menuju pusat penduduk, (b) menghentikan semua penggunaan senjata berat di pusat pusat tersebut, (c) penarikan lengkap konsentrasi militer di dalam dan di sekitar pusat pemukiman penduduk, dan untuk menarik tentaranya dan senjata berat dari pusat pemukiman penduduk ke barak mereka atau tempat penyebaran sementara untuk memfasilitasi penghentian kekerasan yang berkelanjutan.

14. Memutuskan bahwa, jika pemerintah Suriah belum sepenuhnya mematuhi paragraf 4 di atas dalam waktu sepuluh hari, maka akan segera menerapkan tindakan berdasarkan pasal 41 piagam PBB.

⁸⁷ Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2012/5282 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/5382 pada 1 november 2017

Poin ketidak setujuan Cina dalam resolusi ini masih senada dengan resolusi pertama dan kedua tanggal 11 Oktober 2011 dan 4 Februari 2012 , sehingga akibat dari veto ini membuat pemerintah Suriah dapat tetap bertahan untuk berperang melawan pihak oposisi, dan juga pemerintah Suriah tidak dikenai sanksi non militer yang akan berakibat melemahnya kekuatan pemerintah Suriah karena pemutusan hubungan diplomatik,ekonomi,dan juga pembatasan pergerakan.

Pada resolusi ke empat pada pertemuan tanggal 22 Mei 2014, Cina menyatakan ketidak setujuannya pada poin resolusi yang dianggap kontraproduktif dengan solusi politik yang sedang berlangsung seperti membawa kasus tersebut ke ICC atau pengadilan pidana internasional. membawa kasus tersebut ke ICC juga dianggap Cina sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip dasar PBB mengenai menghormati kedaulatan negara,ketidak setujuan Cina yaitu pada poin 2⁸⁸ yang berisi :

2. Memutuskan untuk merujuk situasi di Republik Arab Suriah yang dijelaskan pada ayat 1 di atas sejak Maret 2011 kepada Jaksa *International Criminal Court*.

ICC adalah sebuah lembaga peradilan internasional yang dibentuk untuk mengadili pihak pihak yang melakukan kejahatan serius menurut statuta ICC yaitu genosida , kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi⁸⁹. Pihak PBB sedari awal telah menyebut pihak pemerintah Suriah mencederai hak asasi

⁸⁸ Dokumen resmi dewan keamanan PBB no S/2014/348 diakses dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/348 pada 21 november 2017

⁸⁹ Anonymous,2017,"apa yang dimaksud dengan mahkamah pidana internasional", distio diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-mahkamah-pidana-internasional-international-criminal-court/4628> pada 1 desember 2017

manusia. Hingga di tahun 2014 penyidik PBB merilis laporan yang membuktikan adanya penahanan dan penyiksaan tahanan di penjara. Dalam laporan ini juga membuktikan bahwa pihak pemerintah mencoba menutupi pembunuhan massal terhadap tahanan perang. Laporan tersebut sekaligus mengkonfirmasi beberapa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius yang dituduhkan pada rezim Assad⁹⁰.

Dari laporan yang dirilis tersebut, menurut penulis resolusi ini adalah suatu upaya untuk menghentikan perlawanan pihak pemerintah karena laporan yang dirilis tersebut mengindikasikan pihak pemerintah Suriah melakukan pelanggaran HAM, sehingga akan dapat diadili oleh ICC yang akan berdampak pada melemahnya kekuatan pemerintah Suriah. Oleh karena itu, dengan di vetonya resolusi ini maka pemerintah Suriah atau rezim Assad tetap dapat bertahan melawan pihak oposisi.

Pada resolusi ke lima pada pertemuan tanggal 8 Desember 2016, Cina menyatakan ketidaksetujuannya pada hal yang dianggap tidak mendukung upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Tindakan ini dianggap Cina tidak melengkapi solusi politik yang sedang berlangsung, sehingga permintaan penghentian serangan di kota Aleppo untuk masuknya bantuan kemanusiaan bukanlah hal yang tepat menurut Cina seperti pada poin 1⁹¹ yaitu :

⁹⁰ Rosen armin, 2016, "massive and systemetized violence:the un just released the horrifying reports on assads human rights abuses", bussiness insider singapore diakses dari <http://www.businessinsider.sg/massive-and-systemetized-violence-the-un-just-released-a-horrifying-report-on-assads-human-rights-abuses-2016-2/?r=US&IR=T> pada 1 desember 2017

⁹¹

1. Memutuskan bahwa semua pihak dalam konflik Suriah akan berhenti, 24 jam setelah diadopsinya resolusi ini, setiap dan semua serangan di kota Aleppo, termasuk dengan senjata apapun, termasuk roket, mortir, dan rudal anti-tank, dan termasuk penembakan dan serangan udara, untuk memungkinkan masuknya kebutuhan kemanusiaan mendesak ditangani selama 7 hari dan menyatakan keinginannya untuk mempertimbangkan perpanjangan lebih lanjut untuk periode 7 hari secara berulang, dan menuntut agar semua pihak mengizinkan dan memfasilitasi dengan segera, aman, berkelanjutan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke semua Aleppo oleh PBB dan mitra pelaksananya.

Alepoo adalah kota paling strategis di Suriah yang juga sebagai ibukota negara. Aleppo juga adalah salah satu kota yang dikuasai oposisi maupun teroris dan ingin direbut kembali oleh pihak pemerintah. Kekuasaan pihak pemerintah di kota Aleppo adalah salah satu strategi untuk meredam kekuatan pihak oposisi dengan cara mengepung pihak oposisi, karena kota di sekitar Aleppo telah dikuasai pemerintah. Di kota Aleppo, supply dan logistik pihak pemerintah untuk bertahan di dapatkan dari negara sekutu seperti Rusia. Perebutan wilayah Aleppo bukan hanya melambangkan kekuatan militer tetapi juga simbol kemenangan psikologis, sehingga jika oposisi kalah di kota ini juga akan mengisyaratkan kemungkinan kekalahan mereka di seluruh Suriah. di kota ini, pihak oposisi

memperoleh kesulitan mendapat supply dan logistik untuk bertahan karena telah terkepung⁹².

Pada resolusi ini, penghentian perlawanan akan memberikan kesempatan bagi PBB untuk masuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang artinya akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak oposisi. Hal ini akan berdampak pada semakin kuatnya pihak oposisi itu sendiri, karena selama ini pihak pemerintah berusaha mengepung wilayah Aleppo agar pihak oposisi tidak mendapat supply dan logistik. Sehingga akan semakin sulit untuk dikalahkan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu, dengan di vetonya resolusi ini maka pemerintah Suriah atau rezim Assad tetap dapat bertahan melawan pihak oposisi di kota Aleppo.

Pada resolusi ke enam pada pertemuan tanggal 28 Februari 2017 Cina menyatakan ketidak setujuannya bahwa resolusi ini akan mengganggu berlangsungnya proses solusi politik yang ada, meskipun Cina juga menentang penggunaan senjata kimia dan menyetujui akan adanya hukuman tetapi Cina menganjurkan adanya penyelidikan lebih lanjut yang objektif dan adil karena dalam lampiran resolusi ini akan memberikan sanksi kepada pihak pemerintah Suriah saja⁹³. Sehingga hal ini yang dinilai Cina perlu dilaksanakan penyelidikan lanjut yang objektif dan adil. Sanksi yang dimaksud terdapat pada poin 17 yaitu :

17. Memutuskan bahwa semua negara anggota harus membekukan tanpa menunda semua dana, aset keuangan dan sumber daya ekonomi lainnya di

⁹² Anonymous, 2016, "why Aleppo matters", al jazeera diakses dari https://interactive.aljazeera.com/aje/2016/syria_why_aleppo_matters/index.html pada 1 desember 2017

⁹³

wilayah mereka pada tanggal diadopsinya resolusi ini atau kapanpun setelahnya, yang dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh individu dan entitas yang tercantum dalam lampiran resolusi ini atau ditunjuk oleh komite, atau oleh perorangan atau entitas yang bertindak atas nama mereka atau sesuai arahnya, atau oleh entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh mereka, termasuk melalui tindakan ilegal, dan memutuskan lebih lanjut bahwa semua negara anggota harus memastikan bahwa setiap dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi dicegah dibuat oleh warga negaranya atau oleh individu atau entitas apa pun di dalam wilayah mereka, untuk atau demi kepentingan individu atau entitas yang tercantum dalam lampiran 1 pada resolusi atau individu atau entitas ini. yang ditunjuk oleh komite, atau perorangan atau entitas yang dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang atau entitas yang terdaftar atau ditunjuk atau bertindak atas nama mereka atau atas arahnya.

Pada resolusi ini, pihak PBB pada bagian lampiran mencantumkan pihak pihak yang terlibat penggunaan senjata kimia dan harus dikenakan sanksi adalah hanya pihak pemerintah saja. Sehingga akan sangat merugikan bagi pihak pemerintah Suriah. adanya sanksi non militer tentu saja berdampak pada melemahnya kekuatan pihak pemerintah dalam konflik ini. Oleh karena itu, dengan di vetonya resolusi ini maka pihak pemerintah tidak dapat dikenai sanksi sehingga dapat tetap berperang melawan oposisi.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa veto yang dilakukan Cina bertujuan untuk mencegah pelemahan pihak pemerintah Suriah seperti adanya sanksi, hukuman, dan penghentian serangan. Sehingga veto yang dilakukan Cina juga berdampak untuk mencegah menguatnya pihak oposisi dalam konflik ini. Dengan di vetonya resolusi resolusi tersebut maka pihak pemerintah tidak mendapat tekanan dari PBB, dan dapat tetap memerangi pihak oposisi.

4.2 Dinamika Hubungan Bilateral Cina dan Suriah

Adanya konflik sipil Suriah ternyata merubah dinamika hubungan bilateral antar Cina dan Suriah. Sebelum konflik Suriah terjadi, hubungan bilateral Cina dan Suriah di dominasi oleh isu perdagangan. Di tahun 2006 Cina tercatat menjadi importir terbesar bagi Suriah dikarenakan eksportnya yang meningkat lebih dari 30% di tahun sebelumnya. Di tahun 2007 Suriah secara resmi mengakui status Cina sebagai ekonomi pasar penuh dalam pertemuan ketiga hubungan bilateral *Sino Syrian Joint Committee* yang membawa hubungan ekonomi bilateral kedua negara menuju era baru. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyatakan keyakinan mereka terhadap potensi kerjasama tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral menjadi 3 miliar dolar dalam lima tahun ke depan. Pada tahun 2005, Cina dan Suriah juga menandatangani sebuah perjanjian pariwisata, menjadikan Suriah sebagai tujuan wisata bagi masyarakat Cina⁹⁴.

⁹⁴ Anonymous, 2008, China, Syria steadily promote bilateral cooperation” diakses dari http://www.gov.cn/english/2008-03/31/content_933295.htm pada 21 desember 2017

Hubungan Cina dan Suriah di masa lalu juga minim akan kunjungan diplomatik kepala negara yang mengindikasikan kurang dekatnya hubungan bilateral kedua negara. Presiden Cina Hu Jianto pertama kali berkunjung ke Suriah di tahun 2000 yang sekaligus menjadi kunjungan pertama Cina sejak kedua negara pertama kali membangun hubungan bilateral di tahun 1956. Kemudian, di tahun 2004 presiden Suriah Bassar Al Assad melakukan kunjungan balasan ke Cina yang juga menjadi kunjungan pertama presiden Suriah⁹⁵.

Di tahun 2006, hubungan diplomatik Cina dan Suriah tercatat telah berlangsung 50 tahun. Untuk memperingati 50 tahun berdirinya hubungan diplomatik tersebut, maka kedua negara menggelar serangkaian perayaan khusus yang diadakan di kota Dmaskus, Suriah⁹⁶. Tetapi hal yang berbeda terjadi di tahun 2016 ketika hubungan bilateral kedua negara mencapai 60 tahun di tengah adanya konflik sipil Suriah. Untuk memperingati hal tersebut, kedua negara tidak lagi mengadakan perayaan tetapi menapaki kerjasama yang lebih serius yaitu pemberian bantuan berupa pelatihan kesehatan oleh militer Cina kepada militer Suriah⁹⁷. hal ini mengindikasikan bahwa hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara tersebut semakin dekat.

Dalam sebuah wawancara televisi pun, presiden Suriah Bassar Al Assad menggambarkan bahwa hubungan Suriah dan Cina semakin dekat. Assad

⁹⁵ Anonymous, 2004, "Syria President Al-Assad visits China", chinadaily diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-06/22/content_341612.htm pada 21 desember 2017

⁹⁶ ibid

⁹⁷ Anonymous, 2016, "China military says it is providing medical training for Syria", reuters diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-china/china-military-says-it-is-providing-medical-training-for-syria-idUSKCN1100W5> pada 22 desember 2017

menggambarkan hubungan kedua negara dgn kalimat “*on the rise*” atau sedang meningkat dan juga menyebut Cina sebagai “*real friend*” atau teman sejati. Dalam wawancara itu, Assad bahkan membahas mengenai veto yang dilakukan Cina di bulan Februari 2017 yang akan memberikan sanksi kepada Suriah karena menggunakan senjata kimia kepada warganya, dalam pernyataannya, Assad memuji sikap Cina yang mengutamakan prinsip utama piagam PBB untuk menghormati kedaulatan negara “*In that veto, China has defended first of all the charter, because the United Nations was created in order to restore stability around the world*”⁹⁸”

Diikuti oleh pernyataan Assad berikutnya yang secara terang terangan mengakui bahwa veto yang dilakukan Cina memang menguntungkan bagi Suriah seperti pernyataan berikut “*Of course, Syria was the headline, the main headline. This is good for Syria, but, again, it’s good for the rest of the world*”⁹⁹”

Presiden Bassar Al Assad juga mengakui Cina sebagai *rising power* dan ingin meningkatkan hubungan bilateral diluar sektor formal dikarenakan Cina adalah seorang “kawan sejati” bagi Suriah seperti pernyataannya berikut :

*“It was good, but it’s going to be on the rise because when a country like China proves that it’s a real friend, a friend that you can rely on, it’s very natural to have better relation on the popular level, not only on the formal level.”*¹⁰⁰”

⁹⁸ Taylor adam,2017,”bashar al assad says realtions with china are on the rise”, the washington post diakses dari https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/12/bashar-al-assad-says-relations-between-syria-and-china-are-on-the-rise/?utm_term=.59c8a0d5384b pada 24 desember 2017

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ opcit

Dari berbagai penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa adanya konflik sipil Suriah merubah dinamika hubungan bilateral kedua negara yang awalnya minim isu politik, dan lebih banyak membahas hubungan ekonomi menjadi sarat isu politik dan merubah hubungan kedua negara yang mulanya tidak terlalu dekat menjadi lebih dekat.

BAB V

KEPENTINGAN CINA MEMVETO RANCANGAN RESOLUSI PBB TERKAIT KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2017

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan pembahasan sesuai variabel dan indikator yang penulis jabarkan pada bab II sebelumnya, sesuai dengan konsep kepentingan nasional oleh KJ Holsti yang terdiri dari tiga periode waktu yaitu kepentingan inti, kepentingan jangka menengah, dan kepentingan jangka panjang.

5.1 Kepentingan Inti

Menurut KJ Holsti, kepentingan inti adalah kepentingan mengenai suatu tujuan dimana kebanyakan orang atau dalam konteks ini pemerintah mau melakukan pengorbanan tertinggi untuk mendapatkannya. Kepentingan ini biasanya terletak di bagian paling dasar dari kebijakan luar negeri. Kepentingan inti juga biasanya paling berhubungan dengan pertahanan diri dari unit unit politik. Kepentingan ini tergolong kepentingan jangka pendek karena tujuan negara yang lain tidak akan tercapai jika unit politik didalamnya tidak mampu mempertahankan keutuhan atau keberadaan kesatuan negaranya sendiri. Pertahanan diri pada umumnya berkaitan dengan kesatuan teritori wilayah suatu

negara, tetapi tidak hanya itu, pertahanan diri juga berkaitan dengan kesatuan bangsa seperti etnis¹⁰¹.

Separatisme telah menjadi salah satu masalah besar bagi pemerintah Cina. Di masa lalu, separatisme Taiwan dan Tibet menjadi masalah yang meninggalkan trauma tersendiri. Cina lalu melakukan banyak upaya untuk membendung kekuatan Taiwan seperti mengeluarkan kebijakan *one china policy* untuk membendung pengakuan dunia internasional kepada separatisme Taiwan. Trauma di masa lalu tersebut berdampak kepada upaya Cina untuk lebih ketat melakukan upaya upaya pencegahan gerakan separatis terutama yang berkenaan dengan identitas bangsa¹⁰².

Salah satu masalah separatisme yang dihadapi Cina saat ini adalah separatisme di provinsi Xinjiang dengan etnis Uighur. Etnis Uighur adalah etnis keturunan Turki di Asia Tengah yang penduduknya ber agama Islam. Uighur mengklaim diri mereka memiliki sejarah yang berbeda dengan bangsa Cina. Tetapi Cina mengklaim Xinjiang sebagai wilayahnya dikarenakan nilai nilai strategis yang dimiliki wilayah tersebut. Xinjiang bermakna ‘perbatasan baru’ tetapi etnis Uighur lebih sering menyebut daerah Xinjiang dengan Turkestan Cina, Turkestan Timur atau Uighuristan¹⁰³.

¹⁰¹ ¹⁰¹ Holsti KJ, 1987, "International politics : a framework for analysys third edition" , prentice – hal international inc : new jersey hal 145

¹⁰² Yan Xuetong ,2002"analysis of china national interest", hal 111

¹⁰³ Dian monika,"dinamika kebijakan luar negeri AS terhadap kelompok uighur tahun 2002-2011", tesis : universitas indonesia hal 21-22 diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300150-T30464-Monica%20Dian%20Adelina.pdf> pada 1 desember 2017

Gerakan separatisme di Xinjiang bermula ketika terjadi ketegangan antara etnis Uighur dengan etnis Han, tetapi pemerintah Cina banyak melakukan diskriminasi pada etnis Uighur. Padahal sumber daya alam di provinsi Xinjiang amatlah kaya dan strategis bagi pemerintah Cina. Etnis Uighur merasa diperlakukan tidak adil dengan berbagai aturan yang dibuat pemerintah seperti pelarangan ber ibadah, merobohkan banyak tempat ibadah, menghukum mati tahanan politik, dan lain sebagainya sementara pemerintah Cina terus memanfaatkan sumber daya alam dan nilai strategis di tanah mereka. Misalnya saja jalur pipa yang menghubungkan impor minyak Cina dari Asia Tengah melewati provinsi ini. Tak hanya itu, diskriminasi yang terjadi juga menyangkut masalah ekonomi ketika pemerintah memberi hak lebih kepada etnis Han, dan menghambat etnis Uighur untuk menduduki jabatan strategis. Hal hal inilah yang membuat etnis Uighur melakukan kampanye untuk mengklaim kembali tanah mereka, terutama untuk menghentikan tekanan politis, ekonomi, dan sosial. Gerakan yang awalnya berlangsung damai lama kelamaan berubah menjadi gerakan separatisme sejak terjadi benturan keras antara pemerintah dan etnis Uighur di tahun 1997. Etnis Uighur mulai melakukan serangan serangan pada badan pemerintahan seperti ledakan, pembunuhan, dan kerusuhan¹⁰⁴.

Gerakan separatis ini kemudian berkembang menjadi gerakan terorisme internasional sejak peristiwa 9/11 di Amerika. Di tahun 2001 pemerintah Cina mengklaim gerakan separatisme Xinjiang berhubungan dengan terorisme internasional Osama bin Laden di Afghanistan. Cina juga mengklaim bahwa

¹⁰⁴ Ibid hal 23-34

ETIM(*East Turkistan Islamic Movement*) atau gerakan kemerdekaan Uighur mendapat sokongan dana dari Osama. Sejak itu pihak pemerintah Cina aktif melakukan upaya upaya melawan terorisme internasional. ETIM resmi dianggap organisasi teroris internasional semenjak tahun 2002 pemerintah Amerika memasukkannya ke dalam daftar terorisme yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Selain ETIM, beberapa gerakan pembebasan Xinjiang juga berjuang bersama, seperti Free Turkistan Movement , Free Turkistan Islamic Party, dan lain sebagainya¹⁰⁵.

Cina juga mengklaim separatis Uighur ber afiliasi dengan pemberontak Suriah maupun ISIS di Suriah. Hal ini diketahui sejak 2011 sesaat setelah *Arab Spring* terjadi. Di bulan Juli 2011 terjadi pengeboman di Kishgar, wilayah Xinjiang, dan untuk pertama kalinya pemberontak Uighur mengibarkan bendera salafi yang berwarna hitam dengan tulisan arab, berbeda dengan bendera East Turkestan yang biasanya berwarna biru. Bagi pemerintah Cina, simbol ini bukan lagi sekedar tuntutan kemerdekaan etnis Uighur tetapi deklarasi jaringan jihad internasional¹⁰⁶. Di tahun 2012, pemerintah Cina mengklaim bahwa separatis Uighur terlibat bersama gerakan pemberontak di Suriah melawan rezim yang berkuasa.

Pada tahun 2013 muncul sebuah video yang dirilis militan Uighur yang mengancam bahwa muslim dan Arab akan menyerang perekonomian Cina

¹⁰⁵ Ibid hal 25

¹⁰⁶ Hernandez javier,2015,"Qn A christina lin on china terrorism effort", the new york times diakses dari <https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/asia/china-terrorism-xinjiang-paris-christina-lin.html> pad 26 nov 2017

sebagai balasan karena Cina bersama Rusia dianggap mendukung Assad secara politik dan militer¹⁰⁷. Di tahun 2014 pemimpin ISIS Abu Bakar Al Baghdi merilis video yang menyerukan jihad melawan negara negara yang dianggap merebut hak hak muslim. ISIS juga merilis 20 negara yang dimaksud, dan Cina berada dalam daftar teratas negara negara tersebut. ISIS juga mengancam akan memasukkan wilayah Xinjiang ke dalam wilayah kekalifahannya¹⁰⁸.

Pada tahun 2015 sebanyak 109 militan Uighur di deportasi dari Thailand dan dikirim kembali ke Cina. Imigran gelap Uighur tersebut tengah dalam perjalanan jihad ke Suriah, Turki, ataupun Irak. Imigran Uighur tersebut telah mendapat pelatihan militer selama satu tahun di Thailand dan mereka hendak melakukan perjalanan melalui Thailand dan Malaysia untuk singgah di Turki menuju Suriah¹⁰⁹.

ISIS juga merilis video video propaganda, mereka merilis sebuah video propaganda yang dibintangi oleh anggota tertua mereka, seorang kakek Uighur berusia 80 tahun, yang menggambarkan keputusannya untuk meninggalkan Cina setelah berpuluh-puluh tahun mendapat penindasan dan bergabung dengan ISIS.

¹⁰⁷ Lin Christina, 2015, "Chinese General: Anti-Chinese Uyghurs are in Syria's Anti-Assad Force", ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security issue no 353 hal 2

¹⁰⁸ ibid Hal 3

¹⁰⁹ Charlton corey, 2015, " Hooded and shackled: 100 Chinese Muslims who were 'plotting to join ISIS in Syria' are deported from Thailand", dailymail diakses dari <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3158216/Hooded-shackled-100-Chinese-Muslims-plotting-join-ISIS-Syria-deported-Thailand.html> pada 26 nov 2017

Video yang sama juga menunjukkan anak-anak Uighur yang mengenakan pakaian militer, diwawancarai untuk bergabung dengan ISIS¹¹⁰.

Jihadis Cina di Suriah ternyata tak hanya ber afiliasi dengan ISIS, mereka juga bergabung dengan Partai Islam Turkistan(PIT) di Suriah yaitu pihak oposisi. PIT sebenarnya dianggap nama lain dari ETIM,yaitu gerakan pembebasan Xinjiang yang menganggap etnis Uighur adalah bagian Turkistan Timur. Kelompok jihad ini mempunyai satu tujuan yang sama yaitu menggulingkan pemerintahan Assad yang sekuler dan menggantinya dengan pemerintahan islam. Presiden Suriah Bassar Al Assad ketika diwawancarai oleh stasiun Tv Phoenix di Cina menyatakan bahwa *“they know your country more than the others, so they can do more harm in your country than others”*¹¹¹”

Selain itu duta besar Suriah di Beijing Imad Moustapha juga mengatakan bahwa sebagian pejuang Uighur bertarung untuk mendapatkan kemerdekaannya, sementara sebagian yang lain berjuang bersama pasukan jihad. Ia juga menyatakan bahwa

¹¹⁰Anonymous,2016,”over 100 chinese muslim fighter have joined isis in syria”, chinese portal diakses dari <http://www.chineseportal.net/news/article/over-100-chinese-muslim-fighters-have-joined-isis-in-syria-report-claims> pada 25 november 2017

¹¹¹ Mrou basem, 2017, “Chinese jihadis' growing presence in Syria is stoking concern in Beijing”, bussiness insider UK diakses dari <http://uk.businessinsider.com/ap-chinese-jihadis-rise-in-syria-raises-concerns-at-home-2017-4/?IR=T> pada 25 november 2017

“Our estimated numbers, because of the numbers we fight against, we kill, we capture, we wound, would be around 4-5,000 Xinjiang jihadists. China as well as every other country should be extremely concerned¹¹²”.

Penjelasan diatas membuktikan bahwa etnis Uighur ber afiliasi dengan oposisi Suriah. Baik itu oposisi dari pihak jihadis atau ISIS, ataupun dari pihak oposisi yang lain. Dalam konflik Suriah pihak pihak oposisi ini mempunyai tujuan yang sama yaitu menggulingkan pemerintahan Assad dan ingin mendirikan negara baru ataupun pemerintahan baru.

Cina terbilang sangat serius dalam melakukan upaya pemberantasan separatisme, terorisme dan ekstrimisme di tingkat internasional maupun nasional, sehingga hal ini menjadi salah satu prioritas Cina. Salah satunya dengan mengeluarkan prinsip untuk memerangi *three evils* yaitu ekstrimisme, separatisme, dan terorisme melalui suatu framework SCO (*Shanghai Cooperation Organization*). Sejak tahun 2001 dalam program perencanaan program pembangunan berjangka lima tahun , di bagian 23 tertulis masalah prioritas pembangunan Cina yaitu : dengan serius mempelajari situasi baru dan isu baru yang mengancam stabilitas sosial, menangani konflik dalam masyarakat selama periode baru dengan benar, memastikan stabilitas sosial, dan menindak

¹¹² blanchard ben, 2017, “ Syria says up to 5,000 Chinese Uighurs fighting in militant groups”, reuters diakses dari <https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-china/syria-says-up-to-5000-chinese-uighurs-fighting-in-militant-groups-idUSKBN1840UP> pada 26 november 2017

aktivitas yang memecah etnis, kekuatan ekstremis religius, kegiatan teroris yang kejam, pemujaan dan aktivitas ilegal yang dilakukan atas nama agama¹¹³

Pentingnya untuk melawan terorisme bagi Cina juga diwujudkan dalam pembentukan *Leading Small Group on Counter-Terrorism* di bulan Agustus 2013 sebagai badan penasihat komisi keamanan nasional yang langsung berada di bawah pimpinan Xi Jinping¹¹⁴.

Dari beberapa pidatonya, Xi Jinping juga seringkali mengungkapkan bahwa ia menaruh perhatian yang besar akan Xinjiang, juga menyatakan semua pihak harus memberantas terorisme yang membuktikan bahwa terorisme adalah suatu ancaman bagi pemerintah Cina. Dalam sebuah kongres pemerintah di bulan maret 2017, Xi Jinping mengangkat kemanan dan terorisme sebagai satu bahasan utama, dan memprioritaskan wilayah Xinjiang seperti berikut : “*Maintaining stability in Xinjiang is a political responsibility*,”¹¹⁵”

Xi Jinping juga memberi pernyataan bahwa terorisme adalah prioritas Cina dan menjadi ancaman yang harus diperangi bersama seperti berikut :

¹¹³ Anonymous, 2011, “counter terroris and human rights the impact of SCO”, a human rights china white papper ISBN-10: 0-9717356-0-3 hal 67
http://www.hrichina.org/sites/default/files/publication_pdfs/2011-hric-sco-whitepaper-full.pdf
pada 1 desember 2017

¹¹⁴ Ibid hal 86

¹¹⁵ Pjilips tom, 2017, “ hina: Xi Jinping wants ‘Great Wall of Steel’ in violence-hit Xinjiang”, the guardian diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/11/china-xi-jinping-wants-great-wall-of-steel-in-violence-hit-xinjiang> pada 1 desember 2017

“We have to be clearly aware that in the new situation, our country is facing increasing threats and challenges to our national security and increasing threats to our social stability¹¹⁶,”

“The Chinese public must build a ‘wall of bronze and iron’ to fight terrorism, and “make terrorists become like rats scurrying across a street, with everybody shouting ‘beat them’¹¹⁷”

Penjelasan di atas membuktikan bahwa kelompok oposisi ber afiliasi dengan pemberontak Uighur di Xinjiang dimana Cina menaruh perhatian besar kepada kelompok terorisme yang menjadi ancaman bagi Cina. Resolusi-resolusi yang di veto Cina ber implikasi untuk mencegah pelemahan pihak pemerintah Sedangkan melemahnya pemerintah akan menguatkan pihak oposisi yang berdampak kepada keamanan dalam negeri Cina yaitu afiliasi kelompok separatis Uighur di Suriah juga akan menjadi semakin kuat di tingkat internasional, sementara Cina sendiri berusaha memerangi hal tersebut. Sehingga dengan memveto resolusi tersebut maka pihak pemerintah tetap dapat melanjutkan perang melawan pihak oposisi.

¹¹⁶ Anonymous,2014,” China's president warns against growing threats to national security”, reuters diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-xi-security/chinas-president-warns-against-growing-threats-to-national-security-idUSBREA3P0DW20140426> pada 2 desember 2017

¹¹⁷ ibid

5.2 Kepentingan Jangka Menengah

1. *Economic Betterment Demand*(Tuntutan Perbaikan Ekonomi)

KJ Holsti menjelaskan bahwa negara mempunyai kepentingan jangka menengah yang berupa tuntutan perbaikan ekonomi. Tuntutan ini dapat dicapai melalui tindakan di level internasional. Pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan suatu negara sendirian. Suatu kebijakan diciptakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa kerjasama perdagangan, pemberian bantuan luar negeri, pembukaan pasar, pencarian sumber daya, sumber pasokan, dan lain sebagainya. Pembukaan pasar di luar negeri sangatlah penting bagi kesejahteraan negara¹¹⁸. Dalam konteks veto yang dilakukan Cina dalam konflik Suriah, maka penulis akan melihat bagaimana veto yang dilakukan Cina mampu berkontribusi kepada kesejahteraan ekonomi Cina melalui rencana investasi dan kerjasama perdagangan.

Adanya konflik sipil Suriah yang telah terjadi sejak 2011 mengakibatkan kerugian yang besar bagi Suriah. Sejak terjadinya konflik sipil di tahun 2011, keadaan ekonomi Suriah juga semakin memburuk. Situasi konflik menyebabkan GDP Suriah menurun drastis. Menciptakan lingkungan keadaan ekonomi yang semakin tidak stabil. Di tahun 2010 sebelum konflik terjadi, GDP Suriah adalah sebesar 50 juta dolar Amerika, tetapi setelah 4 tahun konflik berlangsung di tahun 2014, GDP Suriah turun menjadi 16 juta dolar Amerika. Presentase penurunan

¹¹⁸ Holsti KJ, 1987, "International politics : a framework for analysis third edition", prentice – hal international inc : new jersey hal 148

performa ekonomi Suriah sejak 2010 hingga 2014 diperkirakan IMF sebesar 75%, presentase ini tercatat lebih parah jika dibandingkan Jerman dan Jepang pasca perang dunia ke dua yang pada saat itu masing masing mengalami penurunan sebesar 66% dan 25%¹¹⁹. Kerusakan yang terjadi di Suriah bukan hanya penurunan performa ekonomi, tetapi juga kerusakan infrastruktur dan barang modal seperti gedung dan alat berat¹²⁰. IMF juga memperkirakan akan membutuhkan 20 tahun untuk mengembalikan gdp Suriah seperti masa sebelum konflik terjadi¹²¹.

Dengan kondisi demikian, Suriah membutuhkan rekonstruksi pasca konflik di segala bidang untuk mengembalikan gdp dan membangun Suriah kembali seperti masa sebelum konflik terjadi. Untuk mencapai hal tersebut, Suriah membutuhkan investasi maupun bantuan dari berbagai lembaga maupun negara. Cina adalah salah satu negara yang melakukan kerjasama dan investasi pasca konflik di Suriah. Veto yang dilakukan Cina seperti yang telah dijelaskan penulis pada bagian gambaran umum, menciptakan kedekatan antara Cina dan pemerintah Suriah yang juga membuat Cina menjadi salah satu negara yang di prioritaskan Suriah untuk melakukan rekonstruksi pasca konflik yang tentunya membawa keuntungan tersendiri bagi Cina. Hal ini juga dinyatakan melalui duta besar Suriah untuk Cina Imam Mustafa berikut :

¹¹⁹ Philips matt,2016,"the collapse of syrian economy is worse than germany after world war ii", quarts diakses dari <https://qz.com/741432/the-collapse-of-the-syrian-economy-is-worse-than-germany-after-world-war-ii/> pada 2 desember 2017

¹²⁰ Ozmichli samar,2013," Report Shows Impact of War on Syrian Economy", al monitor diakses dari <https://www.al-monitor.com/pulse/business/2013/02/economic-impact-syrian-crisis.html> pada 2 desember 2017

¹²¹ gobat jane,2016,"syria conflist economy, imf working papper : IMF hal 9 diakses dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf> pada 2 desember 2017

“China, Russia and Iran have provided substantial support to Syria during the military conflict, Therefore, it is these three countries that should play a major role in the reconstruction of Syria”¹²²

Pada bulan Februari 2017, Cina dan Suriah melakukan pertemuan di Damaskus membahas hubungan bilateral dan partisipasi Cina dalam proses rekonstruksi di Suriah. Kemudian sejak bulan April 2017, 30 orang pengusaha Cina telah melakukan perjalanan ke Suriah untuk mencari peluang investasi di negara tersebut sebagai bagian dari rekonstruksi ekonomi. Qin Yong, wakil presiden *China-Arab Exchange Association* mengunjungi Suriah tiga kali di tahun 2017, dan menyatakan bahwa sebagian besar pengusaha Cina berasal dari sektor swasta, termasuk barang-barang ekspor-impor, makanan, peralatan listrik dan konstruksi. Qin juga menyatakan bahwa pengusaha Cina justru tidak khawatir dengan keadaan Suriah pada pernyataan berikut *“Many had concerns before arriving in Syria but their impressions of the country were reversed by the end of the tour,”¹²³*

Qin juga menjabarkan bidang usaha yang akan di bidik Cina yang juga menjadi kebutuhan vital Suriah pasca konflik seperti material bangunan dan juga energi terbarukan seperti pada pernyataan berikut :

“Syria has great need of construction materials, such as glass, cement and steel. The utmost priority for Syria is to restore power and the government welcomes hydroelectric power and thermal power projects but these take time. What they need most is new energy, such as solar panels”¹²⁴

¹²² Wanderson robert, 2017, “chinese companies poised help rebuild war-torn syria”, asia times diakses dari <http://www.atimes.com/article/chinese-companies-poised-help-rebuild-war-torn-syria/> pada 2 desember 2017

¹²³ Tiantian bai, 2017, “ china eyes syria rebuild”, sputnik news diakses dari <https://sputniknews.com/business/201709281057764315-china-eyes-syria-rebuild/> pada 2 desember 2017

¹²⁴ ibid

Pada *Syria Day Expo* tahun 2017, dengan dihadiri ratusan pengusaha Cina untuk mengikuti pameran khususnya pengusaha di bidang investasi infrastruktur. Qin Yong mengumumkan bahwa Cina akan menginvestasikan \$ 2 miliar untuk menciptakan kawasan industri di Suriah yang akan mengumpulkan 150 perusahaan Cina¹²⁵. Dalam acara *China-Arab Exchange Association* kedutaan Suriah di Beijing juga mengadakan acara khusus yang mengundang 1000 perwakilan perusahaan China untuk berinvestasi dalam rekonstruksi Suriah. Dalam acara tersebut, duta besar Suriah di Beijing Imad Mustafa mengatakan bahwa perusahaan Cina diharapkan dapat terlibat dalam rekonstruksi di masa depan dan pemerintah Suriah akan memberikan prioritas utama pada perusahaan Cina dalam kesempatan investasi dan rekonstruksi¹²⁶.

Cina dalam kerangka pembangunan *China Peacefull Development* mencantumkan bahwa akan meningkatkan investasi ke luar negeri dan perdagangan internasional dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan, utamanya dengan negara negara berkembang, mendorong perusahaan dari semua jenis untuk melakukan investasi luar negeri, membuat investasi terkait litbang dan melakukan kontrak proyek di luar negeri dan menyediakan layanan tenaga kerja. dan memperdalam kerjasama yang saling

¹²⁵ Anonymous, 2017, "long term strategy: chinese firm eager to see syria part of silk road project", sputnik news diakses dari <https://sputniknews.com/middleeast/201707241055829804-china-investment-syria-infrastructure/> pada 3 desember 2017

¹²⁶ Gao charlote, 2017, "why china wants syria in its new belt and road", the diplomat diakses dari <https://thediplomat.com/2017/11/why-china-wants-syria-in-its-new-belt-and-road/> pada 3 desember 2017

menguntungkan dengan negara lain dalam pengembangan energi dan sumber daya lainnya¹²⁷.

Dari penjelasan dan tindakan Cina tersebut, penulis melihat bahwa rencana rencana investasi Cina di Suriah adalah suatu cara Cina untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yang tertuang dalam *China Peacefull Development* untuk meningkatkan investasi di luar negeri khususnya di negara negara berkembang dalam kasus ini adalah Suriah sehingga tercipta pembangunan dunia bersama.

Terkait bantuan luar negeri, Cina merupakan negara yang memberikan bantuan luar negeri dalam konflik Suriah, sehingga terkait vetonya Cina bukanlah negara yang mendapat keuntungan dari bantuan luar negeri. Sejak tahun

2. Increase State Prestige(Meningkatkan Nama Baik)

Yang tergolong kepentingan jangka menengah adalah meningkatkan nama baik negara di tingkat internasional. Menurut KJ Holsti upaya upaya ini dapat berupa seremonial diplomatik, meningkatkan kapabilitas militer,kemajuan teknologi. Negara-negara yang mempunyai power juga dapat melakukan berbagai tindakan maupun membuat berbagai kebijakan di tingkat internasional untuk meningkatkan nama baiknya¹²⁸. Pada variabel ini penulis akan membahas berbagai tindakan baik berupa inisiasi,upaya diplomatik, ataupun keterlibatan

¹²⁷ Anonymous,2011,"china issues white paper on peaceful development",ministry of forein affair of the people's republic china diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/whitepaper_665742/t856325.shtml pada 6 desember 2017

¹²⁸ Holsti KJ, 1987 , "International politics : a framework for analysys third edition" , prentice – hal international inc : new jersey hal 148

Cina dalam upayanya untuk menjadi mediator dalam solusi politik pada konflik Suriah.

Salah satu kesepakatan yang didukung dewan keamanan PBB dalam konflik Suriah adalah adanya solusi secara politik. Sejak tahun 2011 dan 2012 Cina sendiri telah aktif menyuarakan pendapatnya untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mempromosikan resolusi secara politik. Dalam setiap veto yang diberikan pun, Cina selalu memberikan pernyataan bahwa rancangan rancangan resolusi yang di veto dianggap bukan solusi terbaik dalam konflik Suriah, solusi yang terbaik adalah solusi politik. Tingginya komitmen Cina tentunya diiringi dengan upaya Cina untuk terlibat dalam upaya penyelesaian secara politik, khususnya peran Cina sebagai mediator konflik. Hal ini juga sebagai hasil dari desakan Cina pada dewan PBB hingga dewan keamanan mengeluarkan resolusi 2254 bahwa "tidak ada solusi militer" terhadap konflik ini dan bahwa "negosiasi politik" adalah solusi yang tepat. Masa depan Suriah harus diputuskan secara independen oleh rakyatnya dan proses politiknya harus dipimpin oleh rakyat Suriah¹²⁹.

Upaya Cina untuk menjadi mediator dalam proses perdamaian Suriah telah dimanifestasikan dalam berbagai upaya diplomatik. Yang pertama, Cina menjadi tuan rumah perwakilan pemerintah Suriah dan pasukan oposisi sebagai bagian dari upayanya untuk mempromosikan perundingan damai dan penyelesaian

¹²⁹ Qinyun wang, 2016," China looks to mediate Syria's civil war, chinadaily.com.cn diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/07/content_22985419.htm pada 3 desember 2017

politik¹³⁰. Salah satu keterlibatan Cina pada bulan November 2015 dalam *Vienna peace talks for Syria*. *Vienna peace talks* adalah sebuah negosiasi antar negara yang terjadi di Vienna Austria yang awalnya dimulai pada oktober 2015 dengan dihadiri oleh para menteri luar negeri untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Yang berpartisipasi dalam negosiasi ini adalah 20 negara dan organisasi internasional, yang salah satunya adalah Cina. Dalam pertemuan yang digelar pada bulan november tersebut, pada awalnya masih terdapat ketidaksepakatan antara negara negara barat dan Arab Saudi yang berpendapat untuk mengusulkan penurunan rezim paksa, sementara Cina dan Rusia menyuarakan pendapatnya untuk mengadakan pemilu sebagai solusi politik¹³¹. Cina juga menjadi satu dari 19 negara yang menetapkan *International Syria Support Group*(ISSG). ISSG adalah kelompok negara negara yang dibentuk untuk menemukan solusi diplomatik dalam konflik Suriah, ISSG dibentuk pada saat diselenggarakannya *Vienna peace talks*¹³².

Pada bulan Desember 2015, Cina menyampaikan melalui menteri luar negerinya Wang Yi bahwa Cina ingin mengundang kedua belah pihak yang berkonflik dalam krisis Suriah yaitu pihak pemerintah dan pihak oposisi untuk mengadakan pertemuan untuk melakukan perundingan sebagai bagian dari upaya

¹³⁰ Mordai chaziza,2016,"syria's civil war : stage for greater chinese involvement in the middle east", Middle East Review of International Affairs, Vol. 20, No. 2 hal 9 diakses dari <http://www.rubincenter.org/2016/09/syrias-civil-war-stage-for-greater-chinese-involvement-in-the-middle-east/> pada 3 desember 2017

¹³¹ Konierski lukas,2016,"the syria peace process-a chance to end conflict",pulaski policy papper ISSN 2080-8852 hal 4 diakses dari https://pulaski.pl/wp-content/uploads/2015/02/Pulaski_Policy_Paper_No_02_16_EN.pdf pada 3 desember 2017

¹³² Anonymous,2016,"the international syria support group",the syria institiute diakses dari <http://syriainstitute.org/wp-content/uploads/2016/06/ISSG-Cheat-Sheet-Secure.pdf> pada 3 desember 2017

Cina untuk mempromosikan penyelesaian konflik secara politik. Cina menawarkan diri menjadi tuan rumah perundingan damai antara kedua belah pihak. Hal ini terjadi setelah disepakatinya resolusi 2254 yang menyatakan perundingan antara pemerintah dan kelompok oposisi akan dimulai bulan januari 2016¹³³.

Dilanjutkan pada bulan januari 2016 Cina melalui menteri luar negerinya Wang Yi mendesak pihak oposisi di Suriah untuk berpartisipasi dalam dialog damai dan negosiasi tanpa prasyarat apapun. Hal itu disampaikan ketika Cina berusaha melakukan *lobbying* pada salah satu pihak pemimpin oposisi. Pertemuan Cina dengan beberapa pihak oposisi berselang dua minggu setelah sebelumnya di akhir bulan desember 2015 Cina bertemu dengan menteri luar negeri Suriah Walid Al Moualem. Hal ini menunjukkan keseriusan Cina melalui upayanya untuk menjadi mediator dan tuan rumah dalam upaya solusi secara politik pada konflik Suriah¹³⁴. Setelah itu pada bulan maret 2016 Cina menunjuk utusan khusus Xie Xiaoyan untuk membantu menengahi konflik di Suriah. Xie Xiaoyan kemudian bertemu dengan pihak pemerintah Suriah seperti perdana menteri, dan menteri luar negeri untuk menekankan komitmennya dalam membantu menyelesaikan konflik

¹³³ Tiezzi shanon, 2015, "china will invite syrian government opposition for peace talks", the diplomat diakses dari <https://thedi diplomat.com/2015/12/china-will-invite-syrian-government-opposition-for-peace-talks/> pada 4 desember 2017

¹³⁴ Qinyun wang, 2016, "china looks to mediate syria civil war", chinadaily diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/07/content_22985419.htm pada 4 desember 2017

secara politik. Ini menunjukkan tekad Cina untuk meningkatkan keterlibatan diplomatiknya dalam konflik Suriah¹³⁵.

Selanjutnya, tindakan yang dilakukan Cina untuk meningkatkan nama baiknya adalah keterlibatannya dalam konferensi Jenewa I,II,III,dan IV sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik Suriah secara politik. Pada bulan juni 2012, Cina terlibat pada konferensi Jenewa I. Pada konferensi Jenewa I negara-negara dengan kekuatan utama dunia berupaya mencari penyelesaian konflik Suriah. Pada konferensi ini masih terdapat perbedaan pendapat akan cara penyelesaian konflik. Beberapa negara khususnya negara-negara barat dan Arab Saudi masih menginginkan upaya penurunan Assad walaupun di tingkat dewan keamanan solusi serupa telah di veto oleh Cina dan Rusia. Pada konferensi ini pun, masih terdapat perbedaan pendapat. Cina dan Rusia masih menyerukan pendapatnya untuk menggunakan solusi politik. Konferensi Jenewa I dinilai tidak menemukan kesepakatan dikarenakan adanya ketidaksetujuan dari perwakilan pihak oposisi, juga perbedaan antara negara-negara yang hadir¹³⁶.

Pada bulan Januari tahun 2014, Cina berpartisipasi dalam konferensi Jenewa II yang digelar di Montreux, Swis. Konferensi ini dihadiri oleh 40 negara yang berkomitmen untuk terlibat dalam proses perdamaian di Suriah. Cina juga menjelaskan mengenai posisi dan usulannya dalam menyelesaikan masalah

¹³⁵ Anonymous,2016," Special Envoy of the Chinese Government on Syrian Issue Xie Xiaoyan Visits Syria",ministry of foreign affairs of the people's republic of China diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1358513.shtml pada 5 desember 2017

¹³⁶ Nick cumming,2012," Talks Come Up With Plan for Syria, but Not for Assad's Exit", the new york times diakses dari <http://www.nytimes.com/2012/07/01/world/middleeast/future-of-syria-on-agenda-as-countries-gather-in-geneva.html> pada 5 desember 2017

Suriah. Pada konferensi inilah pertamakalinya pihak pemerintah dan oposisi duduk bersama dalam satu meja perundingan. Cina kembali menekankan bahwa solusi politik adalah yang terbaik, serta sikap Cina adalah netral, tidak memihak secara parsial ataupun penuh pada pihak manapun. Cina menyatakan maksudnya untuk memfasilitasi perdamaian dan rekonsiliasi. Melalui menteri luar negerinya Wang Yi, Cina juga menyatakan bahwa tindakan militer sudah dianggap gagal dalam solusi ini, karena bukan solusi terbaik. Cina mengharapkan berbagai pihak dari Suriah untuk tetap pada melakukan resolusi politik, sehingga menemukan jalan tengah yang sesuai dengan situasi nasional Suriah dan mencakup kepentingan kedua belah pihak.¹³⁷

Menjelang persiapan konferensi Jenewa III tahun 2016, Cina menyatakan posisinya dalam konflik ini melalui menteri luar negerinya Wang Yi bahwa Cina tetap menekankan solusi politik dengan pernyataan berikut :

“China’s position is very clear. We believe Syria’s future, its national system, including its leadership, should be decided and set by the people of Syria. China’s role on the Syrian issue is to promote peace and negotiations .China hopes to see peaceful, stable and developing Middle East”¹³⁸

Konferensi Jenewa III rencananya diadakan pada tanggal 25 Januari 2016 di Jenewa , konferensi ini terpaksa ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2016, Kemudian perundingan baru berlangsung pada 14 Maret

¹³⁷ Anonymous,2012,” wang Yi Attends Geneva II Conference on The Syrian Issue “ ,consulate general of the people republic of china in sydney diakses dari <http://sydney.chineseconsulate.org/eng/zgxw/t1124570.htm> pada 7 desember 2017

¹³⁸ Blanchard bem,2016,” Syria ready to take part in Geneva peace talks: minister”, reuters diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/syria-ready-to-take-part-in-geneva-peace-talks-minister-idUSKBN0U70BC20151224> pada 7 desember 2017

2016. Tetapi konferensi Jenewa III tidak dapat dilanjutkan dikarenakan adanya tuntutan dari pihak oposisi untuk menghentikan perundingan karena adanya agresi yang meningkat di wilayah sipil¹³⁹.

Selanjutnya pada bulan Februari hingga Maret tahun 2017, Cina berpartisipasi pada perundingan Jenewa IV yang kembali membahas mengenai solusi dalam konflik Suriah. Pada konferensi tersebut dicapai kesepakatan bahwa negosiasi adalah satu satunya cara untuk mengakhiri konflik. Para pihak yang hadir juga menerima bahwa resolusi 2254, yang diadopsi oleh Dewan Keamanan pada tahun 2015, akan menjadi landasan untuk negosiasi lebih lanjut. Resolusi tersebut memberikan dasar bagi transisi politik yang berfokus pada tiga hal, termasuk tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, sebuah konstitusi baru dan pemilu yang diawasi PBB¹⁴⁰.

Sebagai kelanjutan dari konferensi Jenewa, Cina kembali berpartisipasi dalam sebuah perundingan yang dikenal dengan *Astana Talks* yang diselenggarakan di kota Astana, Kazakstan. Perundingan Astana membahas kesepakatan kemungkinan gencatan senjata dan penetapan zona de eskalasi dengan tiga negara Iran, Rusia, dan Turki sebagai negara penjamin. Perundingan Astana sebenarnya telah lama diselenggarakan sejak awal Februari 2017 sebagai pendukung konferensi Jenewa, tetapi Cina baru bergabung pada pertemuan ke

¹³⁹ Anonymous, 2016, " Syria war: UN envoy opens peace talks in Geneva", aljazeera diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/2016/03/syria-war-envoy-opens-peace-talks-geneva-160314093532404.html> pada 10 desember 2017

¹⁴⁰ Malik sajad, 2017, " Geneva IV and ray of hope for Syrian peace" , china.org.cn diakses dari http://www.china.org.cn/opinion/2017-03/09/content_40434364.htm pada 11 desember 2017

enam. Ini menunjukkan bahwa Cina ingin selalu turut berpartisipasi dalam setiap upaya dan proses solusi politik di Suriah. Cina bergabung sebagai pengamat pada bulan September 2017, kemudian dapat berpartisipasi pada perundingan damai satu bulan setelahnya pada bulan Oktober. Cina melalui perwakilannya Hua Chunying juga menyatakan dukungannya dalam negosiasi ini

"We hope that positive results will be achieved during the next round of the Astana talks. The Chinese side supports all efforts that contribute to a political settlement of the Syrian crisis, and we are ready to play a constructive role for this,"¹⁴¹

Di bawah presiden Xi Jinping, Cina mempunyai formula baru terkait prinsip kebijakan luar negerinya yaitu *China Peaceful Development* yang diperbarui dari prinsip yang sama di bawah presiden sebelumnya, Hu Jianto. *China Peaceful Development* adalah sebuah pengembangan Cina melalui penegakan perdamaian dunia yang juga berkontribusi pada pembangunannya sendiri. Pembangunan yang dimaksud adalah dengan cara melakukan reformasi dan inovasi, mencari keuntungan bersama dan melakukan pembangunan bersama dengan negara negara lain sesuai dengan tren globalisasi ekonomi, dan harus bekerja sama dengan negara negara lain untuk membangun dunia secara damai, harmonis dan mementingkan kemakmuran bersama¹⁴².

¹⁴¹ Yi yang, 2017, "Astana process on Syria considers involving new members: Russian representative", xinhua.net diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/15/c_136611793.htm pada 6 desember 2017

¹⁴² Anonymous, 2011, "China issues white paper on peaceful development", ministry of foreign affairs of the people's republic of China diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/whitepaper_665742/t856325.shtml pada 6 desember 2017

Salah satu cara Cina untuk mewujudkan *China Peaceful Development* adalah mendorong adanya pembangunan dunia yang harmonis. Semua negara di dunia, baik besar maupun kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin, adalah anggota masyarakat internasional yang setara dan harus mendapat penghormatan dari masyarakat internasional. Urusan dalam negeri suatu negara harus diputuskan oleh rakyatnya sendiri, Semua negara di dunia, baik besar maupun kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin, adalah anggota masyarakat internasional yang setara dan harus mendapat penghormatan dari masyarakat internasional. Negara negara juga harus melindungi peran inti PBB dalam menangani urusan global, mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB¹⁴³.

Menurut penulis, adanya *China Peaceful Development* sendiri adalah suatu cara Cina untuk menunjukkan bahwa Cina adalah negara yang menjunjung tinggi perdamaian di tingkat internasional, yang sbagaimana dijelaskan di atas untuk mencapai perdamaian dunia tersebut Cina mempunyai prinsip untuk menghargai kedaulatan negara. Sehingga berbagai tindakan diplomatik yang dilakukan Cina dalam keterlibatannya untuk mendorong solusi politik dalam konflik Suriah dan juga berkaitan dengan alasan veto Cina di tingkat PBB adalah salah satu cara untuk mewujudkan upaya Cina meningkatkan nama baiknya di tingkat internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian di tingkat internasional sesuai yang tercermin dalam prinsip luar negerinya.

¹⁴³ ibid

Upaya Cina dalam meningkatkan nama baik yang berikutnya berkaitan dengan peningkatan kapabilitas militer. Pada tanggal 16 Agustus 2016 Cina melakukan kunjungan ke Suriah., ditengah kunjungan tersebut Cina mengumumkan bahwa Cina ingin memberikan pelatihan personil dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Suriah Bashar al-Assad. Pengumuman ini terjadi hanya beberapa hari setelah perjalanan Cina ke Damaskus. Hal ini juga menandai ulang tahun ke 60 hubungan kedua negara. RADM Guan, yang merupakan direktur kantor kerjasama militer internasional komisi militer pusat Cina, juga berkomitmen untuk memperbaiki hubungan kerja sama militer, termasuk pelatihan, dan berjanji untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Komitmen terhadap pertukaran militer dan pelatihan menunjukkan bahwa Cina dapat meningkatkan perannya dalam konflik ini. Pada akhir Desember, Cina menyetujui undang undang anti terorisme yang secara eksplisit melegalkan penggunaan pasukan khusus dan unit lainnya di luar negeri, jika disetujui oleh komisi militer pusat¹⁴⁴.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab IV, bahwa semenjak terjadinya konflik Suriah, hubungan Cina dan Suriah menjadi semakin dekat. Sebelumnya, kedua negara tidak pernah menjalin kerjasama militer, begitupun juga Cina tidak pernah memberikan bantuan pelatihan militer. Tetapi saat konflik terjadi, Cina memberikan pelatihan untuk memerangi terorisme yang juga menjadi pihak oposisi dari rezim Assad. Peningkatan kekuatan militer menjadi salah satu

¹⁴⁴ Wood peter, 2016, "chinese military promises aid to syria", jamestown foundation diakses dari <https://jamestown.org/program/chinese-military-promises-aid-to-syria/> pada 1 februari 2018

kepentingan Cina yang tertuang dalam kongres lima tahunan partai komunis pada bulan Oktober 2017. Dalam kongres tersebut, Xi Jinping menyampaikan bahwa Cina sedang dalam langkahnya untuk menjadi pemimpin global tahun 2050 yang akan berjaya di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, militer, dan lingkungan¹⁴⁵. Dari kongres tersebut dapat diketahui bahwa Cina ingin menjadi negara yang menguasai dan kuat di berbagai bidang, salah satunya militer. Sehingga yang dilakukan Cina dalam konflik Suriah adalah bagian dari upaya meningkatkan nama baiknya di tingkat internasional agar dipandang sebagai negara yang mempunyai kapabilitas militer yang kuat.

Menurut penulis kontribusi Cina dalam bidang militer ini tidak begitu kuat sebagai upaya meningkatkan nama baiknya di tingkat internasional, karena Cina sebelumnya telah berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan menghormati kedaulatannya. Berbeda dengan AS dan Rusia sebagai dua negara besar yang secara langsung mengirim pasukan militernya ke Suriah untuk berperang melawan ISIS seperti yang terjadi pada tanggal 17 September 2016 ketika koalisi AS Inggris, Denmark dan Australia menyerang sebuah pangkalan militer Suriah di Deir Ezzor milik ISIS¹⁴⁶. Keterlibatan Rusia sendiri dimulai sejak tahun 2015 saat Rusia diminta langsung oleh presiden Assad

¹⁴⁵ Khan shehab, 2017, "China reveals plan to become world's biggest superpower within 30 years", independent diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-global-leader-national-congress-xi-jinping-worlds-biggest-superpower-within-30-years-a8012841.html> pada 2 februari 2018

¹⁴⁶ Ciezadlo annia, 2016, "The U.S. Has Intervened In Syria, But Not In The Way You Think", huffington post. diakses dari https://www.huffingtonpost.com/entry/syria-us-intervention_us_581e4733e4b0aac62484def4 pada 11 februari 2018

untuk memerangi pemberontakan ISIS, pencapaian Rusia dalam intervensi ini cukup banyak seperti penangkapan kembali Palmyra dari ISIS pada bulan Maret 2016, merebut kembali kota utama Aleppo pada bulan Desember 2016, melanggar pengepungan Deir selama tiga tahun ez-Zor dan membangun kontrol penuh atas kota tersebut pada bulan November 2017, penerbangan Rusia juga telah melakukan 19.160 misi tempur¹⁴⁷. Jika melihat fakta tersebut kontribusi Cina dalam hal kapabilitas militer dalam konflik Suriah tidak cukup kuat untuk menjadi suatu upaya meningkatkan nama baiknya.

Upaya meningkatkan nama baik yang berikutnya adalah berakitan dengan pemberian bantuan luar negeri. Sejak terjadinya konflik Suriah, Cina adalah salah satu negara yang memberikan bantuan kemanusiaan maupun pembangunan untuk Suriah. tahun 2016, Cina berkomitmen akan menyumbangkan 10.000 ton makanan untuk membantu meringankan kekurangan pangan di antara pengungsi Suriah, PBB dan negara-negara di kawasan tersebut mengatakan bahwa mereka memerlukan bantuan \$ 9 miliar pada tahun 2016 karena situasi di dekat Suriah semakin memburuk. Tidak hanya itu, pada pertemuan puncak G20 tahun lalu, Presiden Cina Xi Jinping mengumumkan bantuan kemanusiaan 100 juta dolar AS untuk membantu memperbaiki kondisi kehidupan para pengungsi dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, saat berkunjung ke Timur Tengah bulan lalu Xi Jinping juga menjanjikan 230 juta yuan bantuan kemanusiaan tambahan kepada

¹⁴⁷ Anonymous, 2016, "Russia's military action in Syria – timeline", the guardian diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2016/mar/14/russias-military-action-in-syria-timeline> pada 14 februari 2017

masyarakat Suriah, Yordania, Lebanon, Libya dan Yaman¹⁴⁸. Kemudian tahun 2017, pemerintah Cina dan Suriah menandatangani dua kesepakatan di mana Cina akan menyediakan dua gelombang penyaluran bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Suriah senilai 16 juta dolar AS. Cina juga telah menandatangani tiga perjanjian dengan pemerintah Suriah untuk memberikan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 40 juta dolar¹⁴⁹. Dalam pertemuan tersebut presiden Cina Xi Jinping juga menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajiban internasional yang dimiliki Cina dalam memberikan bantuan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan bantuan luar negeri kepada Suriah adalah menjadi satu kepentingan Cina di tingkat internasional seperti pernyataan berikut :

"We sympathize with the Syrian people for what has befallen their country, and we are signing this agreement with the aim of bolstering friendship between the Chinese and Syrian peoples and to fulfill the international obligations and responsibilities"¹⁵⁰

Bantuan yang diberikan Cina juga disalurkan melalui berbagai organisasi internasional seperti ICRC, WHO, dan WFP. Selama lebih dari enam tahun terjadinya konflik, Cina telah terlibat dalam mengurangi krisis kemanusiaan di Suriah melalui kerja sama dengan organisasi internasional maupun penyaluran langsung. Pada bulan Mei 2017, Cina menyumbangkan 1 juta dolar AS bantuan ke ICRC untuk mendukung operasi bantuan kemanusiaan di Suriah, termasuk

¹⁴⁸ Anonymous, 2016, "China pledges more aid for Syrian refugees", brics post. Diakses dari http://thebricspost.com/china-pledges-more-aid-for-syrian-refugees/#.WpjMR6hl_IU

¹⁴⁹ Gao charlotte, 2017, "why china wants syria in its new belt and road", the diplomat diakses dari <https://thedi diplomat.com/2017/11/why-china-wants-syria-in-its-new-belt-and-road/> pada 14 februari 2017

¹⁵⁰ Anonymous, 2016, "China to donate humanitarian aid to Syria", china embaasy.org diakses dari http://www.china.org.cn/world/2017-02/05/content_40227384.htm pada 15 februari 2018

menyediakan air bersih, makanan, tempat penampungan sementara dan perawatan medis untuk pengungsi¹⁵¹.

Penjelasan diatas menunjukkan tingginya komitmen Cina dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Suriah, hal itu juga diakui Cina sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusinya kepada dunia internasional. Tetapi menurut penulis hal ini kemudian tidak menjadi suatu kepentingan yang dilakukan Cina terkait vetonya, dimana seperti dijelaskan pada bab IV, veto yang dilakukan Cina bertujuan untuk mempertahankan rezim Assad. Sebaliknya, negara negara yang berseberangan posisi dengan Cina di DK PBB juga memberikan bantuan luar negeri kepada Suriah seperti Amerika yang sejak 2011 hingga 2017 telah memberikan bantuan sebanyak 7,1 miliar dolar AS yang tersebar di berbagai jalur, negara, dan organisasi internasional¹⁵². Begitu juga perancis yang juga berseberangan posisi dengan Cina di DK PBB juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk Suriah. di awal tahun 2016, Perancis mengumumkan akan memberikann lebih dari 1 miliar euro untuk untuk periode 2016-2018 setelah sebelumnya Setelah tambahan 100 juta euro yang dikeluarkan pada akhir tahun 2015 untuk mendukung pekerjaan lembaga kemanusiaan, 200 juta euro untuk

¹⁵¹ Xue quanmu, 2017, "China to continue relief aid to alleviate Syrian people's suffering: envoy", xinhuanet. Diakses dari http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/31/c_136716070.htm pada 1 februari 2018

¹⁵² Anonymous, 2017, "U.S. Humanitarian Assistance in Response to the Syrian Crisis", US Departement of state. Diakses dari <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274360.htm> pada 1 februari 2018

periode 2016-2018 akan dimobilisasi untuk mendukung kaum muda dan pendidikan, terutama di Lebanon¹⁵³.

3. *Self Extention* (Perpanjangan Diri)

Perluasan diri berkaitan dengan ekspansi bagaimana suatu negara memenuhi kebutuhan strategis, ekonomi, politik, maupun sosialnya walaupun kebutuhan itu berada di luar wilayah negaranya. Menurut *self extension*, negara melakukan perpanjangan diri karena hal hal tersebut tidak dapat dicapai dengan kerjasama biasa, maupun diplomaasi¹⁵⁴.

Seperti penulis jelaskan pada bab IV bahwa tindakan veto Cina membuat hubungan Cina dan Suriah menjadi semakin dekat. Kedekatan ini kemudian dimanifestasikan dengan diprioritaskannya Cina sebagai salah satu negara yang terlibat dalam upaya rekonstruksi pasca konflik di Suriah yang dinyatakan oleh duta besar Suriah untuk Cina Imam Mustafa

“China, Russia and Iran have provided substantial support to Syria during the military conflict, Therefore, it is these three countries that should play a major role in the reconstruction of Syria”¹⁵⁵

Cina telah melakukan berbagai upaya kerjasama dan investasi dalam rangka membangun Suriah pasca konflik, sedangkan terkait perpanjangan diri, Cina

¹⁵³ Anonymous, 2016, “France to provide over €1 billion in Syria aid”, france embassy in UK diakses dari <https://uk.ambafrance.org/France-to-provide-over-EUR1-billion-in-Syria-aid>

¹⁵⁴ Holsti KJ, 1987, “International politics : a framework for analysys third edition”, prentice – hal international inc : new jersey hal 150

¹⁵⁵ Anderson robert, 2017, “ Chinese companies poised to help rebuild war-torn Syria”, asia times diakses dari <http://www.atimes.com/article/chinese-companies-poised-help-rebuild-war-torn-syria/> pada 8 desember 2017

mewujudkannya dalam pencarian jalur perdagangan yaitu pembentukan OBOR(*One Belt One Road*). Pada bulan Mei 2017, presiden Cina Xi Jinping mengadakan forum selama dua hari yang membahas inisiasi jalur perdagangan, *One Belt One Road* (OBOR). Sebuah proyek besar yang mencakup lebih dari 68 negara, OBOR bertujuan untuk menciptakan jalur sutera baru dari Cina ke Eropa Barat yang diproyeksikan akan meningkatkan perdagangan sebesar \$ 2,5 triliun selama dekade berikutnya. Untuk menopang jalur perdagangan baru ini, Cina telah mengambil peran yang lebih aktif di Asia Tengah dan Timur Tengah termasuk Suriah. Kemudian dalam forum itu, sekitar 130 negara mengirim perwakilan di antaranya seorang menteri dari Suriah. Adanya OBOR dapat mendorong akses Cina ke pasar luar negeri setelah konflik mereda¹⁵⁶.

Pada bulan September, saat menghadiri sidang majelis umum PBB, menteri luar negeri Cina Wang Yi secara langsung meminta wakil perdana menteri Suriah dan menteri luar negeri Walid Muallem untuk bergabung dengan OBOR Cina karena posisi Suriah yang amat penting seperti dalam pernyataannya :

“Syria is an important node in the ancient Silk Road and that the ‘Belt and Road’ construction can serve as an important opportunity for bilateral cooperation in future.”¹⁵⁷

Xi Jinping dalam sebuah pidatonya juga menyatakan bahwa jalur sutera adalah jalan kemakmuran, dengan pembangunan industri adalah fondasinya.

¹⁵⁶ Brenan sam, 2017, “China’s Middle Eastern intervention: Sino-Syrian cooperation”, foreign brief diakses dari <https://www.foreignbrief.com/asia-pacific/china/chinas-middle-eastern-intervention-sino-syrian-cooperation/> pada 20 november 2017

¹⁵⁷ Gao charlotte, 2017, “why china wants syria in its new belt and road”, the diplomat diakses dari <https://thedi diplomat.com/2017/11/why-china-wants-syria-in-its-new-belt-and-road/>

Konektivitas infrastruktur merupakan fondasi pembangunan sehingga harus didukung dengan konektivitas darat, maritim, udara dan *cyberspace*. Memusatkan pembangunan pada jalur utama, dan menghubungkan jaringan jalan raya, kereta api dan pelabuhan laut. Tujuan membangun enam koridor ekonomi utama di bawah koridor OBOR telah ditetapkan, dan harus dicapai. Seperti pernyataannya berikut :

“we should build the Belt and Road into a road of prosperity. Development holds the master key to solving all problems. Infrastructure connectivity is the foundation of development through cooperation. We should promote land, maritime, air and cyberspace connectivity, concentrate our efforts on key passageways, cities and projects and connect networks of highways, railways and sea ports. The goal of building six major economic corridors under the Belt and Road Initiative has been set, and we should endeavor to meet it”¹⁵⁸,

Dari penjelasan tersebut, pembangunan OBOR adalah suatu hal penting yang ingin dicapai Cina. Sehingga dimasukkannya Suriah ke dalam prakarsa OBOR Cina adalah bentuk suatu kepentingan nasional. Dimana prakarsa OBOR adalah bentuk perpanjangan diri Cina dalam mencari jalur perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya.

Bentuk perpanjangan diri Cina yang ke dua dalam konflik Suriah adalah veto itu sendiri. Cina sebagai kekuatan global telah berkomitmen terlibat dalam penyelesaian konflik Suriah. Pada tanggal 20 Januari 2014, menteri luar negeri Cina Wang Yi mengemukakan lima prinsip untuk menyelesaikan masalah konflik Suriah. Kelima hal itu adalah : Yang pertama ,masalah di Suriah harus

¹⁵⁸ Yamei,2017,” Full text of President Xi's speech at opening of Belt and Road forum”,xinhuanet diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982.htm pada 10 desember 2017

diselesaikan melalui cara cara politik. Tindakan militer bukanlah jawaban atas masalah Suriah. Semua pihak harus menyuarakan tuntutan mereka melalui dialog dan negosiasi daripada melalui konflik bersenjata. Yang kedua, masa depan Suriah harus diputuskan oleh bangsanya sendiri. Yang ketiga, proses transisi politik inklusif harus didukung. Yang keempat, rekonsiliasi dan persatuan nasional harus dicapai di Suriah. Yang kelima , bantuan kemanusiaan harus diberikan kepada Suriah dan negara negara di sekitarnya¹⁵⁹.

Lima prinsip yang dikeluarkan Cina tersebut sejalan dengan setiap tindakan Cina di tingkat internasional seperti berbagai keterlibatannya dalam berbagai proses perdamaian damai seperti yang penulis jelaskan pada variabel sebelumnya seperti keterlibatannya dalam konferensi Jenewa, Astana Talks ,*Vienna peace talks* dan lain lain¹⁶⁰. Sehingga untuk mewujudkan prinsip tersebut, Cina perlu memberikan suatu pengaruh di tingkat internasional. Veto yang dilakukan Cina, menurut penulis adalah suatu bentuk pengaruh ataupun kontrol yang digunakan Cina untuk mengarahkan jalannya penyelesaian konflik Suriah seperti yang dikehendaknya sesuai dalam prinsip tersebut. Terkait prinsip tersebut, Cina selama ini selalu menyuarakan mengenai ketidak setujuannya mengenai solusi non politik, sehingga solusi politik adalah solusi terbaik. melalui pernyataannya, Cina juga memveto resolusi resolusi yang dianggap menghambat berlangsungnya solusi politik. Cina juga memveto resolusi yang dianggap tidak menghormati

¹⁵⁹ Anonymous, 2017, " China Stands for Five Principles in a Political Settlement of The Syrian Issue", embassy of the people republic of China in the united arab emirates diakses dari <http://ae.china-embassy.org/eng/gdxw/t1121020.htm> pada 11 desember 2017

¹⁶⁰

kedaulatan negara Suriah, sehingga menurut Cina solusi konflik Suriah harus diputuskan oleh masyarakat Suriah sendiri.

Mengacu kepada studi terdahulu penulis, veto yang dilakukan Cina untuk mempengaruhi jalannya penyelesaian konflik Suriah akan memperkuat pengaruh Cina kepada pemerintah Suriah dan juga memperkuat pengaruh Cina di kawasan Timur Tengah. Dimana sebelum terjadinya *arab spring*, Cina mencoba menghadirkan diri di kawasan ini dengan berbagai upaya kerja sama ekonomi dan kebudayaan, termasuk di Suriah¹⁶¹. dalam penyelesaian konflik Suriah, Cina berusaha menjaga stabilitas kawasan timur tengah karena dianggap begitu penting bagi pembangunan Cina seperti yang dinyatakan oleh wakil menteri luar negeri Cina Zhang miang berikut :

*"If the Middle East is not stable, I'm afraid the world can't be very peaceful. If a country or a region is not stable, it cannot realise development. China firmly supports regional countries individually exploring a development path that suits their national conditions."*¹⁶²

Hal ini sesuai dengan salah satu kebijakan Cina yang dikeluarkan oleh kementrian luar negerinya yang berjudul *china's arab policy paper*. Kebijakan ini menetapkan prinsip panduan untuk mengembangkan hubungan Cina dan negara negara Timur Tengah yang saling menguntungkan, dan menegaskan kembali akan komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, untuk mendorong hubungan Cina dan negara negara Arab ke tingkat yang lebih

¹⁶¹ Zambelis chris, 2008, "the geopolitics of sino syrian relations", publication china brief issue : 8 no 20, the jamestown foundation diakses dari <https://jamestown.org/program/the-geopolitics-of-sino-syrian-relations/> pada 22 oktober 2017

¹⁶² Aronson geoffrey, 2016, "chinas's vision on middle east", al jazeera diakses dari <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/01/china-vision-middle-east-160121052018955.html>

serius. Dalam bagian paper ini, dibahas mengenai kerjasama untuk keamanan regional dimana Cina menyerukan sebuah konsep keamanan bersama, komprehensif, kooperatif dan berkelanjutan di Timur Tengah, dan mendukung negara negara Arab dalam upaya mereka untuk membangun mekanisme keamanan kerjasama kolektif bersama, untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang, kemakmuran dan pembangunan di Timur Tengah¹⁶³.

Dari penjelasan tersebut Cina melakukan perpanjangan diri dalam menyelesaikan konflik Suriah melalui veto untuk melakukan perpanjangan diri ke wilayah Timur Tengah, karena regional tersebut penting bagi pembangunan Cina dan pembangunan dunia sesuai yang tertuang dalam *china's arab policy paper* yang dileuarkan kementerian luar negeri Cina.

5.3 Kepentingan Jangka Panjang

Kepentingan jangka panjang berkaitan dengan rencana, impian, dan visi suatu negara atau yang berhubungan dengan organisasi politik, ideologi pada sistem internasional, atau peran negara tertentu di dalam suatu sistem. Pada kepentingan jangka panjang negara biasanya membuat tuntutan secara universal untuk mencapai tujuannya melakukan konstruksi ulang terhadap sistem internasional. Beberapa visi negara ini mungkin digambarkan secara eksplisit, berasal dari hal yang berkaitan dengan filosofis politik ataupun agama¹⁶⁴. Pada

¹⁶³ Anonymous, 2016, "china's arab policy paper", ministry of foreign affair republic of china diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1331683.shtml

¹⁶⁴ Holsti KJ, 1987, "International politics : a framework for analysis", prentice – hal international inc : new jersey hal 107

variabel ini penulis akan melihat bagaimana Cina melalui vetonya berupaya membentuk satu norma baru di tingkat internasional khususnya PBB.

Lebih dari sepuluh tahun terakhir, Cina berubah dari negara berkembang menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Dimana kekuatan ekonomi di masa pasca perang dingin menjadi salah satu power utama yang dimiliki negara. Pertumbuhan ekonomi rata rata Cina mencapai 9% dengan industri barang dan jasa yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagai kekuatan ekonomi baru, Cina telah menggeser IMF dan bank dunia sebagai negara pemberi pinjaman di kawasan Amerika Latin. Cina juga menggeser Amerika sebagai investor utama sumber energi di Afrika. Melihat fenomena ini, Cina diprediksikan akan menggeser Amerika sebagai kekuatan ekonomi global. Kekuatan ekonomi Cina pada satu dekade yang lalu belum diiringi dengan upaya meningkatkan kekuatan Cina di tingkat internasional¹⁶⁵.

Namun, sikap Cina di tingkat internasional mulai berubah di era Xi Jinping. Di era Xi Jinping, Cina mulai bersikap asertif dan lebih terlibat aktif dalam politik internasional dan pada negara tetangganya. Hal itu ternyata berkaitan dengan impian Cina atau yg dikenal dengan *chinese dream*. *Chinese dream* digambarkan sebagai visi pengembangan Cina dalam beberapa dekade kedepan. Keseluruhan fokus dari *chinese dream* adalah sebuah mimpi untuk mencapai kebangkitan nasional. Perkembangan yang di maksud, salah satunya

¹⁶⁵ Petras james,2012, "China: Rise, Fall and Re-Emergence as a Global Power",global research diakses dari <https://www.globalresearch.ca/china-rise-fall-and-re-emergence-as-a-global-power/29644> pada 30 november 2017

mengenai perkembangan Cina di tingkat internasional. Dalam *chinese dream* juga seringkali ditekankan mengenai sosialisme dengan karakteristik Cina, *chinese dream* juga menjadi perwujudan dari program pembangunan Cina di era Xi Jinping yaitu *China Peaceful Development*¹⁶⁶.

Seorang anggota dewan Cina Yang Jiechi menjelaskan hubungan dalam mewujudkan mimpi rakyat Cina(*chinese dream*) dengan tindakan Cina di tingkat internasional. Untuk mencapai hal tersebut, Cina membutuhkan lingkungan internasional dan negara tetangga yang damai dan stabil. Cina ingin mewujudkan mimpinya melalui pembangunan yang damai, yang juga terkait erat dengan impian semua masyarakat dunia. Untuk mencapai hal itu, Cina berkomitmen untuk membantu negara-negara lain khususnya negara-negara berkembang¹⁶⁷. Presiden Cina Xi Jinping dalam pidatonya juga menjelaskan untuk mewujudkan impian rakyat Cina diperlukan lingkungan yang stabil, damai dan harmoni seperti pada pernyataannya berikut :

*"To realize our goals, we must have a peaceful international environment. Without peace, China and the world could not enjoy smooth development; without development, China and the world could not enjoy lasting peace"*¹⁶⁸,

Salah satu hal yang seringkali menjadi wacana para pemimpin dan perwakilan Cina saat membahas *chinese dream* adalah mengenai 'konsep

¹⁶⁶ Sorensen Camilla, 2015, "The Significance of Xi Jinping's "Chinese Dream" for Chinese Foreign Policy: From "Tao Guang Yang Hui" to "Fen Fa You Wei", JCIR: VOL. 3, No. 1 hal 55 diakses dari https://pure.fak.dk/ws/files/7289068/JCIR_2015.pdf

¹⁶⁷ He, Kai; Feng, Huiyun, 2012, "Debating China's assertiveness: Taking China's power and interests seriously", Basingstoke Vol. 49, Iss. 5, (Sep 2012): 633-644.

¹⁶⁸ Shaoji tian, 2016, "Xi's worldwide diplomacy benefits China, the world", xinhua net diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2016-01/05/c_134980392.htm pada 2 januari 2018

hubungan internasional baru' yang didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan, dan penyelesaian damai dari perselisihan regional dan internasional. Jika di masa lalu, Cina cenderung menyebut dirinya sebagai negara berkembang dan juga sikap Cina di PBB selalu menghindari konfrontasi, serta ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika, maka melalui pidatonya yang disampaikan oleh Xi Jinping di PBB pada tahun 2013 maka Cina menggambarkan dirinya sejajar dengan Amerika sebagai *global power* dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian internasional yang baru. Sehingga hal ini mengindikasikan adanya keinginan Cina untuk membentuk satu norma baru di tingkat internasional, bahkan Cina menganggap kerjasama yang baik antara Cina dan Amerika akan menciptakan dunia yang lebih harmonis seperti pernyataannya berikut :

“China and the US must walk a new road, different from the past where great powers inevitably displayed antagonism and conflict. We must walk a path where both sides must work hard to build a new kind of great power relationship of mutual respect and profit, in order to benefit the people of both nations and the people of the world. This is something that is important to pay attention to in international relations, because good cooperation between the US and China is the cornerstone of a stable world, and a tool for promoting world peace¹⁶⁹”

Dalam sebuah wawancara, presiden Assad juga menyatakan hal yang senada bahwa veto yang dilakukan Cina adalah sebuah bentuk *political balance* yang bertentangan dengan negara negara barat yang dianggap menguntungkan bagi negara kecil atau negara yang tak terlalu kuat seperti Suriah seperti

¹⁶⁹ opcit

pernyataan Assad berikut *“Of course, Syria was the headline, the main headline. This is good for Syria, but, again, it’s good for the rest of the world”*¹⁷⁰,

Dalam membangun perdamaian internasional, Cina selama ini berpendapat mengenai hak asasi manusia internasional dimana Cina mendukung hak kolektif dan kedaulatan negara diatas hak individu dan intervensi internasional¹⁷¹. Terkait norma ini, Cina mewujudkannya dalam tindakan di PBB seperti memveto beberapa rancangan resolusi Suriah yang berkaitan dengan upaya penurunan rezim paksa atau intervensi juga sanksi, begitu juga sikap Cina di berbagai negosiasi politik seperti konferensi Jenewa dimana Cina tidak sependapat dengan negara negara barat yang menganggap penurunan rezim Assad adalah solusi terbaik. Prinsip non intervensi yang berusaha ditunjukkan Cina ini berbeda dengan norma negara negara barat yang pada umumnya mengupayakan intervensi kemanusiaan internasional. Di tingkat dewan keamanan PBB negara negara barat pada umumnya membenarkan adanya intervensi ketika sebuah negara gagal melindungi rakyatnya sendiri, sementara Cina merasa mempunyai tanggung jawab yang sama di PBB¹⁷².

Penulis melihat bahwa melalui tindakannya, Cina berusaha mengubah norma konvensional bahwa norma politik dan hak asasi manusia internasional yang selama ini di bawa negara negara barat . semua perkembangan

¹⁷⁰ Taylor adam,2017,”bashar al assad says relations with china are on the rise”, the washington post diakses dari https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/12/bashar-al-assad-says-relations-between-syria-and-china-are-on-the-rise/?utm_term=.59c8a0d5384b pada 24 desember 2017

¹⁷¹ opcit

¹⁷² ibid

ini menunjukkan bahwa Cina semakin terlibat dalam membangun sistem internasional khususnya PBB melalui agendanya sendiri sehingga Cina menjadi negara yang berpengaruh yang berupaya membawa norma baru khususnya dalam hal intervensi atau hak asasi manusia. hal itu adalah upaya Cina dalam menciptakan pandangan baru dalam dunia internasional menggeser norma yang selama ini dibawa negara barat mengenai intervensi kemanusiaan ketika negara gagal melindungi masyarakatnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan beberapa hal mengenai kepentingan Cina memveto rancangan resolusi PBB terkait konflik Suriah tahun 2011-2017. Kepentingan tersebut penulis analisis menggunakan konsep kepentingan nasional milik KJ Holsti yang dikategorikan menjadi tiga jangka waktu yaitu kepentingan inti, jangka menengah, dan jangka panjang.

Hasil temuan dari penelitian penulis menunjukkan bahwa kepentingan inti Cina adalah mencegah menguatnya gerakan separatis dalam negeri yaitu pemberontak Uighur yang ber afiliasi dengan kelompok oposisi di Suriah. Veto yang dilakukan Cina ber implikasi untuk mencegah melemahnya kekuatan pemerintah Suriah agar tetap dapat memerangi pihak oposisi, sehingga pihak oposisi tidak menjadi semakin kuat yang kemudian mengancam kedaulatan Cina. Hal ini merupakan bagian dari melindungi teritori wilayah Cina dan juga menjaga kesatuan etnis di dalam negeri Cina.

Pada kepentingan jangka menengah Cina berupaya memenuhi tuntutan perbaikan ekonomi melalui rencana investasi dan kerjasama perdagangan yang terbentuk sebagai upaya rekonstruksi Suriah pasca konflik. Dimana Cina mendapat prioritas sebagai negara yang dipilih untuk berperan besar dalam melakukan rekonstruksi. Prioritas ini adalah bentuk semakin dekatnya hubungan

kedua negara yang tentu saja tidak terlepas dari setiap peran Cina dalam konflik Suriah termasuk vetonya. Selanjutnya, Cina meningkatkan nama baiknya dengan melakukan berbagai tindakan diplomatik untuk mendorong penyelesaian konflik secara politik. Dimana penyelesaian konflik secara politik adalah salah hal yang selalu ditekankan Cina ketika melakukan veto. Untuk meningkatkan nama baiknya, Cina melakukan bantuan pelatihan militer, tetapi dikarenakan kapabilitas militer Cina dalam konflik Suriah terlalu minim, maka hal ini tidak menjadikan kurang kuatnya kepentingan Cina dalam indikator ini. Berikutnya, dalam indikator pemberian bantuan luar negeri juga Cina telah memberikan banyak bantuan kepada Suriah melalui berbagai jalur, tetapi hal ini tidak menjadi kepentingan Cina karena veto yang dilakukan Cina tidak mempengaruhi pemberian bantuan luar negeri tersebut.

Kemudian Cina melakukan perpanjangan diri dengan memasukkan Suriah ke dalam jalur sutra Cina sebagai bagian rekonstruksi pasca konflik dimana veto Cina berdampak pada diprioritaskannya Cina untuk terlibat lebih banyak dalam rekonstruksi secara ekonomi. Selain itu, Cina bersama Suriah juga membahas kesepakatan mengenai counter terorisme sebagai bagian dari rekonstruksi pasca konflik, dimana counter terrorisme ini adalah salah satu fokus pembangunan Cina, veto yang dilakukan Cina juga bentuk perpanjangan diri dalam menyelesaikan konflik di Suriah.

Yang terakhir, kepentingan jangka panjang. Melalui vetonya Cina memposisikan dirinya sebagai kekuatan global yang setara dengan Amerika dan merasa turut mempunyai tanggung jawab dalam membentuk perdamaian dunia.

Hal ini didasarkan pada salah satu visi Cina era Xi Jinping yang ingin menciptakan suatu hubungan internasional era baru. Sehingga Cina ingin menciptakan norma baru khususnya terkait intervensi kemanusiaan.

6.2 Saran

1. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya, jika ada penulis yang menggunakan fenomena veto Cina pada Suriah dapat menggunakan konsep yang berbeda dengan penulis agar memberikan perspektif lebih banyak
2. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dikarenakan proses penyelesaian konflik Suriah masing berlanjut
3. Pada penelitian ini, penelitian penulis berfokus pada kepentingan veto Cina di Suriah, diharapkan penelitian yang lainnya dapat memperbaiki kekurangan dan ketidak sempurnaan dari penelitian penulis

DAFTAR PUSTAKA

Website

Anderson robert,2017,” Chinese companies poised to help rebuild war-torn Syria”, asia times diakses dari <http://www.atimes.com/article/chinese-companies-poised-help-rebuild-war-torn-syria/>

Anonymous,” What is China's role in the North Korean crisis? “, dw.com diakses dari <http://www.dw.com/en/what-is-chinas-role-in-the-north-korean-crisis/a-40029214> pada 4 januari 2018

Anonymous,2014,” China's president warns against growing threats to national security”, reuters diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-xi-security/chinas-president-warns-against-growing-threats-to-national-security-idUSBREA3P0DW20140426>

Anonymous,2011,”china issues white paper on peaceful development”,ministry of forein affair of the people’s republic china diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/whitepaper_665742/t856325.shtml

Anonymous,2016,” Syria war: UN envoy opens peace talks in Geneva”,aljazeera diakses dari <http://www.aljazeera.com/news/2016/03/syria-war-envoy-opens-peace-talks-geneva-160314093532404.html>

Anonymous,2017, “long term strategy: chinese firm eager to see syria part of silk road project”,sputnik news diakses dari <https://sputniknews.com/middleeast/201707241055829804-china-investment-syria-infrastructure/>

Anonymous,2016,” Special Envoy of the Chinese Government on Syrian Issue Xie Xiaoyan Visits Syria”,ministry of foreign affaris of the people’s republic of China diakses dari http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1358513.shtml

Anonymous,2012,” wang Yi Attends Geneva II Conference on The Syrian Issue “
,consulate general of the people republic of china in sydney diakses dari

<http://sydney.chineseconsulate.org/eng/zgxw/t1124570.htm>

blanchard ben, 2017,” Syria says up to 5,000 Chinese Uighurs fighting in militant
groups”, reuters diakses dari <https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-china/syria-says-up-to-5000-chinese-uighurs-fighting-in-militant-groups-idUSKBN1840UP>

Blanchard ben,2016,” Syria ready to take part in Geneva peace talks: minister”,
reuters diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/syria-ready-to-take-part-in-geneva-peace-talks-minister-idUSKBN0U70BC20151224>

Charlton corey,2015,” Hooded and shackled: 100 Chinese Muslims who were
'plotting to join ISIS in Syria' are deported from Thailand”, dailymail diakses dari
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3158216/Hooded-shackled-100-Chinese-Muslims-plotting-join-ISIS-Syria-deported-Thailand.html> pada26

Fenby jonathan , 2011 , “china’s foreign policy balancing act part 1”, yale global
online . diakses dari <http://yaleglobal.yale.edu/content/chinas-foreign-policy-balancing-act-part-i>

Gao charlotte, 2017,”why china wants syria in its new belt and road”,the diplomat
diakses dari <https://thediplomat.com/2017/11/why-china-wants-syria-in-its-new-belt-and-road/>

Hernandez javier,2015,”Qn A christina lin on china terrorism effort”, the new
york times diakses dari <https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/asia/china-terrorism-xinjiang-paris-christina-lin.html>

Hernandez javier,2015,”Qn A christina lin on china terrorism effort”, the new
york times diakses dari <https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/asia/china-terrorism-xinjiang-paris-christina-lin.html>

Lifang,2017,” Counter-terrorism, dialogue key to solving Syria issue: Chinese
FM”,xinhuanet diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/24/c_136776919.htm

Mcclean Emma, 2014, “who uses veto in the UN security council most often and
for what”, the conversation . diakses dari <http://theconversation.com/hard->

[evidence-who-uses-veto-in-the-un-security-council-most-often-and-for-what-29907](#)

Mcknight mills , 2015 “china again calls for political solution in syria” , reuters world news. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-china-idUSKCN0RU0FN20150930>

Malik sajad,2017,” Geneva IV and ray of hope for Syrian peace” ,china.org.cn diakses dari http://www.china.org.cn/opinion/2017-03/09/content_40434364.htm

Mrou basem, 2017, “Chinese jihadis' growing presence in Syria is stoking concern in Beijing”,bussiness insider UK diakses dari <http://uk.businessinsider.com/ap-chinese-jihadis-rise-in-syria-raises-concerns-at-home-2017-4/?IR=T>

Nick cumming,2012,” Talks Come Up With Plan for Syria, but Not for Assad’s Exit”, the new york times diakses dari <http://www.nytimes.com/2012/07/01/world/middleeast/future-of-syria-on-agenda-as-countries-gather-in-geneva.html>

Pjilips tom,2017,” hina: Xi Jinping wants ‘Great Wall of Steel’ in violence-hit Xinjiang”,the guardian diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/11/china-xi-jinping-wants-great-wall-of-steel-in-violence-hit-xinjiang>

Philips matt,2016,”the collapse of syrian economy is worse than germany after world war ii”, quarts diakses dari <https://qz.com/741432/the-collapse-of-the-syrian-economy-is-worse-than-germany-after-world-war-ii/>

Ozmichli samar,2013,” Report Shows Impact of War on Syrian Economy”, al monitor diakses dari <https://www.al-monitor.com/pulse/business/2013/02/economic-impact-syrian-crisis.html>

Qinyun wang, 2016,” China looks to mediate Syria's civil war, chinadaily.com.cn diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/07/content_22985419.htm

Qinyun wang,2016,”china looks to mediate syria civil war”,chinadaily diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/07/content_22985419.htm

Security council, 2012 , “security council fails to adopt draft resolutions on syria as russian federation , chinaveto text supporting arab league’s propoosing peace plan”, United Nations diakses dari <http://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm>

Security council, 2012 , “security council fails to adopt draft resolutions on syria that would have threatened sanction, due to negative votes of china,russian federations”, United Nations diakses dari <http://www.un.org/press/en/2012/sc10714.doc.htm>

Shannon Tiezi, 2014 "China at Geneva II: Beijing's Interest in Syria," ,The Diplomat
Diakses dari <http://thediplomat.com/2014/01/china-at-geneva-ii-beijings-interest-insyria/>

Statista , 2014 , “breakdown of china crude oil imports in 2014 by source country” , statista.com diakses dari <https://www.statista.com/statistics/221765/chinese-oil-imports-by-country/>

Syrian chinese bussiness council, “preview of scbc council”, diakses dari <http://www.scbc.sy/about2.html>

Tiantian bai, 2017,” china eyes syria rebuild”,sputnik news diakses dari <https://sputniknews.com/business/201709281057764315-china-eyes-syria-rebuild/>

Tiezzi shanon,2015,”china will invite syrian government opposition for peace talks”, the diplomat diakses dari <https://thediplomat.com/2015/12/china-will-invite-syrian-government-opposition-for-peace-talks/>

UN news center, 2014, “russia, china block security council referral of syria to international criminal court” , UN News Center diakses dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47860#.WBZYqyRfd88>

UN news center, 2016, “security council fails to adopt resolution calling for ceasefire in aleppo”, United Nation diakses dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55721#.Wd3kzGi0PIU>

United nations security councils, 2016, “function and powers” , United Nations. Diakses dari <http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml>

United nations security councils, 2016, “voting system and records” , United Nations. Diakses dari <http://www.un.org/en/sc/meetings/voting.shtml>

Wanderson robert,2017, “chinese companies poised help rebuild war-torn syria”, asia times diakses dari <http://www.atimes.com/article/chinese-companies-poised-help-rebuild-war-torn-syria/>

Workman daniel , 2016 , “china's top import partners” , world's top export diakses dari <http://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/723/>

Xuetong yan, 2012 , “ china's veto to syria : a view from china”, carnegie europe diakses dari <http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=47217>

Yi yang,2017,” Astana process on Syria considers involving new members: Russian representative”,xinhua.net diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/15/c_136611793.htm

Yamei,2017,” Full text of President Xi's speech at opening of Belt and Road forum”,xinhuanet diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982.htm

Buku, jurnal, dan tesis

Amstutz, Mark R,2014,” *Evangelicals and American Foreign Policy*” ,New York: Oxford University Press

Anonymous, 2011,”counter terroris and human rights the impact of SCO”, a human rights china white papper ISBN-10: 0-9717356-0-3

Anonymous,2016,”the international syria support group”,the syria institiute

Carrol E William , 2011 , “china in the shanghai cooperation organisation : hegemony, multipolar balance , or cooperation in central asia” , international journal of humanities and social science vol 1 no 19 desember 2011

Dian monika,”dinamika kebijakan luar negeri AS terhadap kelompok uighur tahun 2002-2011” , tesis : universitas indonesia

Fatima poeti , 2012 , “tesis : dampak european neighbourhood policy tahun 2004 sebagai smart power uni eropa terhadap demokrasi di negara commonwealth of independent state” , universitas indonesia

gobat jane,2016,”syria conflist economy, imf working papper : IMF

He, Kai; Feng, Huiyun,2012,” Debating China's assertiveness: Taking China's power and interests seriously” , Basingstoke Vol. 49, Iss. 5, (Sep 2012): 633-644.

Holsti KJ, 1987 ,”International politics : a framework for analysys” , prentice – hal international inc : new jersey

Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999. Kamus Hubungan Internasional,Bandung: abardin

Justyna Szczudlik-Tatar, 2012 "China's Position During the Crisis in Syria" *The Polish Institue of International Affair* 76:409

Konierski lukas,2016,”the syria peace process-a chance to end conflict”,pulaski policy papper ISSN 2080-8852 hal 4

Lin Christina, 2015, “chine general : anti chinese uighur are in syria's anti assad force” , ISPW strategy series : focus on defense and international security issue no 353 mei 2015

- Mohtar masoed , 1990 , “ilmu hubungan internasional disiplin dan penelitian” ,
yogyakarta : LP3ES
- Mordai chaziza,2016,”syria’s civil war : stage for greater chinese involvement in
the middle east”, Middle East Review of International Affairs, Vol. 20, No. 2
- Mu ren , 2014 , “interpreting china’s non intervention policy to syrian crisis” ,
reitsumei bulletin 27-1 juni 2014
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M,2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*,
Bandung: PT Remaja Rosdakarya hal 47-48
- Rudi May T,2002, “studi strategis dalam transformasi sisteminternasional pasca
peranf dingin” , bandung : refika aditama
- Shicor yitzak, 2006, “china’s voting behaviour in the UN security councils”, china
brief volume 6 issue 18
- Suharsimi Arikunto, 2010 , Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik. Edisi
revisi. Jakarta : rineka cipta
- Suyanto Bagong , 2006, “*Metode penelitian sosial : berbagai alternatif
pendekatan*“, Jakarta , kencana
- Talukdar indrani, 2014, “russia strategic interest in syria” , indian council of
worlds affair issue brief may 2014
- TN Camilla, 2015 , “the significance of xi jinning china’s dream for chinese
foreign policy : from tao guang yang hui to fen fa yu wei”, JCIR : Vol 3 no 1 2015
- Tong xueyan, 2002, “analysis of china national interest”
- Vaessen Eline, 2014 , “the syrian civil war” , master thesis vinal version ,
Erasmus University Rotterdam
- Wulansari Ica,dody, 2012 , propaganda Amerika Serikat terhadap Iran melalui
pemberitaan media masa (sebuah tinjauan : dampak program pengembangan
nuklir Iran terhadap Amerika Serikat)”, jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Transnasional Vol. 7 No. 1 Juni 2012 (42-45) FISIP Universitas Budi Luhur